



BULLETIN
RENSERAJAK
Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2024

Penerbit:

**Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

ISSN 3063-8364



9 773063 836039

**BULLETIN**

RENSTRAJAK

Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2024

“Kita perlu berkolaborasi lebih erat antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pihak lainnya agar stunting maupun kemiskinan dapat teratasi dengan baik”

Yusharto Huntoyungo, M.Pd
(Kepala BSKDN Kemendagri)

**PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN RAKORNAS BSKDN KEMENDAGRI
IMPLEMENTING AGENCY PADA PROGRAM SKALA
PENANDATANGANAN MOU KEMENDAGRI DENGAN YAYASAN
NUSANTARA SEJATI (YNS) MITRA KOSSO NIPPON**

VISI

Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif

MISI

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (research based policy);
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Mewujudkan kelembagaan Strategi Kebijakan yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

BULLETIN RENSTRAJAK

Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2024



DITERBITKAN OLEH :

**Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri**

ALAMAT REDAKSI :

**Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

E-MAIL :

bskdn@kemendagri.go.id

WEBSITE :

bskdn.kemendagri.go.id/website

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

PENASEHAT :

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

PENANGGUNG JAWAB :

Dr. Noudy R.P Tendean, S.IP, M.Si

PIMPINAN REDAKSI :

Tomy Veryanto Bawulang, S.Pd., M.Ed.,Lead, Ph.D.

SEKRETARIS REDAKSI:

Rachman Kosasih, S.T

REDAKTUR PELAKSANA:

Devi Ariefta Cahyani, S.H.

TIM REDAKSI:

Tomy Veryanto Bawulang, S.Pd., M.Ed.,Lead, Ph.D.

Rachman Kosasih, ST

Yos Saputra, S.Kom

Gunawan Adi Saputra Silalahi, S.STP

Mohammad Rizky Luthfiah Aziz, S.H.Intl., M.I.Pol.

Anselmus Herisno Dwicahyo,SE

Gogo Ricky Martin Purba, S.Tr.IP.

Annisa Putri Riyanto, S.IP.

Dea Afdila, S.Tr.IP.

Aji Nur Cahyo, S.IP

Devi Ariefta Cahyani, S.H.

Dwi Indarti, S.Kom

Lina Widayanti, A.md.Ak

Futi Istiningtyas, SE

Ibrahim Purindra, S.AP

Supriyoko, SE

TIM KREATIF DESAIN:

Devi Ariefta Cahyani, S.H

Fajar Haramukti, S.Sn

Sandy Prasetyo S.Kom

Haryanto, ST

PENYUNTING:

Rachman Kosasih, ST

Mohammad Rizky Luthfiah Aziz, S.H.Intl., M.I.Pol.

Anselmus Herisno Dwicahyo,SE

Gogo Ricky Martin Purba, S.Tr.IP.

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca Bulletin Renstrajak BSKDN Kemendagri yang berbahagia,

Pertama tama marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan YME, atas berkat dan rahmatnya kita dapat menerbitkan bulletin edisi ke III pada bulan Juli s.d September tahun anggaran 2024. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sebagai pemberi rekomendasi kepada pemangku kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai poros kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri agar kebijakan yang dihasilkan dapat memiliki landasan konseptual hasil analisis komprehensif dan melalui proses penelaahan sesuai kaidah keilmuan dan prinsip-prinsip praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Adapun beberapa kegiatan di edisi ke III pada bulan Juli s.d September tahun anggaran 2024, di antara lain Evaluasi Kelembagaan lingkup BSKDN, Persiapan Rakornas dan IGA BSKDN TA 2024, Kerjasama dengan beberapa mitra seperti YNS, SKALA, Monash University, BRIN, Universitas Airlangga, Ironwood, dan Kompas TV.

Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN Kemendagri tertuang dalam Bulletin Renstrajak, disusun agar memudahkan semua pembaca dalam proses dan hasil kegiatan. Kami Bagian Perencanaan berharap agar Bulletin Renstrajak BSKDN Kemendagri dapat menghasilkan informasi yang telah terdokumentasi secara lengkap. Bulletin ini tentunya butuh dukungan dari semua pihak untuk dapat menjaga konsistensi dan kualitas.

Selamat membaca Bulletin Renstrajak untuk mengetahui kegiatan pada Bagian Perencanaan.

Salam Planner.



**Kepala Bagian Perencanaan,
Tomy Veryanto Bawulang, M.Ed.,Lead, Ph.D.**



DAFTAR ISI

Susunan Umum

| | |
|-----------------------|---|
| Susunan Dewan Redaksi | 1 |
| Pengantar Redaksi | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| Literasi Perencanaan | 4 |

Serba Serbi Bagren

| | |
|-----------------------|-----------|
| Serba Serbi Juli | 5 - 58 |
| Serba Serbi Agustus | 59 - 112 |
| Serba Serbi September | 113 - 150 |

Info Bagren

| | |
|-------------------|-----------|
| Galeri Bagren | 151 - 152 |
| Kuliner Nusantara | 153 - 154 |
| Bagren Squad | 155 |

B

S

K



D

N



Literasi Perencanaan



Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan dalam pemerintahan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan ini dilakukan untuk membentuk operasi administratif internal pemerintah atau operasi ekonomi secara keseluruhan. Proses ini meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebijakan yang ada, serta perumusan alternatif kebijakan. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam tahap ini.

Bagian Perencanaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri umumnya berfungsi untuk merumuskan, merencanakan, dan mengoordinasikan kebijakan - kebijakan strategis yang berkaitan dengan urusan dalam negeri. TUSI Bagren di atur dalam Permendagri 137 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri

Hal tersebut diatur dalam Pasal 701 Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penataan sistem dan prosedur, sistem pengendalian intern pemerintah serta penyusunan laporan kinerja evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama, dan penyiapan rancangan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 702 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- penyiapan bahan dan pengelolaan data dan informasi, monitoring program dan anggaran, evaluasi kinerja serta sistem pengendalian intern pemerintah;
- penataan sistem dan prosedur, serta penyusunan laporan kinerja; dan
- penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama, serta fasilitasi penyusunan peraturan perundang - undangan dan produk hukum.

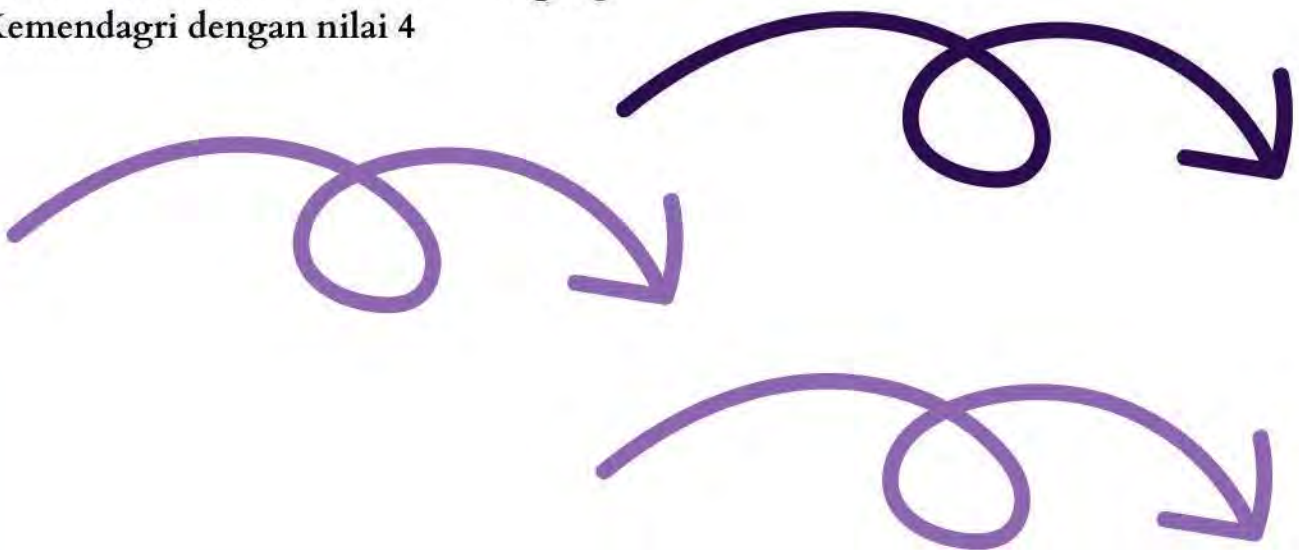


Serba Serbi Juli

Rapat Finalisasi Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkup Kemendagri Tahun 2024

Rapat dilaksanakan melalui zoom meeting, dipimpin oleh Perencana Ahli Muda Bagian Monev Biro Perencanaan Setjen Kemendagri, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh UKE I Kemendagri. Dalam rapat dilakukan pembahasan terkait progress pelaksanaan penilaian maturitas SPIP Kementerian Dalam Negeri

BSKDN telah menyampaikan pengisian formulir SPIP kepada Biro Perencanaan. Biro Perencanaan berharap seluruh UKE I Kemendagri dapat bersinergi untuk mencapai target nilai maturitas SPIP lingkup Kemendagri dengan nilai 4



Rapat Pembahasan Draft Policy Brief Strategi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak dan Strategi Pemenuhan Penyandang Disabilitas Pada Pemilu

Rapat dilaksanakan Pukul 14.00 WIB melalui aplikasi zoom meeting yang dipimpin oleh Plh. Kapus Polhum dan dihadiri oleh perwakilan masing2 Pusat dan Bagian lingkup BSKDN.

Rapat ini bertujuan untuk finalisasi draft Policy Brief Strategi Pemuktahiran Data Pemilihan Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak dan Strategi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Pemilu.

Beberapa masukan telah disampaikan dari peserta zoom untuk lebih memberikan hasil rekomendasi yang lebih komprehensif.

Bagian Perencanaan mengharapkan agar topik rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan seluruh Pusat Strategi Kebijakan, dapat sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan UKE I lingkup Kemendagri untuk dapat meningkatkan kinerja.

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a slide titled "PEMBAGIAN TUGAS ASESOR" from the "Kementerian Dalam Negeri". The slide contains a table with three columns: "ASESOR", "Rujukan Dokumen", and "KERTAS KERJA".

| ASESOR | Rujukan Dokumen | KERTAS KERJA |
|--|--|--|
| KEMENTERIAN | | |
| A. PENETAPAN TUJUAN (PERENCANAAN) | Pe Menteri Dalam Negeri Pe Pejabat Eselon I Kementerian Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 | KK 1.2 (STRATEGI) KK 1.2 (PROGRAM) |
| B. EFEKTIVITAS & SISTEM PENGAPILAN TUPAK (EVALUASI) | Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Laporan Kinerja UKE I Kementerian Mata & Misi / UMMAT Kementerian | KK 3.1 (CAPAIAN STRATEGIS) KK 3.2 (CAPAIAN PROGRAM) |
| C. KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN | Laporan Pemantauan BPK -- memberikan gambaran seluruh Unggulan Kementerian | KK 3.2 STRUKTUR DAN PROSES T2 KEARIFAN LAPORAN KEUANGAN KK 4 |
| D. PENGEMASAN ASSET NEGARA | Laporan Pemantauan BPK -- memberikan gambaran seluruh Unggulan Kementerian | KK 3.3 Struktur dan Proses T2 Pengemasan Asset Negara KK 7 |
| E. KEPENTINGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG | Laporan Pemantauan BPK -- memberikan gambaran seluruh Unggulan Kementerian | KK 3.4 Struktur dan Proses T4 Kepentingan Terhadap Peraturan Perundang-undangan KK 8 |
| UKE I | | KK 1.1 (Strategi) KK 1.2 (Program) KK 2.1 (Regulasi) KK 2.2 (Rencana Output) KK 3.1 (Struktur dan Proses) KK 3.2 (Capaian Strategis) KK 3.3 (Capaian Program) KK 3.4 (Capaian Kegiatan) |

Serba Serbi Juli

FDA/Lokakarya Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah

Rapat dilaksanakan Aula BP2D Prov Jabar pkl. 09.00 s.d selesai dipimpin oleh Sekretaris BSKDN dihadiri oleh perwakilan Pusat dan Bagian BSKDN, Kepala BP2D Prov Jabar, Perangkat Daerah serta Para Narasumber.

Kemiskinan ekstrem (konsumsi <US\$ 1,90 PPP/hari) turun dari 19% pada tahun 2002 menjadi 1,5% pada tahun 2022 dan 1,12% di tahun 2023. Namun, lebih dari 1/3 penduduk Indonesia masih rentan secara ekonomi. Mereka jatuh miskin akibat guncangan seperti COVID-19 atau bencana alam, yang frekuensi dan tingkat keparahannya meningkat akibat perubahan iklim

Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan per Maret 2023 sebanyak 25.9 juta orang atau 9.36% dari seluruh populasi. Di tahun 2024, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 25,22 Juta atau 9,03% dari seluruh populasi. Sebagian penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan sesungguhnya masih rentan jatuh ke kemiskinan.

Tahun 2023 Kab. Indramayu secara persentase memiliki Penduduk Miskin Paling Tinggi di Provinsi Jawa Barat sebesar 12,13 Persen sedangkan secara Jumlah Penduduk Miskin Kab. Bogor menjadi Paling Banyak di Provinsi Jawa Barat sebanyak 453,760 Jiwa.



Pembahasan Proses Paraf Koordinasi dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Rapat dilaksanakan via zoom dipimpin oleh Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jendral Kemendagri, dan dihadiri oleh komponen yang ada di lingkup kemendagri dan perwakilan dari Kementerian dan Lembaga.

Dalam pertemuan yang membahas koordinasi dan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan (PUU) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, berikut hasil dan masukan yang kami sampaikan:

- Plh Kepala Biro Hukum menekankan pentingnya komunikasi efektif antar komponen untuk kelancaran penyusunan PUU. Kepala Bagian PUU menyatakan bahwa koordinasi saat ini belum efektif, sering terjadi keterlambatan persuratan, padahal banyak PUU yang bersifat mendesak.
- Biro Hukum melakukan overview beberapa rancangan PUU dan menemukan masukan yang belum dimasukkan. Pada produk hukum berupa kebijakan,
 - Ditjen Keuda melaporkan adanya hambatan harmonisasi karena masukan pimpinan yang harus diakomodir. Ditjen Polpum menyampaikan hambatan komunikasi sejak penggunaan Srikandi, terutama pada kebijakan seperti gugatan pilkada. Ditjen Adwil mengungkapkan kurangnya informasi produk hukum yang disampaikan, dan meminta asistensi Biro Hukum.
 - Biro Ortala mengingatkan perlunya konfirmasi penerapan SOP paraf koordinasi dan mempertimbangkan Permendagri terkait ketatausahaan. Ditjen Bangda mengusulkan pembuatan WhatsApp Group dan mekanisme koordinasi yang disepakati bersama. Ditjen Bina Pendes mengusulkan review dan perbaikan SOP yang ada. Itjen menegaskan perlunya pengecekan detail oleh APIP dan menyetujui pembuatan WhatsApp Group untuk mempercepat proses harmonisasi dan telaahan.

Serba Serbi Juli

Rapat perbaikan Pohon Kinerja Kemendagri TA.2024 berdasarkan Permendagri No.4/2024

Penyusunan Pohon Kinerja berdasarkan Logic Model untuk membantu menjenjangkan kinerja organisasi untuk mendapatkan kinerja yang lebih operasional hingga mendapatkan proses/aktivitas yang tepat dan berdampak bagi kinerja organisasi.

Peta permasalahan diperlukan dalam upaya menciptakan organisasi berorientasi pada hasil yang merupakan kebutuhan bagi pemerintah yang mendorong percepatan pembangunan dengan berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien

Prinsip penyusunan pohon kinerja yaitu

- LOGIS, yaitu hubungan logika sebab-akibat / jika-maka
- EMPIRIS, yaitu berdasarkan kondisi/isu yang ada
- ANTISIPATIF, yaitu berdasarkan hipotesa karena bukan untuk dipakai secara short term

- DINAMIS, yaitu mengikuti perubahan lingkungan
- WHOLISTIC, yaitu termasuk crosstting dengan outcome antara yang di organisasi lain
- OUT OF THE BOX, yaitu untuk mendapatkan yang terbaik dan tidak untuk mempertahankan kondisi eksisting
- MATERIALISME, yaitu penting, bobot, tinggi dan strategis

Penyempurnaan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan system monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan nasional konsep logical framework dan SMART.

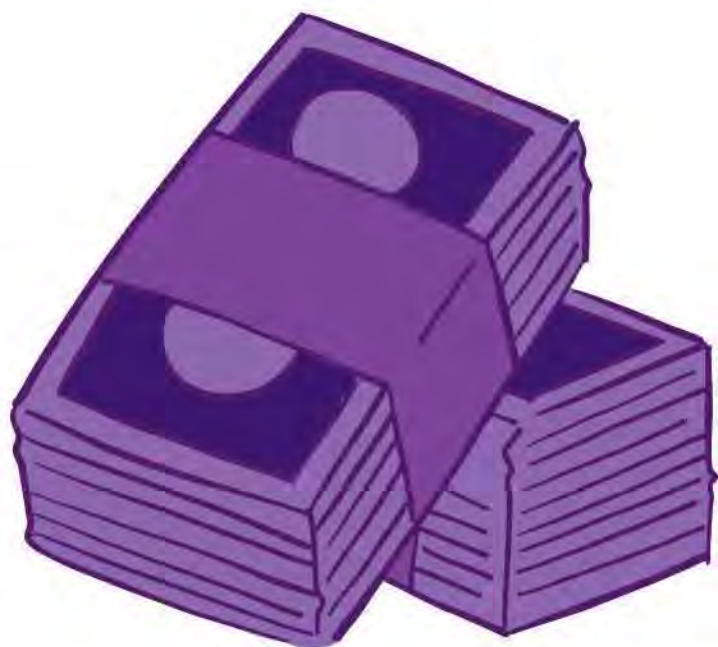
Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 89 tahun 2021 Pohon Kinerja disusun sebelum penyusunan dokumen perencanaan kerja. Usulan perbaikan pohon kinerja Kemendagri tahun 2023 dari masing masing unit kerja Eselon I di tunggu hingga minggu kedua bulan Juli tahun 2024.

Sosialisasi Produk dan Layanan PT Bank Tabungan Negara

Sosialisasi dilaksanakan pkl. 09.00 WIB di Sasana Bhakti Praja Kemendagri yang dihadiri oleh perwakilan masing masing komponen Kemendagri.

Program BTN Solusi menawarkan financial solution bagi Pegawai Kementerian Dalam Negeri. Program BTN Solusi merupakan program bundling produk dan layanan BTN yang termasuk namun tidak terbatas pada layanan kredit/pembayaran dengan suku bunga khusus. Hunian Pertama Khusus untuk PNS peserta Tapera dengan suku bunga 5% , Uang muka 0% dan Jangka Waktu s.d 30 tahun.

Berbagai produk Bank BTN yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh unit kerja di lingkup Kementerian Dalam Negeri yaitu KRING, KPR/ KPA Subsidi, KPR/ KPA Non Subsidi, KREDIT KPR BPJS, Investasi : Deposito / Tabungan, Credit Card dan Nonbanking.



Serba Serbi Juli

Rapat penyusunan arsitektur SPBE Domain Aplikasi SPBE

Rapat diselenggarakan Selasa, 5 Juli 2024 dengan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi di Ruang Rapat Pusdatin Lantai 10 Gedung B Kemendagri jam. 10.00 wib s.d selesai dalam hal ini dihadiri oleh seluruh komponen unit kerja lingkup Kemendagri.

Pembahasan dan penyusunan Domain Data dan informasi di lingkup Kemendagri serta penyusunan arsitektur SPBE domain aplikasi SPBE.

BSKDN belum mengirimkan dan melengkapi Domain Data dan informasi dan Domain Aplikasi SPBE yang diminta oleh Pusdatin untuk selanjutnya akan di input ke dalam system secara serentak dan direncanakan pada minggu ke 3 (Tiga) bulan Juli 2024 batas waktu data dikirim tanggal 12 Juli 2024.

Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE merupakan salah satu Indikator dalam penilaian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE RB).

Unit kerja yang belum melengkapi data yaitu:

- Domain Data dan informasi (Biro Administrasi Pimpinan, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum, Ditjen Bina Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Otonomi Daerah, BSKDN)
- Layanan Arsitektur SPBE (Biro Administrasi Pimpinan, BSKDN)



Rapat Pembahasan Terkait Catatan Hasil Penelitian Pagu Indikatif BSKDN TA.2025 sekaligus Pembahasan pelaksanaan RAKORNAS BSKDN dan Event IGA BSKDN TA.2024

Rapat Pembahasan terkait catatan hasil penelitian Pagu Indikatif BSKDN TA.2025 sekaligus Pembahasan pelaksanaan RAKORNAS BSKDN dan Event IGA BSKDN TA.2024

Rapat bertujuan untuk koordinasi guna mengetahui catatan penelitian biroren untuk dilakukan perbaikan dan memfinalkan konsep kegiatan Rakornas serta Event IGA.

Rapat Pembahasan terkait catatan hasil penelitian Pagu Indikatif BSKDN TA.2025 akan ditindaklanjuti masing-masing pusat dan bagian sesuai jadwal yg ditentukan.

Kegiatan Rakornas kolaborasi Event IGA berdasarkan diskusi bahwa IGA memiliki proses tahapan diatur dalam Permendagri, sehingga kecil kemungkinan di percepat mengingat kaitannya dengan masalah yang ada di beberapa daerah dalam kondisi teknologi informasi (sinyal) yang masih kurang memadai dan akan dibahas lebih mendalam lagi.



Serba Serbi Juli

Rapat Pembahasan Buka Blokir Automatic Adjustment BSKDN TA.2024

. Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl 09.30 s.d 13.00 WIB yang dipimpin oleh Perencanaan Ahli Muda pada Bagian Anggaran III Biroren dan dihadiri oleh Perwakilan Pusat dan Bagian BSKDN

Pembahasan dan penyusunan Domain Data dan informasi di lingkup Kemendagri serta penyusunan arsitektur SPBE domain aplikasi SPBE.

Usulan buka blokir automatic adjustment BSKDN TA.2024 sebesar Rp.3.927.697.000,- dengan rincian:

- Uji coba aplikasi IKKD (Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah) sebesar Rp.60.960.000,-
- Analisis Komparatif Kepala Daerah (Pejabat dan Defenitif) sebesar Rp.150.000.000,-
- FDA "Strategi Kebijakan Managemen Bencana Berbasis Partisipasi Publik" sebesar Rp.150.000.000,-
- Kajian Penguatan Sistem Anti Korupsi di Desa sebesar Rp.150.000.000,-

- Pengukuran IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) sebesar Rp.175.000.000,-
- Rakornas "Government Summit" - Strategi Policy Summit & Innovative Governmance Expo 2024 sebesar Rp.1.500.000.000,- Sarana dan prasarana Internal sebesar Rp.609.039.000,-
- *Peningkatan Kapasitas Pegawai BSKDN sebesar Rp.195.698.000,-
- Sosialisasi IKPA, Penilaian PIPK dan TLHP dari BPK RI dan Itjen Kemendagri sebesar Rp.182.000.000,-
- Penambahan tunkin 100% pegawai lingkup BSKDN selama 3 bulan (Okt, Nov, Des) sebesar Rp.555.001.000,-

Pembahasan selanjutnya akan direview oleh APIP Inspektorat Jenderal Kemendagri, diharapkan pusat dan bagian dapat hadir dalam pembahasan tersebut. Bagian perencanaan siap mengawal buka blokir automatic adjustment BSKDN TA.2024

Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2024

Rapat diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri melalui zoom meeting. Rapat dipimpin oleh Kepala Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi dihadiri oleh perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara dan komponen lingkup Kemendagri

Ada 3 (tiga) strategis pada perubahan kali ini yaitu Perlunya perencanaan dan strategi taktis serta keberanian eksekusi dengan lompatan target ,Stabilitas bangsa harus terjaga dengan baik dan peningkatan kualitas SDM serta dan Perlunya pembangunan yang keberlanjutan dan kesinambungan dengan Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola yang juga merujuk pada landasan transformasi yaitu; Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dan Ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Berdasarkan isu strategis tersebut, sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKPD dan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional , maka tema pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2025 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Pendukung.

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, ada empat prioritas pembangunan yang dilakukan, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas.

Serba Serbi Juli

Rapat lanjutan penelitian rancangan RKA-K/L berdasarkan Pagu Indikatif Kemendagri TA.2025 bersama Pusat lingkup BSKDN

Rapat dilaksanakan pada hari Senin 8 Juli 2024 di Ruang Rapat Bagian Perencanaan BSKDN yang mana dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB s.d 16.00 WIB dihadiri oleh masing" perwakilan Pusat Strategi Kebijakan BSKDN untuk membahas hasil catatan RKA-K/L PI TA.2025

- Rekomendasi strategi kebijakan, diseragamkan (Pelaksanaan Analisis Strategi Kebijakan, Desain Awal Analisis Strategis, Pengumpulan dan Kajian Data, Penyusunan Laporan Akhir, Seminar, dan Rekomendasi (Policy Brief, Policy Paper).
- Usul Kesepakatan Belanja Bahan (Spanduk 500.000 (max), Backk Drop 500.000 (max), ATK, Fotocopy, Penjilidan 1.500.000 (max), Seminar Kit 150.000 (max) Kegiatan Intern. Kemendagri, Seminar Kit 200.000 (max) Kegiatan Mengundang Pemda, Seminar Kit 250.000 s.d 300.000 (max) Kegiatan Mengundang Menteri (setingkat), Untuk semua akun/detail disesuaikan dengan SBM TA.2025

Catatan Umum (semua pusat lingkup BSKDN)

- Semua akun perjalanan dinas di RAB yang dalam bentuk paket untuk di tampilkan secara detail (breakdown);
- Untuk pencetakan backdrop, spanduk, tool kit disesuaikan dengan kesepakatan bersama (Point 2 diatas)
- Untuk tahapan penyusunan rekomendasi strategi kebijakan agar diseragamkan sesuai dengan ketentuan (jika ada) atau pada Pedoman BSKDN;
- Terkait penyusunan rekomendasi kebijakan pada RO/Kegiatan bisa dirinci per paketnya, serta bagaimana output yang ingin dicapai;
- - *Terkait penyusunan rekomendasi kebijakan pada RO/Kegiatan dirinci per paketnya, serta bagaimana output yang ingin dicapai;
- *Terkait pencantuman Pagu Standar Biaya agar disesuaikan dengan SBM TA. 2025.

Catatan Pusat 3 (catatan khusus)

- Terkait kajian Rekomendasi Strategi Kebijakan Lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Desa masih terdapat subkomponen yang perlu di cermati Kembali yaitu adanya Penyusunan draft Permendagri tentang kota bersih (akan dikonfirmasi lebih lanjut);
- Terhadap uang harian dinas dan paket meeting terdapat double pembiayaan pada 6142.ABL.005 Forum Diskusi Aktual/ Diskusi Publik/Lokakarya, dan diperjelas Kembali di RAB, memperjelas anggaran peserta maupun panitia, 6142.ABL.005 terhadap penyusunan policy brief transport peserta luar apa itu sudah sesuai dengan peruntukan atau belum;
- Upgrade dan Maintenance Aplikasi IPKD, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Biaya penyewaan Server Aplikasi SIKRAMAT untuk dikonfirmasi terkait clearance dikarenakan penyesuaian dengan ketentuan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi);

Catatan Pusat 4 (catatan khusus)

- Terkait Aplikasi pada KRO 1283.UBA.002 perlu di tinjau Kembali karena dengan ketentuan TIK (clearance), dimana ini pada kegiatan PN (Prioritas Nasional) maka menggunakan kode UAB, yang terakomodir di aplikasi KRISNA;
- Untuk Pelaksanaan Tahapan Presentasi Kepala Daerah dalam rangka persiapan IGA, Event Organizer (EO) Tahapan Presentasi Kepala Daerah perlu dicermati besaran anggarannya;

Terdapat Masukan masing-masing Pusat lingkup BSKDN

- Penyusunan terkait SK team Reviewer awal tahun (Pusat 1);
- Terkait Pedoman BSKDN dalam menyusun Rekomendasi Kebijakan Sangat di perlukan untuk menjadi dasar atau acuan dalam tahapan penyusunan Rekomendasi Kebijakan.

Berdasarkan Hasil Review Penelitian PI catatan diatas agar disesuaikan dengan catatan yang tertera ditunggu deadline dari Bagian Perencanaan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 16.00 WIB khusus untuk (PUSTRAJAK BSKDN)

Serba Serbi Juli

Rapat Pembahasan terkait Catatan Hasil Penelitian RKA-K/L Pagu Indikatif BSKDN TA.2025

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juli 2024 di Ruang Rapat Bagian Perencanaan BSKDN yang mana dilaksanakan pada pukul 12.00wib s.d 17.00wib dimana dihadiri oleh masing" perwakilan SEKRETARIAT BSKDN untuk pembahasan hasil catatan RKA-K/L PI TA.2025.

Usul Kesepakatan Belanja Bahan (Spanduk 500.000 (max), Backk Drop 500.000 (max), ATK, Fotocopy, Penjilidan 1.500.000 (max), Seminar Kit 150.000 (max) Kegiatan Intern. Kemendagri, Seminar Kit 200.000 (max) Kegiatan Mengundang Pemda, Seminar Kit 250.000 s.d 300.000 (max) Kegiatan Mengundang Menteri (setingkat), Untuk semua akun/detail disesuaikan dengan SBM TA.2025.

Catatan Umum (Sekretariat)

- Semua akun perjalanan dinas di RAB yang dalam bentuk paket untuk di tampilkan secara detail (breakdown)
- *Untuk pencetakan backdrop, spanduk, tool kit disesuaikan dengan kesepakatan bersama (Point 2 diatas)

- Terkait penyusunan rekomendasi kebijakan pada RO/Kegiatan bisa dirinci per paketnya, serta bagaimana output yang ingin dicapai
- Terkait penyusunan rekomendasi kebijakan pada RO/Kegiatan dirinci per paketnya, serta bagaimana output yang ingin dicapai
- Terkait pencantuman Pagu Standar Biaya agar disesuaikan dengan SBM (Standar Biaya Masukan) TA. 2025

Catatan Khusus pada Penelitian

1. Bagian Keuangan

- Catatan: Jumlah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 1 orang yang diterima di tahun 2024 di dalam usulan RKA-K/L BSKDN 2025, belum di anggarkan sebesar Rp. 42.809.297,-
- sesuai dengan perhitungan bagian Keuangan akan ada perubahan kaitan dengan belanja pegawai berhubungan dengan kenaikan tunkin Kemendagri 100% menjadi Rp.29.041.953.000,-.

2. Bagian SDMO

- Catatan: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, berkaitan dengan penyewaan Server Aplikasi SIKRAMAT(Rp.12.000.000,-) untuk dikonfirmasi terkait clearance dikarenakan penyesuaian dengan ketentuan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)
- Tindaklanjut: Bagian SDMO akan koordinasi terkait clearance ke pusdatin yang akan di komunikasikan bersama dengan Bagren

3. Bagian Umum

- Berdasarkan keterangan dari Bagian umum terkait Sewa Kendaraan Operasional Eselon II bisa dimasukkan dalam RKBMN 2025, dengan menerbitkan RKBMN,
- RKBMN di 2025 station wagon (mini bus) ditolak oleh APIP namun perlu dikonfirmasi ulang, karena telah tercantum dalam RKBMN 2025; (info dari APIP jika umur kendaraan under 7 tahun belum bisa di down grade /operasional)
- Terhadap pemeliharaan peralatan dan mesin, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Es. II,

- Pengadaan Kendaraan bermotor agar disampaikan SK penghapusan dan pencantuman dalam RKBMN 2025; (Penghapusan telah dilakukan sebanyak 3 unit dan telah diterbitkan SK PENGHAPUSAN hanya saja belum dilakukan pengusulan/ Revisi RKBMN 2025)
- Terhadap pemeliharaan gedung dan bangunan terdapat pemeliharaan halaman gedung kantor seluas 863 m2 sebesar Rp9.493.000,- (belum tercatat pada RKBMN TA. 2025) dan akan ditindaklanjuti oleh bagian umum koordinasi ke BKA
- Terhadap item belanja pengadaan pakaian agar disesuaikan dengan jumlah eksisting dan rencana penambahan pegawai

4. Bagian Perencanaan

Catatan: Untuk tahapan penyusunan rekomendasi strategi kebijakan agar diseragamkan sesuai dengan ketentuan atau pada Pedoman BSKDN

Tindaklanjut: Bagian Perencanaan telah menyusun draf pedoman BSKDN akan mengawal prosesnya hingga akhirnya di finalkan dan dapat disebarakan untuk menjadi dasar/pedoman penyusunan rekomendasi kebijakan

Serba Serbi Juli

Rapat Persiapan Rakornas dan IGA

Rapat dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB di Ruang Vidcon, dipimpin oleh Bapak Kepala BSKDN, dihadiri oleh Bapak Sekretaris BSKDN, perwakilan dari Pusat Strategi Kebijakan IV dan Bagian Perencanaan

Pada rapat dilakukan pembahasan terkait sinkronisasi kegiatan Presentasi Kepala Daerah (IGA) dan Rakornas BSKDN.

Kegiatan Rakornas diusulkan untuk dilakukan pada tanggal 23-25 September 2024. Rundown acara untuk dilakukan penyesuaian sesuai arahan Bapak Kepala Badan. Persiapan dokumen dan bahan pendukung Rakornas diharapkan dapat diselesaikan lebih awal.

]Bagian Perencanaan akan menindaklanjuti hasil rapat sesuai dengan catatan dari Bapak Kepala Badan.



Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi serta Penataan Perundang-Undangan

Rapat dilaksanakan via zoom meeting, dihadiri oleh perwakilan dari Biro hukum, Ditjen Adwil PUU, Biro Umum, Polpum, Bangda, Dukcapil, Keuda, Otda PUU

Tujuan rapat ini untuk mempersiapkan data data apa yang perlu di bawa oleh komponen di rapat simplifikasi dan deregulasi peraturan menteri dalam negeri tahun 2024 yang akan di laksanakan di Luminor Hotel bogor

Semua mekanisme peraturan 5 tahun kedepan dan kebelakang harus di tindaklanjuti dalam kerangka regulasi hukum dan Melakukan evaluasi kerangka regulasi 2020-2024 terkait peraturan perundang undangan. Total ada RPUU belum di tetapkan 3 RUU, 7 RPP, 2 RPRES dan 45 RPMDM

Bagian Perencanaan siap mendukung kesuksesan kegiatan simplifikasi dan deregulasi peraturan menteri dalam negeri tahun 2024. Demikian dilaporkan untuk mohon arahan lebih lanjut.



Serba Serbi Juli

Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang PKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Rapat dilaksanakan via zoom meeting, dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Bangda, Bappenas, Dinas Kominfo, BKD Kepulauan Riau, Biro Hukum, Biro Perencanaan

RKPD Provinsi kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja, pendanaannya dan prakiraan maju. Adapun pada tahun 2024 kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengusung tema “Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas, sasaran Pembangunan, serta kesinambungan rencana program kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Pelaksanaan evaluasi RKPD 2024 ini dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Tahun 2024 dapat diketahui pencapaiannya dalam rangka mewujudkan visi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau. Evaluasi RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilaksanakan setiap triwulan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil evaluasi RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun berikutnya

Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

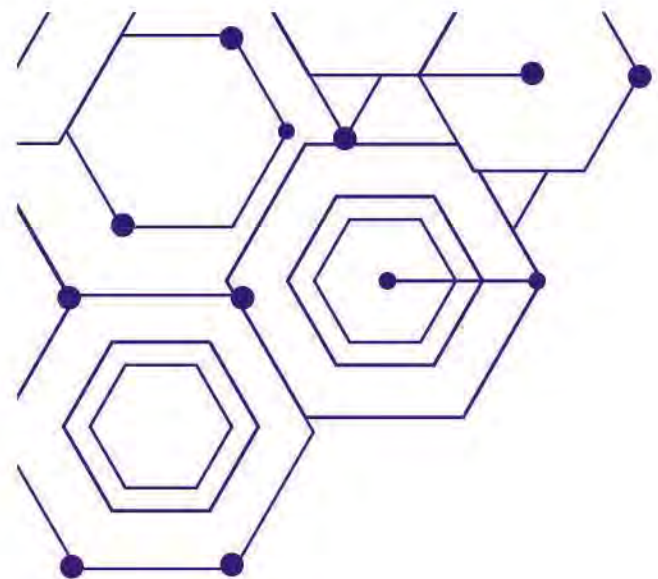
Rapat dilaksanakan via zoom meeting, dihadiri oleh perwakilan dari Kemenkumham Dirjen PUU, Pusdatin Kemendagri, Kominfo, BRIN, Setneg, dan BPSDM.

Dalam rapat tersebut dibahas beberapa pasal sebagai berikut:

- Pasal 7 ayat (4) perlu disinkronisasi dengan pasal 25 UU mengenai kewajiban kliring dilakukan oleh pemerintah pusat.
- Pasal 12 dan Pasal 13 terkait penggunaan hasil invensi belum diatur sedangkan dalam UU yang merupakan kewajiban (Pasal 36 UU) Pasal 70, pasal mengenai sanksi dapat disederhanakan.
- Pasal 77, konfirmasi pemrakarsa PUU mana yang diacu dalam pasal ini? Dan apakah perlu RPP ini mengatur mengenai bentuk bentuk pengawasan penyelenggaraan iptek di pusat dan di daerah.
- Pasal 81, rumusan pengaturan pertanggungjawaban masyarakat ini berbeda dengan pasal 87 UU, disinkronkan.

- Pengaturan pengelolaan mengenai invensi dan inovasi hanya diatur dalam Pasal 15 (3), perlu dielaborasi dengan Pasal 73 ayat (3) UU.

Usulan dari KLHK. Pasal 10 PP belum eksplisit mengakomodir isu konflik kepentingan dalam publikasi dan diseminasi Hasil IPTEK. Diusulkan isu Surprise Policy dapat diakomodir dalam regulasi terkait dengan substansi. Sedangkan catatan dari Kemenkumham dasar hukum perlu dilihat juga UU 6 Tahun 2023. BAB pengawasan belum diatur juga lebih lanjut.



Serba Serbi Juli

Rapat Pembahasan Pelaksanaan Perjanjian Internasional Di Lingkup Kementerian Dalam Negeri

Biro fasilitasi kerja sama sekretariat jenderal kemendagri telah mengidentifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan fungsi Kementerian Dalam Negeri, seperti administrasi publik, otonomi daerah, dan perlindungan masyarakat.

Setiap perjanjian telah dianalisis untuk memahami implikasinya terhadap tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri serta kesesuaian dengan hukum nasional.

Biro fasker mengumpulkan data perjanjian internasional di komponen di lingkungan kementerian dalam negeri sebagai laporan kepada kementerian luar negeri. saat ini BSKDN belum menjalin perjanjian internasional dengan lembaga internasional



Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Rapat dilaksanakan via zoom meeting, dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi Papua Pegunungan, Bangda, Bappenas, Dinas Kesehatan, BKD Papua Pegunungan, Biro Hukum, Biro Perencanaan

Tema Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 adalah “Mengoptimalkan Sumber Pertumbuhan Ekonomi, Pemantapan Pelayanan Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mewujudkan SDM Papua Pegunungan Yang Unggul dan Mandiri” dengan prioritas Pembangunan 1). Revolusi mental dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; 2). Penguatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai potensi unggulan dan kearifan local; 3). Peningkatan infrastruktur dasar dan tata kelola pemerintahan yang baik; 4). Meningkatkan Rasa Aman, Nyaman Tenteram Dan Damai; dan 5) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pengembangan Wilayah, Konektivitas Serta Pengelolaan Potensi Daerah Ramah Lingkungan.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 meliputi: 1) Persiapan yaitu penyampaian surat edaran Gubernur Papua Pegunungan tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan, serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025, dan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2025; 2) Konsultasi publik sekaligus pembukaan masa musrenbang; 3) Forum perangkat daerah; 4) Musrenbang Kabupaten dan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah (rakortekrenbangda); 5) Musrenbang provinsi; 6) Fasilitasi RKPD Tahun 2025 oleh Kemendagri; 7) Pembahasan rancangan akhir RKPD ; dan 8) Penetapan RKPD Tahun 2025.



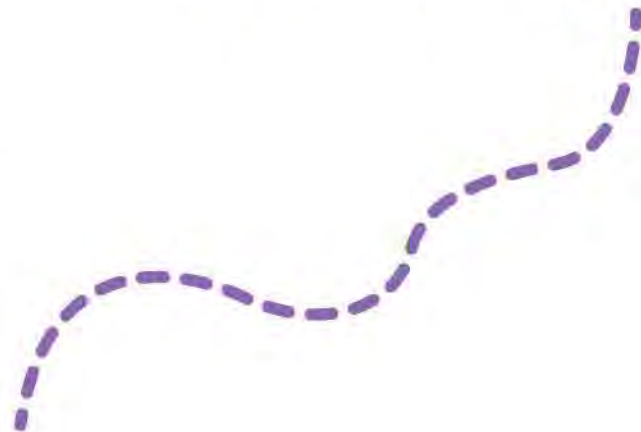
Serba Serbi Juli

Audiensi Evaluasi AKIP TA.2024 Bersama Tim Itjen Kemendagri

Rapat dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB di Ruang Vidcon, dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan, dihadiri oleh Tim Itjen Evaluasi AKIP BSKDN, Kepala Bagian Perencanaan, serta perwakilan dari Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan.

2. Pada rapat dilakukan pembahasan terkait pelaksanaan evaluasi AKIP BSKDN yang akan dilaksanakan pada tanggal 12-18 Juli 2024.

Tim Itjen menyampaikan kisi-kisi dalam pemenuhan evidence AKIP. Bagian Perencanaan akan menindaklanjuti pengumpulan evidence dan akan diupload melalui aplikasi SIRIKA



Rapat Evaluasi Kelembagaan BSKDN

Rapat dilaksanakan pukul 14.00 WIB yang dipimpin oleh Bapak Sekban BSKDN. Peraturan perundang-undangan pedoman evaluasi kelembagaan PermenPAN RB No 20 Tahun 2018

- Evaluasi wajib paling singkat 3 tahun sekali
- Bertahap mulai dari persiapan sampai pelaporan
- Verifikasi hasil evaluasi diverifikasi KemenPAN RB

Saran dari Sekban:

- Penyusunan lembaga berdasarkan PermenPAN RB No 20 Tahun 2018 (kerangka normatif) dan Kerangka teori berdasarkan teori Henry Mintzberg (1979), Minta saran masukan dari semua Unit kerja (pusat dan bagian) dan Buat tim kecil penyusun

Saran Kasubag TU Pusat I

- membuat lembaga setingkat eselon I ditjen inovasi daerah dan strategi kebijakan dalam negeri

Saran dari Kabag SDMO:

- BSKDN masih relatif baru, mempertimbangkan SDM dan anggaran untuk optimalisasi BSKDN , Perubahan hanya di nomenklatur Pusat-pusat menjadi Pusat Analisis Kebijakan , Akan terjadi stagnasi di awal awal jika ada perubahan drastis , mempertanyakan Usulan Bagian perencanaan untuk menjadi lembaga struktural atau lembaga fungsional dan Penguatan fungsi BSKDN ke lembaga daerah

Saran Plh Kapus II:

- BSKDN masih relatif baru BSKDN ada di hampir semua Kementerian
- Mengusulkan kenaikan Kelas Jabatan Kasubag RT Bagian Umum
- Mengusulkan ada Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Serba Serbi Juli

Rapat pelaksanaan survei pendahuluan dalam rangka pemeriksaan ketaatan tahun 2024

Rapat dipimpin oleh Supervisor tim APIP (Ibu Tiolan Hutagalung). Rapat di hadiri oleh tim APIP Itjen Kemendagri, Sekban, Kabag Keuangan, para Kasubag TU dan staf pengelola keuangan/anggaran di lingkungan BSKDN Kemendagri.

Dalam rapat terdapat Pembahasan persamaan persepsi 29 data yg dibutuhkan. Data diunggah ke link <https://bit.ly/KetaatanBSKDNTahun2024>

Dari 29 data Bagian Perencanaan akan mengunggah 3 bahan:

- SOP/Pedoman pelaksanaan kegiatan/Petunjuk Internal
- -Perjanjian Kinerja eselon I, II, dan III
- Risk Register tahun 2024.

Data-data lain yang dibutuhkan dilengkapi oleh bagian keuangan, bagian umum dan bagian SDMO

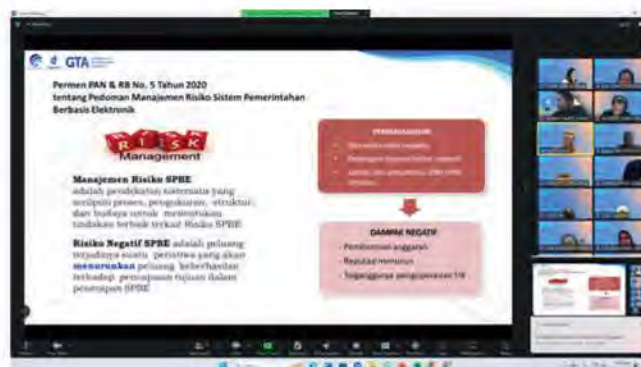


Pelatihan GTA Manajemen Resiko SPBE

Pelatihan GTA Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan pkl.08.00 WIB s.d 12.00 WIB melalui aplikasi zoom meeting yang diawali dengan pembukaan oleh Kominfo dan dilanjutkan pelatihan oleh Bpk Herry Abdul Aziz.

Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman termasuk aktivitas mengidentifikasi, memetakan, mengukur, dan mengembangkan solusi penanganan risiko guna menghindari risiko kerugian pada organisasi.

Setelah beberapa topik pelatihan, lalu kami dibagi grup menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok mengisi data table manajemen risiko.



Serba Serbi Juli

Rapat Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Aula BSKDN pkl. 09.00 WIB s.d 12.30 WIB di pimpin oleh Kepala Pusat Pemkeuda, Narasumber Dr. Sumule Tumbo, SE, MM, dan dihadiri oleh Para Tamu Undangan, Perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN

IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu

Adapun beberapa hal dalam IPKD yaitu

- Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.
- Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah

- Melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota
- Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki IPKD yang terbaik

Bagian Perencanaan siap mendukung kegiatan penginputan dan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2024



Rapat Persiapan Rakornas BSKDN TA.2024

Rapat dipimpin oleh Kepala BSKDN dan dihadiri oleh Sekban BSKDN, Plh Kapus 1 BSKDN, Kapus 4 BSKDN, Analis Kebijakan Madya Pusat III, Kabagren, Kabag SDMO, dan perwakilan Tim Trans Media. Rapat dimulai dengan perkenalan kelembagaan oleh Bapak Kepala BSKDN, yang menekankan perlunya akuntabilitas dan transparansi serta pembagian kewajiban antara BSKDN dan Trans Media.

Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tanggal 9 s.d 11 Oktober 2024 bertempat di JCC. Trans Media memiliki pengalaman mengelola event Kemenhub "Hub Space" di JCC yang akan menjadi benchmarking dengan peningkatan level pelaksanaan mengingat partisipan yang lebih banyak.

Tim Trans Media memaparkan video ilustrasi pelaksanaan kegiatan yang menampilkan panggung utama dan pameran expo. Expo ini akan berisikan promosi barang dan jasa dari berbagai pelaku usaha, termasuk korporasi, BUMD, dan UMKM.

Kegiatan juga akan mencakup awarding untuk pemda dan swasta inovatif. Pengklasteran awarding harus selaras dengan data dari Pusat Inovasi dalam persiapan pelaksanaan IGA. Pelaksanaan IGA dan penyerahan award IPKD oleh Pusat 3 diharapkan dapat diintegrasikan dalam Rakornas, dengan Pusat 4 melakukan penyesuaian terkait rangkaian kegiatan.

Selanjutnya diagendakan penyampaian laporan kepada Bapak Menteri pada minggu ini sehingga bahan paparan perlu disiapkan hari Selasa 16 Juli 2024. Bagian Perencanaan siap mengawal pematangan konsep Rakornas dan melengkapi kebutuhan dokumen administrasi dengan berkoordinasi secara intensif bersama Tim Trans Media.



Serba Serbi Juli

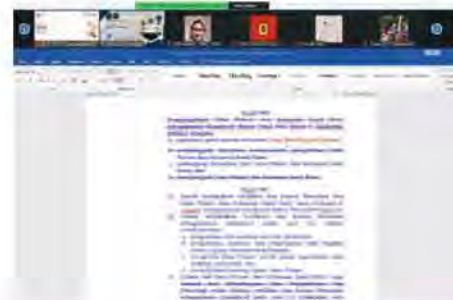
Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Rapat dilaksanakan secara virtual dan dipimpin oleh pejabat Ditjen PP Kemenkumham dan dihadiri oleh BRIN sebagai inisiator serta perwakilan dari kementerian/lembaga, di antaranya Kemensetneg, KemenPPN/Bappenas, Kemenkes, dan Kemenperin

Rancangan PP diinisiasi oleh BRIN dalam rangka menetapkan pengaturan Sistem Pengelolaan IPTEK di Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam Rancangan PP dimaksud meliputi: sistem informasi IPTEK termasuk terkait dengan tata kelola penggunaan data dan berbagi data

Dilaksanakan pembahasan seputar Wajib Serah dan Wajib Simpan atas seluruh Data Primer dan keluaran hasil Riset yang dilakukan oleh: Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (peneliti, akademisi, analis kebijakan); dan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Verifikasi dan kurasi metadata dari Data Primer dan Keluaran Hasil Riset dikelola oleh BRIN, hal ini didiskusikan secara mendalam untuk membahas urgensi dari dilaksanakannya verifikasi dan kurasi metadata, adapun dalam melakukan verifikasi dan kurasi Metadata BRIN melaksanakan: pengolahan dan analisis seluruh Metadata; pengolahan, analisis, dan pengemasan teks lengkap untuk tujuan diseminasi informasi; mengelola Data Primer untuk dapat digunakan atau diakses terkendali; dan menerbitkan katalog digital Data Primer. Seluruh pengaturan ini didiskusikan apakah perlu ditetapkan Rancangan PP dimaksud atau dijabarkan dalam Peraturan BRIN mengingat isi pengaturannya yang sudah tergolong teknis



Rapat Persiapan Rakornas BSKDN TA.2024

Rapat dipimpin oleh Kepala BSKDN dan dihadiri oleh Sekban BSKDN, Plh Kapus 1 BSKDN, Kapus 4 BSKDN, Analis Kebijakan Madya Pusat III, Kabagren, Kabag SDMO, dan perwakilan Tim Trans Media. Rapat dimulai dengan perkenalan kelembagaan oleh Bapak Kepala BSKDN, yang menekankan perlunya akuntabilitas dan transparansi serta pembagian kewajiban antara BSKDN dan Trans Media.

Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tanggal 9 s.d 11 Oktober 2024 bertempat di JCC. Trans Media memiliki pengalaman mengelola event Kemenhub "Hub Space" di JCC yang akan menjadi benchmarking dengan peningkatan level pelaksanaan mengingat partisipan yang lebih banyak.

Tim Trans Media memaparkan video ilustrasi pelaksanaan kegiatan yang menampilkan panggung utama dan pameran expo. Expo ini akan berisikan promosi barang dan jasa dari berbagai pelaku usaha, termasuk korporasi, BUMD, dan UMKM.

Kegiatan juga akan mencakup awarding untuk pemda dan swasta inovatif. Pengklasteran awarding harus selaras dengan data dari Pusat Inovasi dalam persiapan pelaksanaan IGA. Pelaksanaan IGA dan penyerahan award IPKD oleh Pusat 3 diharapkan dapat diintegrasikan dalam Rakornas, dengan Pusat 4 melakukan penyesuaian terkait rangkaian kegiatan.

Selanjutnya diagendakan penyampaian laporan kepada Bapak Menteri pada minggu ini sehingga bahan paparan perlu disiapkan hari Selasa 16 Juli 2024. Bagian Perencanaan siap mengawal pematangan konsep Rakornas dan melengkapi kebutuhan dokumen administrasi dengan berkoordinasi secara intensif bersama Tim Trans Media.



Serba Serbi Juli

Pelatihan GTA Manajemen Resiko SPBE

Pelatihan GTA Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan pkl.08.00 WIB s.d 12.00 WIB melalui aplikasi zoom meeting dipimpin oleh Bpk Herry Abdul Aziz dihadiri peserta pelatihan

Identifikasi sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE, identifikasi tersebut dilakukan untuk mencari tahu informasi seperti sasaran UPR SPBE, Sasaran SPBE, dan Indikator Kinerja SPBE.

Setelah beberapa topik pelatihan, lalu kami mengerjakan table untuk diisi seperti sasaran, struktur sasaran, pemangku kepentingan, perUUan, dan kategori resiko

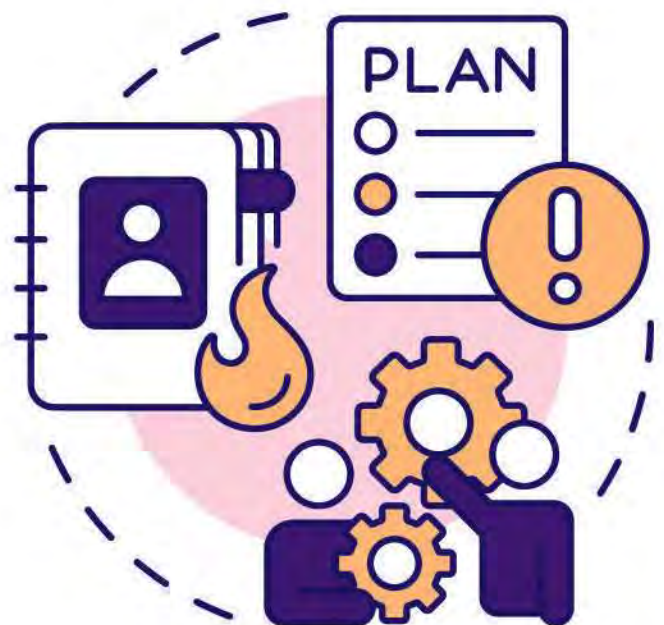


FGD Pendalaman Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kemendagri Tahun 2025 - 2029

Rapat dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Biro Perencanaan Setjen Kemendagri, dipimpin oleh Kabag Program Biroren, dihadiri oleh Sekretaris BSKDN dan Kabagren BSKDN, serta Kabagren dari Ditjen Bina Keuda, Ditjen Adwil, dan Ditjen Polpum.

Pada rapat dilakukan pembahasan terkait penyusunan Renstra Kemendagri TA 2025-2029. Timeline tahapan penyusunan renstra saat ini berada di posisi Rancangan Awal yang dilaksanakan hingga September 2024.

BSKDN akan menindaklanjuti usulan isu strategis yang disampaikan UKE I Kemendagri sebagai bahan masukan penyusunan rekomendasi kebijakan. Pemetaan topik rekomendasi kebijakan perlu dilakukan untuk menentukan prioritas kegiatan.



Serba Serbi Juli

Rapat Simplifikasi dan Deregulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024

Rapat dilaksanakan di Hotel Luminor Padjajaran, Bogor, dihadiri oleh perwakilan seluruh komponen di Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Rapat membahas mengenai simplifikasi dan deregulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Rapat ini juga membahas mengenai Program Penyusunan Peraturan Dalam Negeri di tahun 2025-2029.

Tahun 2024 BSKDN tercatat memiliki 3 (tiga) Rancangan Permendagri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-64 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, dengan progres garis besar sebagai berikut:

- Rancangan Permendagri tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sedang -

sedang dilaksanakan penyesuaian pengaturan penganggaran dengan pengaturan yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Keuangan untuk memastikan keselarasan peraturan;

- Rancangan Permendagri tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, sedang dilaksanakan pembahasan penetapan bobot penilaian yang menjadi bagian dari variabel pengukuran indeks;
- Rancangan Permendagri tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sedang dilaksanakan penyesuaian pengaturan terkait teknis pelaksanaan analisis kebijakan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan LAN RI;

Pelatihan GTA Manajemen Resiko SPBE

Pelatihan GTA Manajemen Resiko SPBE dilaksanakan pkl.08.00 WIB s.d 12.00 WIB melalui aplikasi zoom meeting dipimpin oleh Bpk Herry Abdul Aziz dihadiri peserta pelatihan.

Identifikasi sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE, identifikasi tersebut dilakukan untuk mencari tahu informasi seperti sasaran UPR SPBE, Sasaran SPBE, dan Indikator Kinerja SPBE.

Setelah beberapa topik pelatihan, lalu kami menginput beberapa Matriks/Tabel sebagai berikut:

- Tabel Kategori Risiko SPBE: Konteks dapat dipandang dalam dua komponen, yaitu: sikap risiko (risk attitude) dan keinginan risiko (risk appetite)
- Tabel Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE: ukuran standar seberapa besar kemungkinan atau frekuensi akan terjadi dan seberapa besar dampak atau konsekuensi yang mungkin akan dihadapi dari risiko yang mungkin terjadi.

- Tabel Penilaian Risiko: penilaian suatu risiko dgn cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan



Serba Serbi Juli

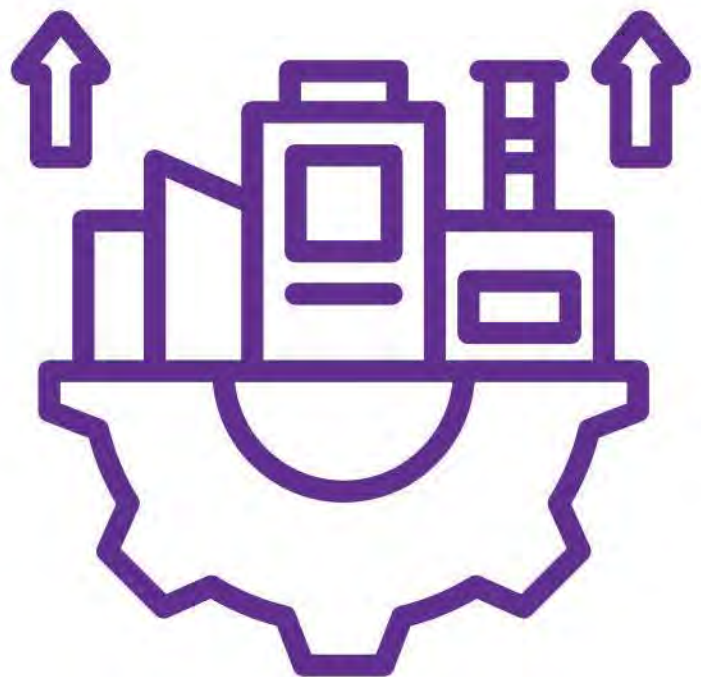
Rapat Pemantauan Triwulan II RKP Tahun 2024 Lingkup Pembangunan Daerah

Rapat diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Bagian Monev, Kemendagri melalui zoom meeting. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Monev Biro Perencanaan dihadiri oleh perwakilan komponen lingkup Kemendagri dan Bappenas.

Semua komponen Kemendagri akan mengkofimasi ulang terhadap Base line Tahun 2019 dan akan disampaikan kembali ke Bappenas melalui Biro Perencanaan.

Rincian Ouput BSKDN Kemendagri :

- Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L, capaian 25 daerah dari target 34 daerah
- Penilaian Inovasi terpadu lintas K/L berbasis Indeks Inovasi Daerah, capaian 0 dari 542 daerah
- Berdasarkan isu strategis tersebut, sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKP dan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional, terdapat Kendala:
- Terdapat pagu blokir sehingga menyesuaikan kembali jadwal dan rencana kegiatan awal
- Kemampuan SDM dan infrastruktur daerah dalam melakukan input inovasi daerah di tertentu masih rendah.



Rapat terkait Pengumpulan Data dan Informasi

Rapat dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB di Ruang Aula BSKDN, dipimpin oleh Sekretaris BSKDN, dihadiri oleh perwakilan UKE II dan Bagian lingkup BSKDN.

Pada rapat dilakukan pembahasan terkait pengumpulan data dan informasi dengan topik Prioritas Nasional (PN) 6 "Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" oleh BPK RI.

Bapak Sekretaris BSKDN memberikan arahan kepada seluruh Pusat Strategi Kebijakan lingkup BSKDN untuk mereviu data dari tahun 2020-2024 yang dapat dikaitkan dengan PN 6.

Bagian Perencanaan akan menindaklanjuti dengan menerima penyampaian data dari seluruh Pusat Strategi Kebijakan untuk kompilasi data pada hari Jumat, 19 Juli 2024.



Serba Serbi Juli

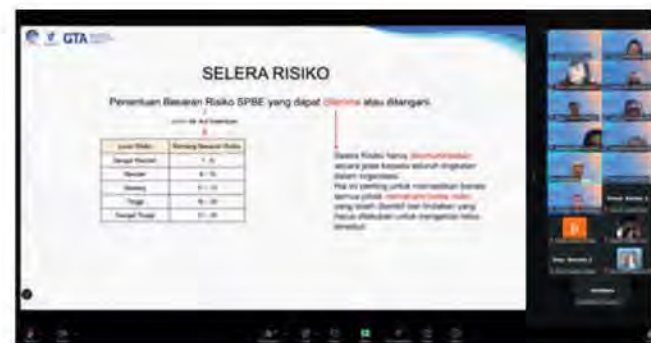
Pelatihan GTA Manajemen Resiko SPBE

Pelatihan GTA Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan pkl.08.00 WIB s.d 12.00 WIB melalui aplikasi zoom meeting dipimpin oleh Bpk Herry Abdul Aziz dihadiri peserta pelatihan serta perwakilan dari Kominfo.

Penanganan risiko SPBE merupakan proses untuk memodifikasi penyebab risiko SPBE. Penanganan risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan risiko SPBE, informasi yang dicantumkan pada penanganan risiko meliputi Prioritas Risiko, Rencana Penanganan Risiko, Risiko Residual.

Selera risiko merupakan penentuan besaran risiko SPBE yang dapat diterima atau ditangani. Selera risiko harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan dalam organisasi.

Setelah beberapa pelatihan, setiap kelompok melaksanakan tugas dengan mengisi data pada matriks sesuai dengan topiknya masing-masing, adapun pengisinya meliputi penilaian risiko dan rencana penanganan risiko.



Rapat Usulan Perubahan Kerangka Kelembagaan BSKDN

Rapat dilaksanakan pukul 10.00 WIB dipimpin Sekban dan dihadiri oleh para Analis Madya, para Kasubab TU dan perwakilan Pusat-pusat dan bagian-bagian.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain :

- Merubah nomenklatur pusat-pusat dari Pusat Strategi Kebijakan menjadi Pusat Analisis Kebijakan
- Kasubag TU pada Pusat-pusat menjadi Bidang Administrasi dan Dukungan Teknis (setingkat eselon III)
- Penambahan jabatan pengawas (eselon IV) di Bagian Perencanaan, Subbag Perundang-undangan
- Pasal 388 UU No. 23 Tahun 2014 ayat (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.

Kesimpulan dan arahan Sekban:

- Penyusunan lembaga BSKDN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Jika ada usulan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi usulan alternatif
- Segera dibentuk tim kecil Penyusunan lembaga BSKDN
- Masukan dari Pusat-pusat dan bagian-bagian harus disertai dengan argumen yang kuat
- Penguatan fungsi di Pusat-pusat dan bagian-bagian
- Tugas fungsi Humas, protokol dan kerjasama belum ada di BSKDN



Serba Serbi Juli

FGD Pendalaman Isu Strategi dan Arah Kebijakan Kemendagri Tahun 2025 - 2029

Rapat dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Biro Perencanaan Setjen Kemendagri, dipimpin oleh Kabag Program Biroren, dihadiri oleh Kapus Strategi Kebijakan IV dan perwakilan dari Ditjen Otda, Ditjen Dukcapil, dan BSKDN.

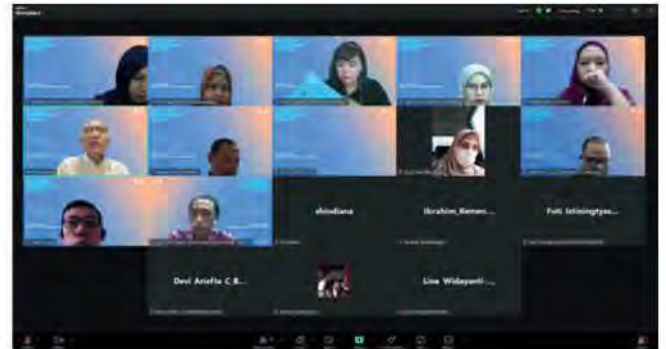
Pada rapat dilakukan pembahasan terkait penyampaian isu-isu strategis dari Ditjen Otda dan Ditjen Dukcapil sebagai masukan dalam rancangan Renstra Kemendagri 2025-2029.

BSKDN dijadwalkan untuk menyampaikan paparan pada hari Selasa 23 Juli 2024. Bagian Perencanaan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan seluruh UKE II lingkup BSKDN dalam menjangkau data isu-isu strategis yang akan dipaparkan pada rapat poin 3.



Pelatihan GTA Manajemen Resiko SPBE

Pelatihan GTA Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan pkl.08.00 WIB s.d 12.00 WIB melalui aplikasi zoom meeting dipimpin oleh Bpk Herry Abdul Aziz dihadiri peserta pelatihan serta perwakilan dari Kominfo.



Dalam melakukan penanganan terhadap risiko residual, dilakukan pengulangan proses penilaian risiko sampai dengan risiko residual tersebut berada di bawah selera risiko SPBE

Risiko residul biasanya muncul dari penyebab yang tidak diketahui atau merupakan faktor yang sulit atau tidak mungkin dihilangkan atau dimitigasi. Setelah beberapa pelatihan, setiap kelompok melaksanakan tugas dengan mengisi data pada matriks sesuai dengan topiknya masing-masing, adapun pengisinya meliputi penilaian risiko, rencana penanganan, dan residu.



Serba Serbi Juli

Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari, BNPP Bappeda Papua Barat Daya, BPSDM, Bappenas, Biro Perencanaan Ditjen Bangda, Kementerian ATR/BPN, ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Wilayah, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Provinsi Papua Barat Daya

RKPD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 merupakan perencanaan tahun pertama di dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Tema pembangunan tahun 2025, yaitu “Pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses pelayanan publik dasar guna meningkatkan pemerataan pembangunan”. Posisi RKPD Tahun 2025 sangat strategis untuk menjabarkan RPD dan menjaga efektivitas pembangunan di masa transisi.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan RKP 2025 yaitu pertama, Sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. Kedua, infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah. Ketiga ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Bagian Perencanaan siap mendukung kesuksesan kegiatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang PKPD demi kesuksesan dan kelancaran demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terpadu di seluruh provinsi.

Rapat Revisi Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Rapat dipimpin oleh Bapak Sekban BSKDN, Kapus Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemdagri, dan dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum, Tenaga Ahli USAID ERAT, serta pejabat lingkup Pusat-pusat dan Bagian Perencanaan BSKDN

Pusat 4 mendiskusikan progres fasilitasi penerbitan SK Tim Penyusun Rancangan Perubahan Permendagri 104 Tahun 2018. Disampaikan bahwa penundaan penerbitan SK berkaitan dengan pencermatan bahwa urgensi perubahan regulasi sebaiknya terlebih dahulu mengubah pengaturan PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi, sebab Permendagri 104 Tahun 2018 merupakan peraturan turunan dari PP tersebut. Namun, secara asas hierarki, PP 38 Tahun 2017 juga merupakan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu juga mencermati rencana perubahan UU Nomor 23 Tahun 2024 yang saat ini sedang berproses.

Sesuai arahan pimpinan, Bagian Perencanaan siap melaksanakan fasilitasi legal drafting pada SK Tim Penyusun Perubahan Permendagri 104 Tahun 2018 dan akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut bersama Biro Hukum untuk pembahasan kebutuhan perubahan PP 38 Tahun 2017.



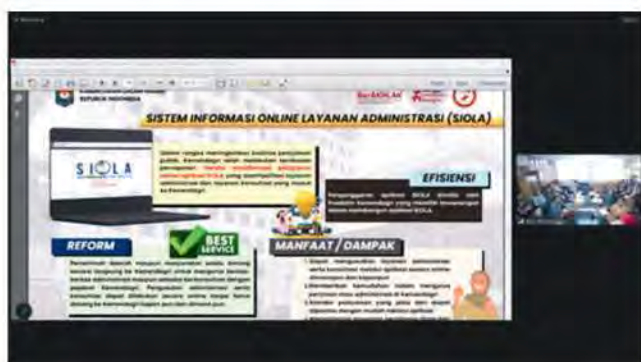
Serba Serbi Juli

Rapat Konsolidasi Pemenuhan Data Dukung Penyesuaian Tunjangan Kinerja Kemendagri

Rapat dilaksanakan pada pukul 09.30 WIB melalui zoom meeting, dipimpin oleh Karo Ortala Setjen Kemendagri, dihadiri oleh perwakilan dari seluruh UKE I lingkup Kemendagri.

Pada rapat dilakukan pembahasan terkait pemenuhan data dukung dalam peningkatan Tunjangan Kinerja PNS lingkup Kemendagri. Bapak Karo Ortala menyampaikan paparan terkait tambahan-tambahan data inovasi yang dilakukan oleh Kemendagri.

Bagian Perencanaan akan mencoba melakukan inventarisir terkait data tersebut di lingkup BSKDN.



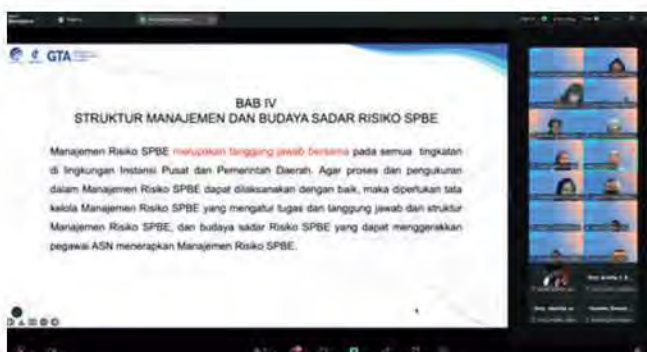
Pelatihan GTA Manajemen Resiko SPBE

Pelatihan GTA Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan pkl.08.00 WIB s.d 12.00 WIB melalui aplikasi zoom meeting dipimpin oleh Bpk Herry Abdul Aziz dihadiri peserta pelatihan serta perwakilan dari Kominfo.

Pengembangan budaya sadar Risiko SPBE dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:

- Menyusun perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE
- Melaksanakan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE

Setelah beberapa pelatihan, setiap kelompok melaksanakan tugas membuat poster masing-masing topik



Serba Serbi Juli

Rapat Pembahasan terkait Pengumpulan Data dan Informasi Bersama BPK RI

Rapat dilaksanakan pada pukul 09.30 WIB di Aula BSKDN, dipimpin oleh Sekretaris BSKDN, dihadiri oleh Tim BPK RI dan perwakilan dari seluruh UKE II lingkup BSKDN.

Pada rapat dilakukan pembahasan terkait pemenuhan data dukung terkait kegiatan BSKDN yang bersinggungan dengan Prioritas Nasional (PN) 6.

Sekretaris BSKDN memberikan arahan kepada Pusat Strategi Kebijakan II dan III untuk dapat menyampaikan evidence dokumen kegiatan BSKDN yang sesuai dengan tema PN 6 kepada Tim BPK RI.



Rapat Persiapan Keikutsertaan BSKDN dalam Memeriahkan Rangkaian Acara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI dan HUT Kemendagri

Rapat dipimpin oleh Sekban dan di hadirinya oleh Kabag SDMO, para Kasubag TU, Pejabat Fungsional dan staf di lingkungan BSKDN Kemendagri

Telah ditetapkan Kepmendagri No 400.10.1.1-1574 Tahun 2024 tentang Susunan Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 dan HUT Kemendagri Tahun 2024.

BSKDN Menjadi penanggung jawab lomba Tarik Tambang. Menunjuk penanggung jawab 15 lomba yang diadakan panitia. Penanggung jawab menunjuk kontingen masing-masing lomba, menyusun anggaran yang dibutuhkan dan memonitor jadwal TM dan jadwal pertandingan masing-masing cabang.

Diharapkan BSKDN ikutserta dalam semua cabang lomba, Peringatan HUT kali ini akan besar karena perpisahan dengan Pak Menteri.

Hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 adalah acara puncak (jalan santai). Untuk lomba tarik tambang jadwal TM tgl 29 Juli 2024 dan lomba tgl 9 dan 12 Agustus 2024. Akan diadakan juga lomba internal BSKDN antar Pusat dan Bagian di lingkungan BSKDN (ada 13 cabang lomba) dan Akan dimintakan CSR ke Bank untuk lomba internal BSKDN.



Serba Serbi Juli

Rapat pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri terkait Pemeriksaan Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan BMN, Pengelolaan Kepegawaian dan Pengelolaan PBJ

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Arjuna BSKDN pukul 13.00 WIB yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris BSKDN dan dihadiri oleh Itjen Kemendagri, Bagian Keuangan BSKDN, Seluruh Bendahara dan Subbag TU Pusat

Tim Itjen akan melakukan pemeriksaan Ketaatan TA.2024 di BSKDN mulai tanggal 22 Juli - 2 Agustus 2024. Pemeriksaan meliputi Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan BMN, Pengelolaan data Kepegawaian, Pengelolaan Barang/Jasa.

Adapun permintaan data pendukung yang diminta dalam mempermudah pemeriksaan dimaksud untuk dapat segera dikumpulkan dan disampaikan kepada Tim Itjen. Selama pemeriksaan diharapkan bagi pejabat pengelola untuk dapat hadir dikantor dan kooperatif sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar.





Rapat Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) Tahun Anggaran 2024

Rapat dilaksanakan di ruang rapat Pusat strategi kebijakan SDM, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, dihadiri oleh perwakilan dari pusat dan bagian di BSKDN.

Pada rapat ini Pustrajak SDM, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri menekankan pentingnya SPBE dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di daerah. Pustrajak SDM, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri memperkenalkan platform PUJA INDAH, mencakup latar belakang, fitur utama, cara penggunaan, dan rencana implementasi tahun 2024.

Penerapan SPBE dengan PUJA INDAH adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, dengan menekankan pentingnya kerjasama semua pihak untuk kesuksesan program ini. SPBE dan PUJA INDAH diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Dukungan teknis dan pelatihan diperlukan, serta monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala. Anggaran dan sumber daya harus dikelola dengan baik untuk mendukung implementasi yang sukses.

Rapat ini memberikan gambaran umum sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerapan inovasi SPBE dengan platform PUJA INDAH tahun anggaran 2024.



Serba Serbi Juli

Pelatihan GTA Manajemen Resiko SPBE

Pelatihan GTA Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan pkl.08.00 WIB s.d 13.00 WIB melalui aplikasi zoom meeting dipimpin oleh Bpk Herry Abdul Aziz dihadiri peserta pelatihan serta perwakilan dari Kominfo.

Perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil topik ke kelompok lainnya, dimana kelompok lainnya boleh memberikan masukan maupun saran.

Setelah masing-masing mempresentasikan hasil kelompok, lalu kami test secara individual serta mengisi survey evaluasi dan SPAK.



| PENILAIAN RISIKO | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| No | Uraian | Identifikasi | Analisis | Penilaian | Penyusunan | Penyusunan | Penyusunan | Penyusunan | Penyusunan | Penyusunan | Penyusunan |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

Rapat Pemaparan Konsep dan Hasil Uji Coba Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah

.Rapat dilaksanakan di Command Center BSKDN yang dipimpin oleh Bapak Kepala BSKDN dan dihadiri oleh pegawai lingkup BSKDN

Pertimbangan utama dalam penyusunan ITKPD yaitu:

- Konsep tata Kelola yang komprehensif mempertimbangkan ukuran kinerja dengan dampak yang mempengaruhi capaian Pembangunan daerah
- Optimalisasi penggunaan data sekunder baik berupa indeks maupun data satuan lain yang relevan dengan konsep tata kelola

ITKPD dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk bahan evaluasi, pedoman intervensi, arahan dan supervisi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemda dalam mencapai tujuan pembangunan daerah

Rapat dilaksanakan di Command Center BSKDN yang dipimpin oleh Bapak Kepala BSKDN dan dihadiri oleh pegawai lingkup BSKDN.

Rencana dan Tindak Lanjut ITKPD yaitu :

- Menyosialisasikan konsep dan rancang bangun ITKPD kepada stakeholder (UKE I Kemendagri, K/L Pengampu Data, Bappeda, BRIDA dan Biro Tapem Daerah)
- Menyusun regulasi antara dalam bentuk Kepmendagri sebagai landasan perhitungan 2024
- Pengukuran ITKPD 2024 dengan timeline sbb: Penyiapan pedoman pengukuran (lampiran kepmen) – Agustus 2024, Pengumpulan data – Agustus s.d Oktober 2024, Pengukuran dan Analisis – Oktober 2024, Finalisasi dan Penyusunan Buku ITKPD – November 2024 dan Sosialisasi Hasil – Desember 2024
- Melanjutkan proses penyusunan Permendagri menyesuaikan Koordinasi dengan biro hukum Kemendagri

Serba Serbi Juli

FGD Pendalaman Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kemendagri Tahun 2025-2029

Rapat dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Biroren Setjen Kemendagri, dipimpin oleh Kabag Program Birore, dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Bina Bangda, Ditjen Pemdes, IPDN, Itjen, BPSDM, dan BSKDN.

Pada rapat dilakukan pembahasan terkait pendalaman isu-isu strategis Kemendagri untuk Tahun 2025-2029.

Kabag Program Biroren menyampaikan bahwa seluruh UKE I Kemendagri harus melakukan analisis isu strategis yang komprehensif sebagai bahan materi penyusunan dokumen Renstra Kemendagri TA 2025-2029.



Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Prov Jambi Tahun 2024

Rapat dilaksanakan pukul 13.00 s.d 16.00 rapat dihadiri oleh Bappeda Jambi, Prov Jambi, Bangda, Biroren, dan Biropeg

Penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah yang memuat rencana kerja, program dan indikator kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara



Perubahan Tahun Anggaran 2024, dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2024, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RP-APBD) Tahun Anggaran 2024, serta dukungan program pembangunan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.



Serba Serbi Juli

Tindak lanjut Implementing Agency pada Program SKALA

Rapat dilaksanakan di ruang Command Center dihadiri oleh Kaban BSKDN, Sekban BSKDN, kabag, Kapus, JFU dan perwakilan dari team SKALA.

Pada rapat tersebut Skala memaparkan beberapa Program kemitraan australia indonesia untuk akselerasi layanan dasar dimana skala berfokus pada penguatan elemen strategis sistem pemerintahan daerah di indonesia seperti perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, manajemen, keuangan publik, kepemimpinan lokal dan penguatan persfektif dan pengarusutamaan kesetaraan gender disabilitas dan inklusi sosial. Sekala juga mendukung pemangku kepentingan utama secara nasional dan daerah serta mendorong kolaborasi dengan program DGAT lainnya terutama INKLUSI, Prospera, KIAT dan program sektoral lainnya. Pendekatan ini akan mendukung pemangku kepentingan dan penentu kebijakan untuk berkolaborasi serta menyelaraskan upaya, sumberdaya dan keahliannya.

Pada rapat dimaksud telah dilaksanakan diskusi penyesuaian ruang lingkup kerja sama yang akan disinergikan dengan program kerja sama SKALA, di antaranya berkaitan dengan kolaborasi penyusunan strategi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan kolaborasi peningkatan kapasitas fungsional Analisis Kebijakan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Untuk itu, dengan ini kami sampaikan kesediaan BSKDN, melalui Sekretariat BSKDN untuk menjadi Implementing Agency Program SKALA dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSKDN.



Rapat Analisa dan Pengkajian Kebijakan Pusat

Rapat dilaksanakan di Hotel Orchard Industri Raya dihadiri oleh Perwakilan Biro Hukum Kemenkumham, Biro Hukum Kemendikbud, Biro Hukum Kemenpanrb, Biro Hukum Kemenlu, serta semua Komponen Kemendagri.

Rapat analisa dan pengkajian kebijakan pusat di Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Biro Hukum, memiliki fokus utama pada aspek hukum dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Biro Hukum bertanggung jawab memastikan bahwa semua kebijakan yang dirumuskan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mendukung implementasi yang efektif dan sah secara hukum.

Tata cara pembuatan naskah dinas agar dapat tertib administrasi. Tata cara pembuatan naskah dinas di Biro Hukum Kemendagri mengikuti pedoman umum administrasi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri No 42 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri)

Bagian Perencanaan siap mengikuti arahan dalam pembuatan tata naskah dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kelancaran dalam tertib administrasi di lingkungan Kemendagri.



Serba Serbi Juli

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Rapat Harmonisasi ini dilaksanakan untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diinisiasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menetapkan pengaturan sistem pengelolaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia. Rapat dilaksanakan pada pukul 09.00 s.d 12.00 secara virtual, rapat dipimpin oleh Fungsional Perancang PUU dari Ditjen PUU Kemenkumham dan dihadiri oleh BRIN selaku inisiator, dan Perwakilan dari kementerian/lembaga, di antaranya: Kemensetneg, KemenPPN/Bappenas, Kemenkes, Kemenperin, dan Kemendagri.

Dibahas pasal yang akan mengatur urgensi verifikasi dan kurasi metadata oleh BRIN, yang mencakup aktivitas pengolahan dan analisis seluruh metadata; pengolahan dan pengemasan teks lengkap untuk tujuan diseminasi informasi; Pengelolaan data primer untuk digunakan atau diakses secara terkendali; dan penerbitan katalog digital data primer.

Diatur agar kelembagaan IPTEK sebagai salah satu pemilik data wajib melakukan kurasi terhadap data yang berhasil diunggah pada sistem informasi yang dikelola oleh BRIN. Kurasi dilakukan untuk menjamin bahwa data yang disimpan tidak melanggar hak cipta dan agar data yang dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Rapat ini berhasil selain disepakati berbagai aspek penting dari Rancangan PP tentang Penyelenggaraan IPTEK, diperlukan rapat lanjutan untuk membahas usulan pengaturan lain yang dianggap dibutuhkan. Bagian Perencanaan aktif mengawal dan turut berdiskusi dengan K/L terkait pembahasan pasal per pasal agar pengaturan yang nanti ditetapkan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Penandatanganan MoU Kemendagri dengan Yayasan Nusantara Sejati (YNS) mitra Kosso Nippon

Rapat dilaksanakan di Ruang Command Center pukul 16.30 s.d 17.30. Rapat dipimpin oleh Bapak Kepala BSKDN dan dihadiri oleh Bapak Sekban BSKDN, Plh. Kapus I, Plh. Kapus II, perwakilan masing-masing Pusat dan Bagian lingkup BSKDN, Sdr. Eka Simanjuntak selaku pimpinan YNS beserta tim, dan Kabid Kerja Sama Dagri Pusat Fasker beserta tim.

Pada rapat dilaksanakan penandatanganan naskah Nota Kesepahaman atau MoU oleh Sdr Eka Simanjuntak, setelah sebelumnya naskah yang sama telah ditandatangani oleh Bapak Plt. Sekjen Kemendagri. Nota Kesepahaman dimaksud merupakan payung yang mendasari kerja sama dalam bentuk implementasi program review sebagai bentuk instrument evaluasi kebijakan tingkat desa yang menekankan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur di tingkat pemda.

Pelaksanaan program review juga melibatkan Kemendagri sebagai observer sekaligus pembina dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Program Review juga disertai dengan analisis kebijakan dalam rangka mengevaluasi program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa dan kabupaten/kota.

Selanjutnya kerja sama akan berkembang pada penyusunan Key Performance Indicators (KPI) sebagai metodologi evaluasi perencanaan kebijakan yang terukur dan objektif. Untuk itu kerja sama pada lingkup yang lebih teknis akan dilanjutkan melalui penyusunan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS).



Serba Serbi Juli

Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Perubahan Provinsi NTB dan NTT Tahun 2024

Penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026. Sebagai gambaran bahwa dalam tahapan pencapaian RPD Provinsi NTB pada tahun pertama fokus pada Pembangunan manusia dan lingkungan, meningkatkan produktivitas, daya saing daerah dan penghapusan kemiskinan ekstrim, tahap kedua Penguatan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan dan tahap ketiga Peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan manusia dan lingkungan yang berkualitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Mempedomani arah kebijakan RPJMD 2018-2023, Tema Pembangunan 2022 adalah “Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah”.



Sosialisasi Wondr By BNI

Sosialisasi dilaksanakan pukul 13.30 WIB di Aula BSKDN yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris BSKDN dan dihadiri oleh Tim Bank BNI dan pegawai lingkup BSKDN

BNI meluncurkan aplikasi terbaru nya yaitu Wondr by BNI, melalui Wondr nasabah dapat mengakses layanan perbankan secara lebih cepat dan mudah melalui aplikasi digital.

* Bank BNI memiliki beberapa produk seperti Kartu Kredit BNI Batik Air dan BNI Fleksi Aktif yang merupakan fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang diberikan kepada Pegawai Aktif yang mempunyai penghasilan tetap (fixed income)



Serba Serbi Agustus

Rapat Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dilaksanakan oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Pusfasker) Setjen Kemendagri di Hotel Orchardz Jayakarta. Bimtek dibuka oleh Plh. Kepala Pusfasker dan dilanjutkan oleh Kepala Bidang Kerja Sama Dalam Negeri Pusfasker. Bimtek dihadiri oleh perwakilan UKE 1 Kemendagri, perwakilan K/L (Kemensetneg, Kemenkeu, KemenLHK, BNN), dan perwakilan beberapa pemda;

Bimtek menghadirkan beberapa narasumber dengan poin-poin inti sebagai berikut:

- Dit. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyampaikan penerapan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disampaikan bahwa pelaksanaan kerja sama sebagai bentuk optimalisasi pemungutan pajak dan penghimpunan data seputar potensi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

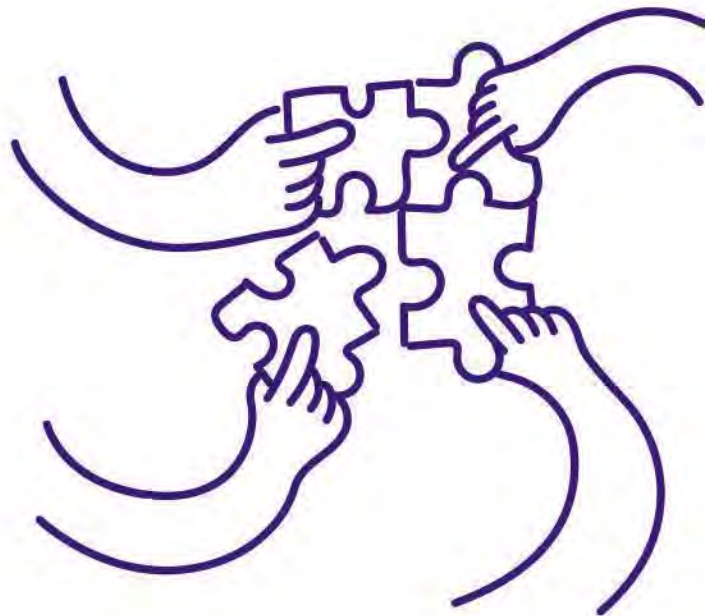
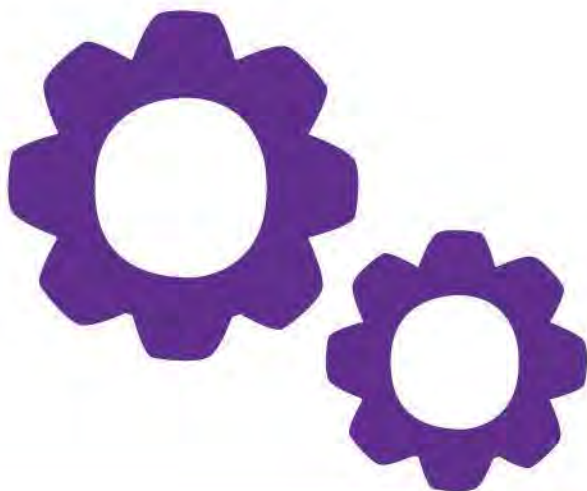
Bappenas menyampaikan agar kerja sama yang dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar berorientasi pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, sehingga kerja sama diharapkan tidak hanya berfokus pada government to government melainkan juga menekankan kerja sama pentahelix dengan berbagai aktor, termasuk swasta, media massa, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat.

Dit. BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, menyampaikan terkait skema kerja sama sewa BMD dalam bentuk tanah dan bangunan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan menjadi tempat usaha yang produktif, tentu ditekankan bahwa kerja sama semacam ini hanya dibolehkan untuk BMD kurang produktif yang tidak terpakai atau kurang maksimal digunakan. Diharapkan pemanfaatan BMD juga berkolaborasi dengan BUMD setempat, seperti pemanfaatan lahan pasar melalui PD yang mengelola pasar.

Biro Ortala Setmen Kemensetneg menyampaikan saat ini masih dimatangkan bersama KemenPANRB untuk penetapan grade jabatan dan penetapan tunjangan kinerja. Untuk itu dengan penerapan fungsional Analisis Kerja Sama diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme para pejabat pengelola kerja sama yang sudah terfokuskan dan sesuai dengan kompetensi yang menunjang pelaksanaan kerja sama yang baik.



Bagian Perencanaan siap mengadopsi praktik baik dan informasi yang didapat dari pelaksanaan Bimtek guna mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan fasilitasi kerja sama lingkup BSKDN.



Serba Serbi Agustus

Workshop penyusunan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

Rapat dilaksanakan pkl. 08.00 s.d 17.00 WIB di Pusat Pengembangan SDM regional Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Bagian Program Biro Perencanaan dihadiri para perwakilan UKE I lingkup Kemendagri dan Narasumber dari Bappenas dan Kemenkeu.

Pembahasan mencakup muatan Renstra K/L 2025 - 2029 dan Timeline Penyusunan RPJMN dan Renstra K/L 2025 - 2029.

Pembahasan mencakup muatan Renstra K/L 2025 - 2029 dan Timeline Penyusunan RPJMN dan Renstra K/L 2025 - 2029.



Terdapat tindaklanjut antara lain:

- Identifikasi Muatan yang akan dituangkan KRISNA RENSTRA KL meliputi tugas dan fungsi regular K/L sesuai Perpres SOTK
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait
- Koordinasi dengan Mitra K/L di Bappenas terkait, Muatan tugas dan fungsi regular K/L dan Rancangan Prioritas yang akan ditugaskan ke K/L
- Koordinasi dengan K/L lain di bidang terkait seperti: "BPOM berkoordinasi dengan Kemenkes"
- Penyusunan Ranwal Renstra K/L di Sistem Informasi Krisna-Renstra s.d M-4 Sept 2024, untuk selanjutnya menjadi bahan untuk Exercise kerangka pendanaan jangka menengah





Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Rapat Lanjutan Harmonisasi Rancangan PP diadakan untuk membahas lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang diinisiasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Rapat dilaksanakan secara virtual mulai pukul 09.00 s.d 11.30 WIB dipimpin oleh Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU) dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PUU) Kemenkumham. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari BRIN, Kemensetneg, Bappenas, Kemenkes, dan Kemendagri

Dalam rapat difinalkan pengaturan seputar Kewajiban Kurasi oleh Kelembagaan IPTEK, dengan menetapkan bahwa Kelembagaan IPTEK sebagai pemilik data diwajibkan melakukan kurasi terhadap data yang diunggah ke sistem informasi yang dikelola oleh BRIN untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak cipta dan kesesuaian peraturan.

Rapat juga menyepakati kewenangan Proses Verifikasi oleh BRIN di mana BRIN akan memastikan ketersediaan dokumen perencanaan data primer dan keluaran hasil riset, kelengkapan metadata, serta memastikan data terunggah ke dalam sistem informasi yang dikelola oleh BRIN. BRIN juga akan menganalisis metadata yang diunggah dan menetapkan akses serta lisensi data.

Pada rapat juga dilaksanakan pembahasan Pasal 73 dan 73A yang berfokus pada pengalihan material keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, kekayaan sosial, budaya, dan kearifan lokal Indonesia. Diskusi ini mencakup larangan pengalihan material selama uji material dapat dilakukan di Indonesia, dan kewajiban perjanjian pengalihan material jika uji material tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Serba Serbi Agustus

Workshop penyusunan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

Rapat dilaksanakan pkl. 08.00 s.d 17.00 WIB di Pusat Pengembangan SDM regional Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Bagian Program Biro Perencanaan dihadiri para perwakilan UKE I lingkup Kemendagri.

Masing-masing UKE I lingkup Kemendagri memaparkan masukan Arah Kebijakan Renstra Kemendagri Tahun 2025 - 2029.

Tindaklanjut workshop penyusunan rancangan awal Renstra Kemendagri Tahun 2025 - 2029 antara lain:

- UKE I menyusun matriks kinerja dan kerangka pendanaan Tahun 2025 - 2029 dan melakukan penginputan matriks tersebut pada Kinerja Renstra 2025 - 2029.
- UKE I melakukan koordinasi dengan K/L di bidang terkait dan pemerintah daerah dalam penyusunan renstra dengan melibatkan Biro Perencanaan.

Bagian Perencanaan siap mengawal penyusunan Renstra Kemendagri Tahun 2025 - 2029 bersama UKE I lingkup Kemendagri dan didukung oleh Pusat maupun Bagian lingkup BSKDN.

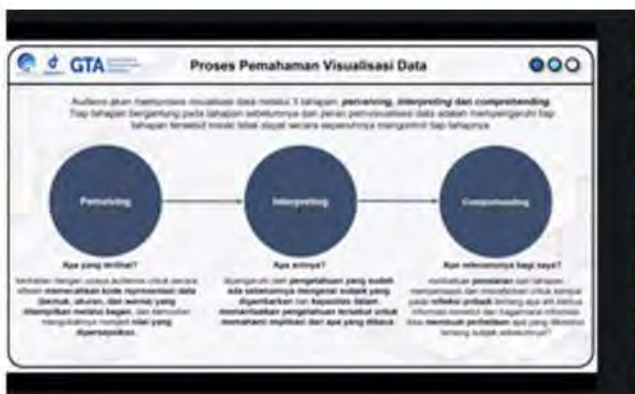


Pelatihan Visualisasi Data Kominfo

Pelatihan dimulai dengan acara pembukaan pada pukul 09.00 oleh Kepala BPSDM Kominfo dan pelatihan dipandu oleh Widyaiswara BPSDM Kominfo

Pelatihan memberikan materi-materi dasar terkait pemanfaatan visualisasi data dalam dunia kerja untuk dapat menjelaskan informasi yang bermanfaat

Pelatih menyampaikan contoh-contoh data yang dapat divisualisasikan dengan cara yang efektif dan tidak menghilangkan esensi dari data dasar



Serba Serbi Agustus

Rapat pembahasan tindaklanjut BA dan CHR pemanfaatan buka blokir AA BSKDN TA.2024

Rapat dilaksanakan pkl. 14.00 s.d 17.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Aula BSKDN Kemendagri dipimpin oleh Sekretaris BSKDN dihadiri oleh para perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN Kemendagri.


Rapat pembahasan tindaklanjut Berita Acara dan Catatan Hasil Reviu pemanfaatan buka blokir Automatic Adjustment TA.2024 bertujuan untuk koordinasi agar Pusat dan Bagian dapat melakukan perbaikan pada data dukung kelengkapan buka blokir seperti TOR dan RAB kegiatan serta menjelaskan urgensinya.

Usulan pagu Automatic Adjustment BSKDN Kemendagri TA.2024 sebesar Rp.3.927.697.000 -. Berdasarkan surat Mendagri Nomor 900.1.2/3462/SJ tanggal 25 Juli 2024 hal usulan pemanfaatan blokir Automatic Adjustment Kemendagri Tahun 2024, bahwa BSKDN Kemendagri disetujui pagunya sebesar Rp.3.452.698.000 yang tidak disetujui sebesar Rp.468.999.000,-.

Usulan pemanfaatan buka blokir Automatic Adjustment BSKDN masih belum final, dikarenakan proses akhir dan kesepakatan oleh Bappenas dan Kemenkeu.

Diharapkan Pusat dan Bagian segera menyerahkan TOR dan RAB berupa softcopy dan hardcopy ke Sekretaris BSKDN cq. Kepala Bagian Perencanaan paling lambat hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024.





Pembahasan internal Peraturan Presiden tentang Ketaatan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Hukum

Rapat dilaksanakan oleh Biro Hukum Setjen secara virtual dan dibuka oleh Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda mewakili Kabag Peraturan Perundang-Undangan (PUU) Biro Hukum Setjen. Rapat dihadiri oleh masing-masing perwakilan UKE I lingkup Kemendagri yang menangani Hukum dan PUU.

Pembahasan Ranperpres tentang Ketaatan Hukum dalam Pembentukan PUU didiskusikan beberapa hal, termasuk juga pembahasan urgensi Ranperpres ini sebagai bentuk dari Pembinaan Hukum Nasional, yang merupakan upaya berkesinambungan untuk mewujudkan substansi hukum yang berlaku, meliputi hukum tertulis, hukum tidak tertulis, kelembagaan, sarana dan prasarana (struktur hukum) serta budaya hukum.

Ketaatan hukum dimaknai sebagai ketaatan setiap orang, Badan Usaha, Badan Hukum, atau Badan Publik yang melakukan usaha atau kegiatan terhadap PUU atau hukum yang berlaku

Ranperpres ini juga berencana untuk mengatur monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan PUU yang dilaksanakan oleh K/L serta Pemda. Untuk proses pembentukan PUU yang mengalami kendala, Menkumham dapat melakukan intervensi untuk mempercepat proses penyusunan dan penyetaraan Rancangan PUU

Akan dilaksanakan rapat lanjutan untuk membahas pencermatan pasal per pasal. Bagian Perencanaan siap mengawal pengundangan Ranperpres dimaksud dan mencermati implikasi pengundangannya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BSKDN.

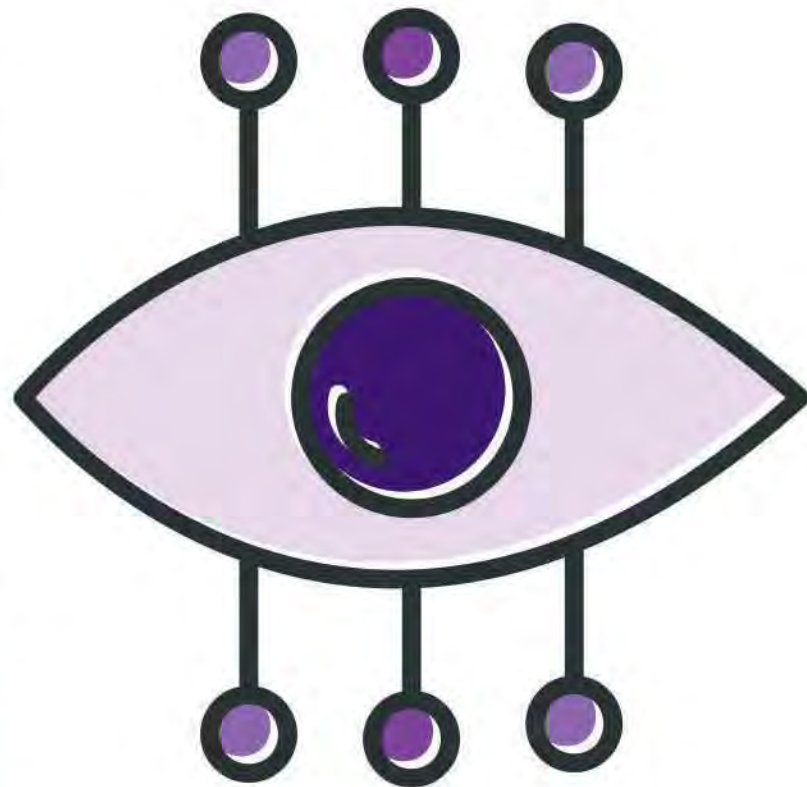
Serba Serbi Agustus

Pelatihan Visualisasi Data Kominfo

Pelatihan visualisasi data dimulai pukul 08.00 WIB oleh Widyaiswara BPSDM Kominfo.

Materi visualisasi data yang disampaikan terkait dengan tata cara penggunaan aplikasi visualisasi data Looker Studio dengan menggunakan contoh database.

Peserta pelatihan diharapkan dapat menggunakan aplikasi Looker Studio sebagai bahan latihan dalam meningkatkan kemampuan visualisasi data.





Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan RKPD Prov Riau Tahun 2024

Rapat diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Rapat dipimpin oleh Kepala Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi dihadiri oleh perwakilan Prov. Riau, Kementerian terkait, dan komponen lingkup Kemendagri.

Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahunan Prov Riau:

- 2019 : Peningkatan perekonomian, penguatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan pelestarian lingkungan
- 2020 : Meningkatkan daya saing SDM dan infrasktruktur wilayah untuk pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang berbasis budaya melayu
- 2021 : Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kemandirian ekonomi dan penurunan dan pengangguran, dengan menggerakkan industri, pertanian dan pariwisata.
- 2022 : Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis industri, pertanian dan pariwisata dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.
- 2023 : Memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah yang bersinergi
- 2024 : Mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermatabat dan unggul di Indonesia

Provinsi Riau menempati urutan ketiga dengan capaian prevalensi stunting terendah yaitu 13,6 persen setelah Bali 7,2 persen dan Jambi 13,5 persen. Jika dibandingkan dengan prevalensi stunting Riau tahun 2023 dengan angka 36,8 persen, maka terus mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir.



Serba Serbi Agustus

Rapat Persiapan Penandatanganan Pernyataan Komitmen

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Vidcon BSKDN Kemendagri, dihadiri oleh Perwakilan dari Pusdatin Kemendagri, Ditjen Otda Kemendagri, Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN, perwakilan tiap pemda dan staff terkait lainnya.

Pendatanganannya pernyataan komitmen merupakan tahapan yang dilakukan dalam rangka penerapan aplikasi puja indah yang di tunjukan agar para pihak dalam ini kemendagri dan pemda dapat lebih memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan aplikasi puja indah layanan pemerintah daerah. sebanyak 14 daerah telah berkirin surat minat di tahun 2018-2023 namun belum mengikuti proses penandatanganan komjtmn yang dilaksanakan sampai demgan tahun 2023.

Maksud dan tujuan di laksanakan draf pernyataan ini yaitu menintegrasikan tugas dan fungsi para pihak dalam rangka penerapan puja indah, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pemda melalui penerapan puja indah, meningkatkan komitmen para pihak dalam penerapan puja indah dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penerapan puja indah. untuk pelaksanaan lebih lanjut mengenai komitmen kepada daerah akan dilaksanakan di Hotel Luminor tanggal 22 Agustus 2024.

Bagian Perencanaan siap mendukung kesuksesan kegiatan Penandatanganan Pernyataan Komitmen penerapan puja indah agar dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penerapan puja indah.

Konsolidasi Pusat dan Bagian Terkait Pemanfaatan Buka Blokir Automatic Adjustment BSKDN TA.2024

Rapat dilaksanakan pkl.10.00 s,d 15.00 WIB bertempat di RR Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan, dihadiri oleh perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN Kemendagri serta Staf Bagian Perencanaan.

Konsolidasi Pusat dan Bagian terkait pemanfaatan buka blokir automatic adjustment BSKDN TA.2024 bertujuan untuk koordinasi Pusat dan Bagian terkait data dukung pemanfaatan buka blokir automatic adjustment BSKDN TA.2024 pada TOR dan RAB agar dijelaskan urgensinya.

Pusat yang sudah melakukan pembahasan yaitu Pusat Polhum, Pusat Kewilayahan, Pusat Pemkeuda dan Pusat Inovasi, sedangkan Bagian yang sudah melakukan pembahasan yaitu Bagian Keuangan, Bagian SDMO. Bagian Umum pembahasannya dilakukan besok pada hari rabu tanggal 7 agustus 2024.

Bagian perencanaan siap mengawal proses pemanfaatan buka blokir Automatic Adjustment BSKDN Kemendagri TA.2024.



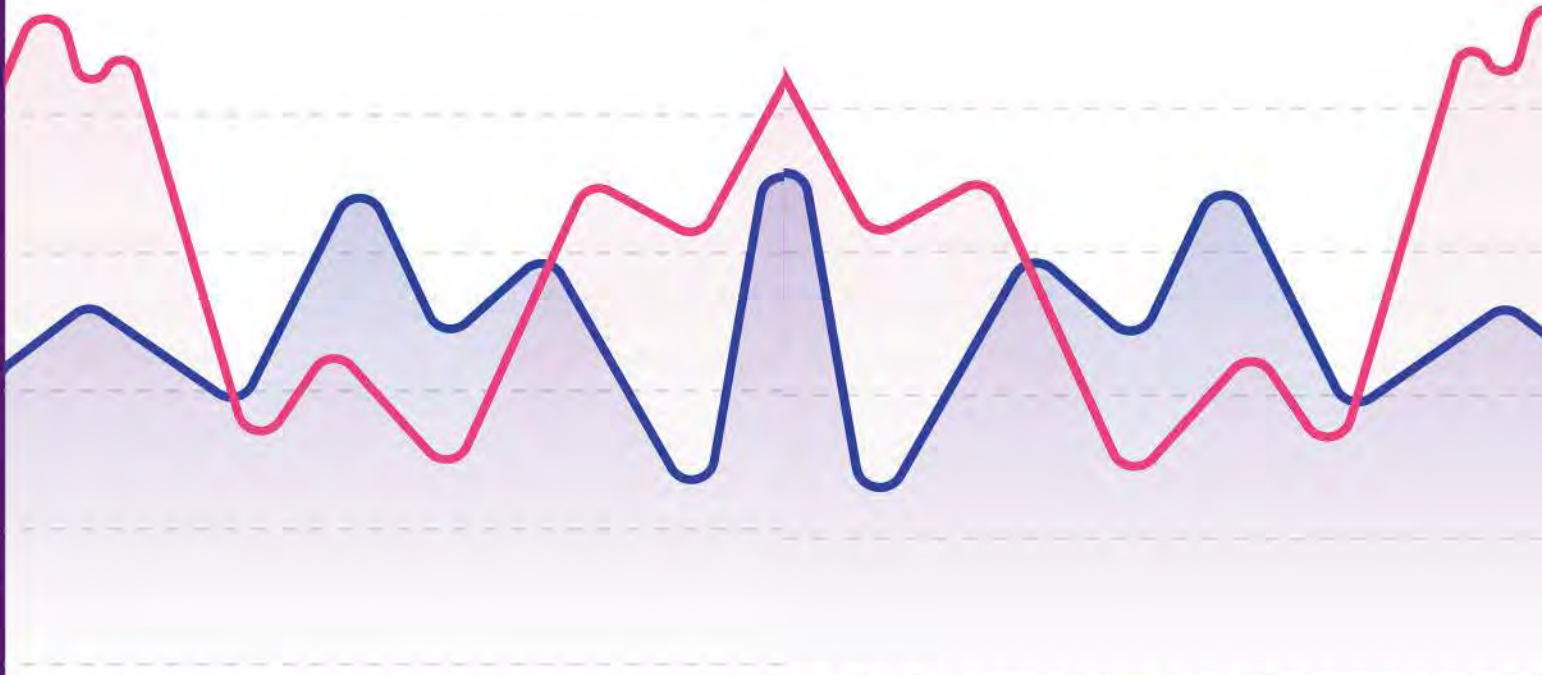
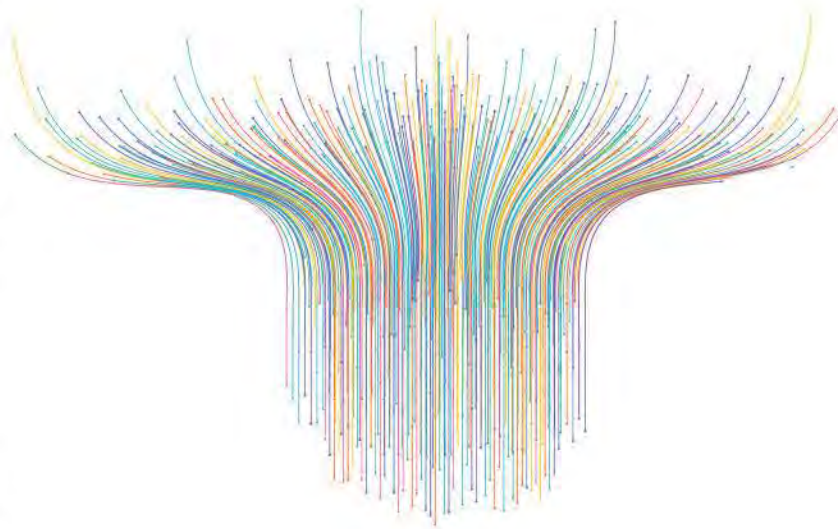
Serba Serbi Agustus

Pelatihan Visualisasi Data Kominfo

Pelatihan visualisasi data dimulai pukul 08.00 WIB s.d 12.00 WIB oleh Widyaiswara BPSDM Kominfo.

Pelatihan hari ini membahas pentingnya visualisasi data, jenis chart dan fungsinya dan tahapan pengembangan dashboard.

Masing-masing kelompok, wajib mengunggah di LMS masing-masing tugas terkait FRD di link tautan looker studio.



Pertemuan Komite Teknis Program SKALA Tahun 2024-2025, Pengesahan rencana kerja Program SKALA 2024-2025 dan Diskusi Strategis Kebijakan Layanan Dasar

Rapat dilaksanakan pukul 08.30 s.d 16.30 WIB bertempat di Aula Frans Seda DJPPR Kementerian Keuangan, dipimpin oleh perwakilan dari Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, dan Tim SKALA.



Diskusi dilakukan membahas terkait tindak lanjut kesepakatan usulan Rencana Kerja Juli 2024 - Juni 2025.



BSKDN diusulkan sebagai pengampu dalam 2 fokus area yaitu:

- Penguatan Perencanaan Daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif
- Penguatan komitmen pimpinan daerah dalam penerapan SPM dan peningkatan kualitas belanja daerah

Rapat ditutup dengan acara penandatanganan berita acara persetujuan Rencana Kerja 2024-2025



Serba Serbi Agustus

Rapat Pleno Atas Rancangan Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2025

Rapat dilaksanakan melalui zoom meeting, dihadiri oleh perwakilan Ditjen Bina Keuda, Perwakilan Biro Hukum Kemendagri, DJPP Kemenkumham, Kemenparkraf, Ombudsman Ri, Kemenkeu, Bappenas, dan komponen lainnya.

Pada rapat tersebut membahas pasal perpasal rancangan permendagri tentang pedoman penyusunan APBD dengan batang tubuh yaitu sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, Teknis penyusunan APBD.

Isi dari pedoman penyusunan APBD TA 2025 yang telah terupdate yaitu dalam Peraturan perundang undangan berisi (kebijakan terbaru, perlu penjelasan kebijakan, perlu penegasan kebijakan, dan perlu dukungan kebijakan).

dalam struktur APBD berisi (penjelasan atas kode rekening, menggunakan kode rekening dan Batasan kebijakan kode rekening), serta dalam bisnis proses berisi (tahapan baru, penekanan dan penegasan tahapan, pihak yang terlibat dalam setiap tahapan dan dokumen yang dihasilkan).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah dalam kerangka sinergi dan penyalarsan kebijakan pemerintah pusat dan pemda, konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan anggaran daerah dan penyajian prioritas pembangunan nasional yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah. Serta dalam prinsip penyusunan APBD menyajikan prinsip penyusunan APBD dan menyajikan kebijakan umum dalam penyusunan APBD.

Konsolidasi Pusat dan Bagian Terkait Pemanfaatan Buka Blokir Automatic Adjustment BSKDN TA.2024

Rapat dilaksanakan pkl.10.00 s,d 12.00 WIB bertempat di RR Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan, dihadiri oleh perwakilan Bagian Umum serta Staf Bagian Perencanaan.

Konsolidasi terkait pemanfaatan buka blokir automatic adjusment BSKDN TA.2024 bertujuan untuk data dukung pemanfaatan buka blokir automatic adjusment BSKDN TA.2024 pada TOR dan RAB agar dijelaskan urgensinya.

Bagian umum akan menyiapkan spesifikasi belanja modal terkait mic, sound, perhitungan pengaspalan dan iritasi air.

Bagian perencanaan siap mengawal proses pemanfaatan buka blokir Automatic Adjustment BSKDN Kemendagri TA.2024.



Serba Serbi Agustus

Rapat Evaluasi Kelembagaan BSKDN

Rapat dipimpin Analis Kepegawaian Ahli Muda (Eko Santoso) mewakili Kabag SDMO dan dihadiri oleh para Analis Kebijakan Ahli Madya, Analis Kebijakan Ahli Muda, para Kasubab TU dan perwakilan bagian-bagian.

Penyampaian usulan nomenklatur kelembagaan BSKDN dari masing-masing Pusat dan Bagian.

Usulan Bagian Perencanaan:

- Nomenklatur Pusat-pusat mewakili nomenklatur Eselon I di lingkungan Kemendagri
- Dilakukan self assesment evaluasi kelembagaan BSKDN berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instanasi Pemerintah.

Diskusi tentang Laporan hasil ecaluasi internal ex-ante RB tahun 2024 BSKDN.

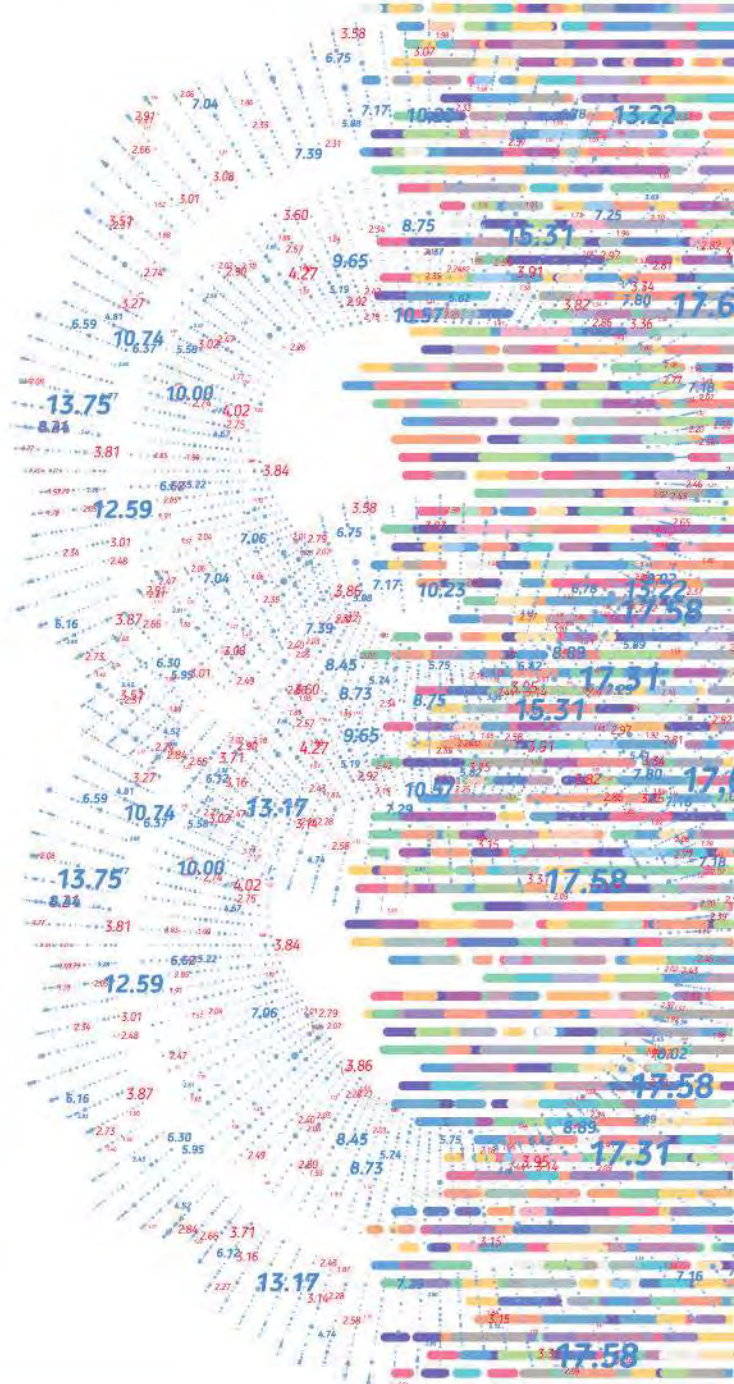


Pelatihan Visualisasi Data Kominfo

Pelatihan dimulai pada pukul 08.00 WIB melalui zoom meeting dan dibuka oleh Widyaiswara BPSDM Kominfo.

Pelatihan hari ini digunakan untuk mempresentasikan hasil pemanfaatan aplikasi Looker Studio sebagai visualisasi data menggunakan data yang tersedia.

Pelatih memberikan feedback positif terhadap semua presentasi yang disampaikan. Hasil pelatihan terkait visualisasi data akan dicoba untuk diimplementasikan dalam kebutuhan dukungan kinerja organisasi.



Serba Serbi Agustus

Rapat Kerjasama Bersama Skala

Rapat dilaksanakan di Ruang Command Center pkl 10.00 s.d 12.30 WIB, dihadiri oleh Bapak Kaban, Bapak Sekban, perwakilan Pusat 4 BSKDN, dan Tim SKALA, serta Ibu Astrid dari DFAT yang juga mengawal pelaksanaan program kerja SKALA.

Rapat dimulai dengan pengenalan kelembagaan dan penjelasan terkait penilaian inovasi daerah yang juga termasuk dengan progres pengusulan Dana Insentif Daerah (DID) ke Kemenku bagi daerah-daerah yang dinilai layak mendapatkan insentif atas keberhasilan mengelola inovasi di daerahnya.



SKALA menyampaikan penjelasan bahwa program kerja sama yang akan dikolaborasikan dengan BSKDN yakni dalam bentuk short course yang akan dilaksanakan pada 8 s.d 10 Oktober 2024 di Provinsi Gorontalo. Diharapkan Bapak Kaban dapat hadir untuk memberikan pengarahan kepada seluruh peserta pelatihan terkait urgensi pelaksanaan inovasi. Short course yang dilaksanakan oleh SKALA berfokus pada peningkatan kapasitas para fungsional Analisis Kebijakan.

Dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan sosialisasi atas short course yang akan berlangsung pada bulan Oktober tahun 2024. Short course ini dinilai relevan dengan peran BSKDN sebagai hub penyusunan strategi kebijakan sehingga penguatan para fungsional analisis kebijakan dapat mendorong peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja yang relevan;

Rapat Penandatanganan Usulan Kerangka Kelembagaan

Rapat dilaksanakan pkl. 14.00 s.d 16.00 WIB bertempat di Aula BSKDN, dipimpin oleh Kepala BSKDN dan dihadiri oleh Sekretaris, para kepala bagian, para analis kebijakan madya, analis kebijakan muda, pejabat fungsional lainnya, kasubag TU dan undangan lainnya.

Terdapat beberapa arahan Kepala BSKDN meliputi:

- Tidak ada struktur yang sempurna
- Penyusunan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Kelembagaan yang miskin struktur dan kaya fungsi

Beberapa tantangan ke depan meliputi digitalisasi, dan program kerja kabinet baru.

Data Biro ortala sementara hanya usulan kelembagaan setingkat eselon I dan II dan Sinkronisasi penyusunan kelembagaan dan penyusunan renstra.

Pembahasan Kelembagaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri antara lain:

- Sekretariat
- Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan
- Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik
- Pusat strategi kebijakan pemerintahan dan keuangan daerah dan desa
- Pusat strategi kebijakan pengembangan SDM, digitalisasi, dan inovasi urusan pemerintahan dalam negeri



Serba Serbi Agustus

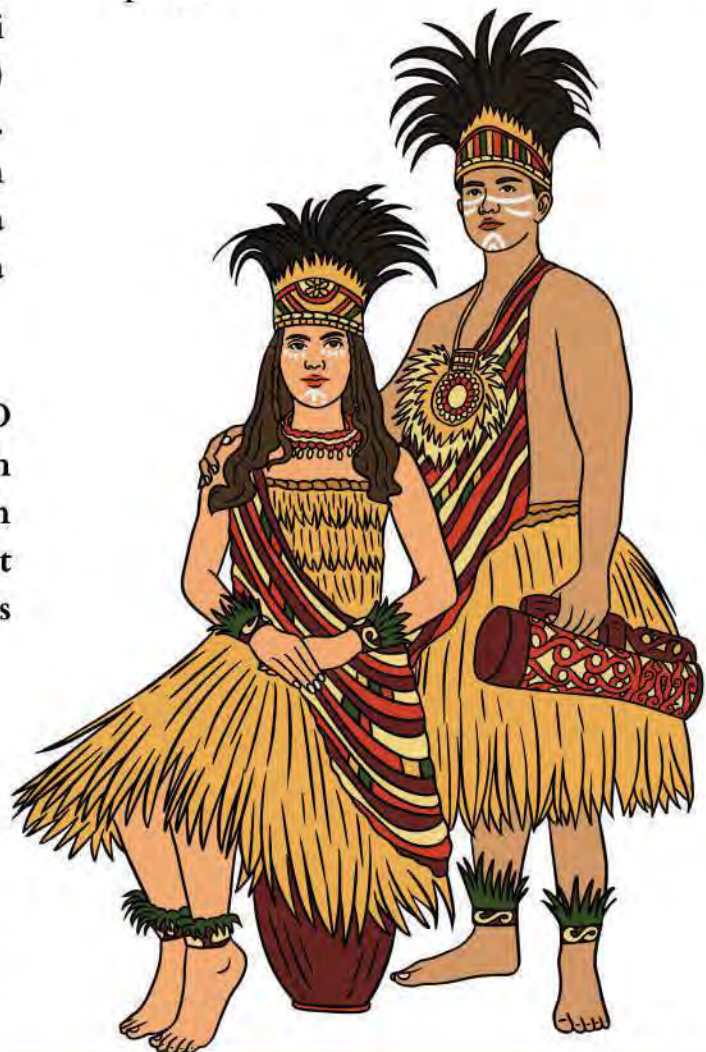
Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan RKPD Prov Papua Tahun 2024

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Bapperida Papua, , Bangda, Bappenas, Dinas Kominfo, Biro Perencanaan, Kemensos, Kemendikbud, dan Kemenkes.

Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 merupakan implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026. dimana sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, periode akhir masa jabatan Gubernur Papua berakhir pada bulan September 2023.

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Provinsi Papua sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

Bagian Perencanaan siap mendukung kesuksesan kegiatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang PKPD demi kesuksesan dan kelancaran demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terpadu di seluruh provinsi.



Rapat Internal Pembahasan Isu Strategis BSKDN Berbasis Balanced Scorecard Periode Renstra 2025-2029

BSKDN mengusulka pemetaan isu strategis dan sasaran strategis berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard dan pemetaan kebijakan strategis berdasarkan instrumen assesment perencanaan FASTEST STEP.

Isu strategis dari perspektif stakeholder (pemangku kepentingan BSKDN perlu mempertegas kerangka regulasi terkait positioning BSKDN sebagai pengampu inovasi pemerintahan dalam negeri dan sebagai HUB perumusan strategi kebijakan dalam negeri dan hubungannya dengan UKE I lingkup Kemendagri maupun Pemerintah Daerah.

Isu strategis dari perspektif Customer, BSKDN perlu memperkuat dan membenahi kerangka regulasi terkait peran central BSKDN sebagai HUB Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri khususnya mempertegas posisi BSKDN sebagai pengampuh indeks kualitas kebijakan dalam negeri dalam proses bisnis perumusan strategi kebijakan semua UKE I.

Isu Strategis dari perspektif Organisational Capacity (learning and growth) BSKDN akan memperkuat kualitas tata kelola organisasi yang mencakup kualitas perencanaan, kualitas pengelolaan keuangan, kualitas SDM, pengawasan dan pengendalian internal serta kuliatas sarana dan prasarana organisasi. Aspek organisational ini akan diukur secara objektif melalui instrumen, indeks tata kelola organisasi yang merupakan indeks komposit dari:

- nilai SAKIP
- pengelolaan SDM
- kualitas sarana dan prasarana (akan diadopsi dan dikembangkan berdasarkan referensi, indeks pengelolaan aset yang dikeluarkan oleh Kemenkeu)



Serba Serbi Agustus

Rapat Pembahasan Masukan Renstra Kemendagri dari Perspektif BSKDN

Bagian Perencanaan menyusun Cascading Sasaran Strategis berbasis BALANCED Scorecard.

Pembahasan selanjutnya akan dibahas perumusan indikator-indikator setiap Program Strategis.

Bagian perencanaan akan terus mengawal dalam penyusunan Renstra.



Rapat Penelitian RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran BSKDN TA.2025

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 16.00 WIB via zoom meeting dipimpin oleh Analis Anggaran Ahli Muda Selaku Sub Koordinator pada Subbagian Penyusunan Anggaran III dan Staf Bagian Perencanaan BSKDN Kemendagri.

Memastikan RKA-K/L PI TA. 2025 yang disusun telah memperhatikan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, dan apabila terdapat pengalokasian anggaran yang melampaui standar biaya yang berlaku.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, apabila terdapat kekurangan dalam pengalokasian, dapat dipenuhi melalui optimalisasi anggaran internal BSKDN dengan memperhatikan prioritas penganggaran.

RKA-K/L PA BSKDN TA.2025 hasil penelitian agar diperbaiki sesuai hasil catatan penelitian untuk diinput didalam Aplikasi SAKTI dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan paling lambat 2 hari setelah terbitnya BA pelaksanaan penelitian RKA-K/L masing-masing Unit Kerja Eselon I.



Serba Serbi Agustus

Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024

Rapat dipimpin oleh Plh. Direktur perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, Ditjen bina pembangunan daerah, dihadiri oleh perwakilan dari BPSDM, Bappenas, Biro Perencanaan Ditjen Bangda, Kementerian ATR/BPN, ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Wilayah, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Provinsi Lampung.

Rapat fasilitasi terkait Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 dilaksanakan untuk membahas dan mengevaluasi usulan perubahan RKPD serta memastikan kesesuaian dengan kebijakan strategis nasional dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat tersebut, Tim Penyusun dari Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan latar belakang dan alasan perubahan, yang meliputi penyesuaian anggaran dan perubahan prioritas pembangunan. Usulan perubahan dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan nasional serta dampaknya terhadap capaian target pembangunan daerah. Beberapa rekomendasi disampaikan oleh peserta rapat, termasuk penyesuaian program agar lebih efektif dan efisien, serta pentingnya koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah. Rapat menyimpulkan bahwa perubahan RKPD pada prinsipnya dapat diterima dengan beberapa catatan penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Koordinasi lanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi perubahan berjalan dengan baik.



Rapat pembahasan Policy Brief Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan Kependudukan dan pelayanan Publik Lt. 3 Gedung Krisna BSKDN, dihadiri oleh perwakilan dari Pusat dan Bagian di lingkungan BSKDN.

Rapat ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan operasional, sehingga strategi yang disusun dapat diimplementasikan dengan efektif untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah secara signifikan.

Pada rapat dilaksanakan diskusi berupa pembahasan policy brief mengenai strategi percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di daerah adalah suatu langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah di Indonesia.

Rekomendasi strategi kebijakan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di daerah dilakukan melalui: perbaikan akurasi data p3ke, intervensi pemanfaatan data p3ke di daerah yang belum memanfaatkan, menyiapkan skema bagi masyarakat yang sudah keluar dari garis kemiskinan, melakukan intervensi khusus berdasarkan tingkat kemiskinan berbagai wilayah, memprioritaskan alokasi anggaran untuk percepatan penurunan kemiskinan.



Serba Serbi Agustus

Rapat SOP Melalui Aplikasi SIMSBK

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB di RR Aula BSKDN dipimpin oleh Analis SDM Aparatur Ahli Muda dan dihadiri oleh para perwakilan Pusat maupun Bagian lingkup BSKDN.

Standar Operasional Prosedur ditunggu Bagian SDMO sebelum tanggal 23 Agustus 2024, mengumpulkannya dalam bentuk manual softcopy berupa Ms. Excel atau Ms. Word terlebih dahulu.

Bagian SDMO akan mengirimkan modul SOP melalui Aplikasi SIMSBK ke masing-masing Pusat dan Bagian.



Rapat terkait Puncak HUT RI

Rapat dilaksanakan pkl. 14.00 s.d 16.00 WIB di Ruang Rapat Video Conference BSKDN dipimpin oleh Sekretaris BSKDN dihadiri oleh perwakilan dari Pusat dan Bagian di lingkungan BSKDN.

Rapat membahas persiapan acara puncak peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI dan HUT Kemendagri tahun 2024. Acara bertemakan "Jalan Sehat Semarak Kemerdekaan Indonesia," yang akan dilaksanakan di ancol pada tanggal 24 Agustus 2024, BSKDN diharapkan berkontribusi melalui partisipasi dalam perlombaan dan Jalan sehat.

Rapat ditutup dengan penekanan pentingnya acara ini sebagai momen strategis untuk menunjukkan peran BSKDN dalam mendukung giat Kementerian Dalam Negeri.



Serba Serbi Agustus

Pembahasan Capaian Kinerja dan Prestasi Tahun 2020 s.d 2024 dan Semester I Tahun 2024, serta Potensi Permasalahan Dalam Pencapaian Kinerja

Prestasi dan Penghargaan atas Capaian Kinerja Kemendagri TA. 2020

- Meraih penghargaan pada kategori informatif dalam keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2020, dari Komisi Informasi Pusat
- Top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2020 dengan judul inovasi 'I-POP Indonesia Population and Civil Registration Map dari Kementerian PAN & RB
- Penghargaan assesment center Kementerian dalam negeri dalam pengakuan kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi
- Penghargaan Penerapan Sistem Merit ASN dengan katagori sangat baik
- Top Penanganan Covid-19

Capaian IKU BSKDN Tahun 2020-2024, Capaian Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi

- Tahun 2020 tidak ada target

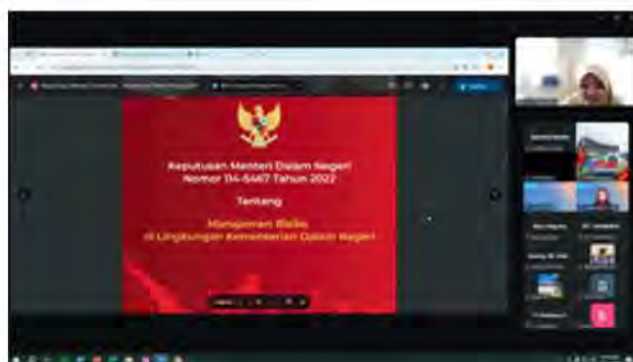
- Tahun 2021 Capaian 65,13 dari target 18%
- Tahun 2022 Capaian 75,46 dari target 24%
- Tahun 2023 Capaian 74,53 dari 30%
- Tahun 2024 Capaian Akhir Tahun dari 36%

BSKDN sudah menyampaikan Laporan Evaluasi Renstra namun belum ttd pimpinan

- Catatan dalam evaluasi renstra Tahun 2020-2024
- Indikator Kinerja yang telah dirumuskan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil
- Target kinerja belum sepenuhnya selaras dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya
- Indikator pada IKU belum sesuai dengan tingkat kinerja sehingga pengukuran capaian tetap sasaran
- Penyusunan dokumen Manual Indikator Kinerja harus ditetapkan regulasi seperti Kepmendagri/Lampiran Renstra

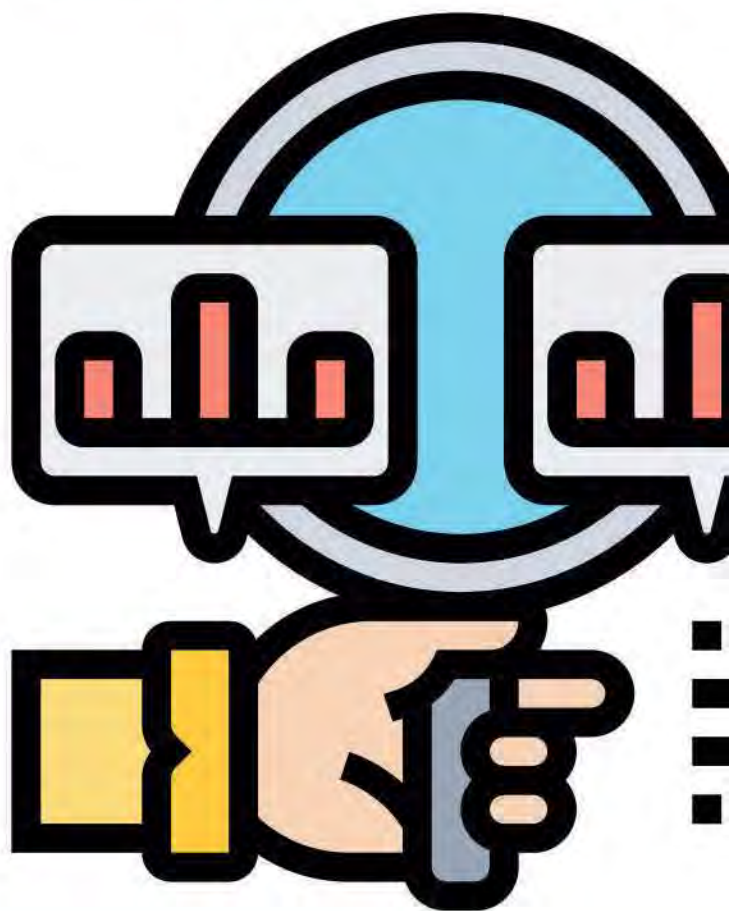
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 lingkup Kemendagri

Rapat dilaksanakan pkl. 09.00 s.d 12.00 WIB via zoom meeting dipimpin oleh Perencana Ahli Muda Monev Biroren, dihadiri oleh perwakilan UKE I lainnya lingkup Kemendagri.



Biro Perencanaan akan mengendakan sosialisasi atau workshop manajemen risiko di level Pimpinan.

Manajemen risiko penting karena dapat mengidentifikasi risiko terlebih dahulu secara strategis dan operasionalnya. Agar semua UKE I dapat meningkatkan manajemen risiko dan kualitas risiko untuk program dan kegiatan masing-masing UKE I.



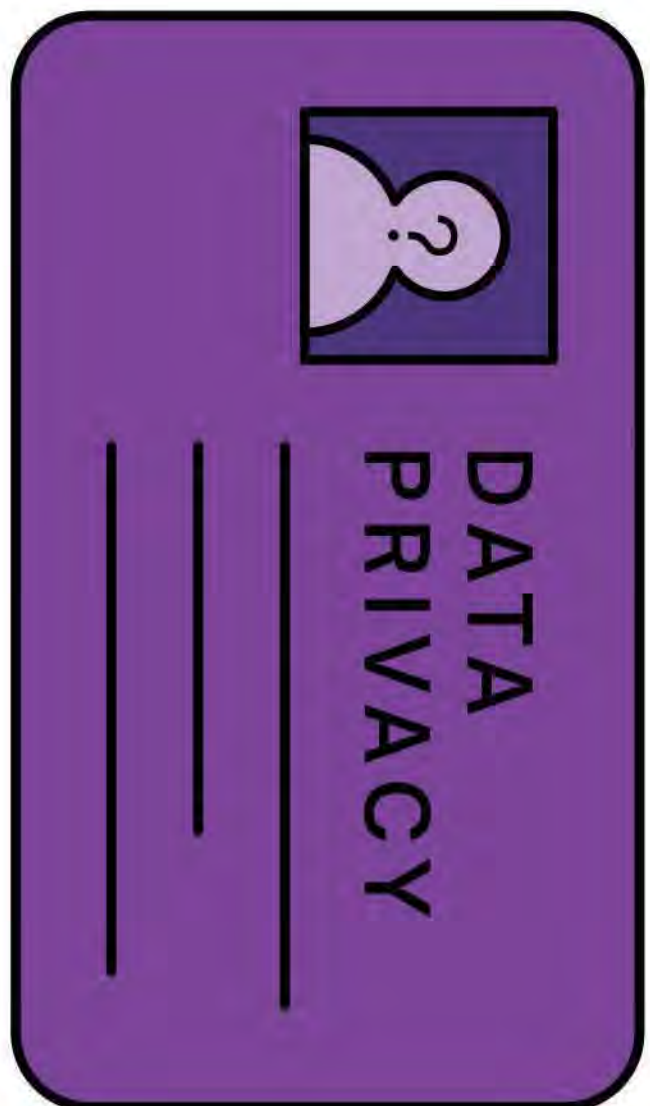
Serba Serbi Agustus

Rapat Finalisasi Data Pokok Kemendagri Tahun 2023

Rapat dilaksanakan pkl. 09.00 s.d 12.00 WIB di ruang rapat Pusdatin dipimpin oleh tim penyusunan Buku Data Pokok Kemendagri, dan dihadiri oleh Ditjen Dukcapil, Ditjen Otda, Biro Ortala, Biro Keuangan dan Aset, dan IPDN.

Pusdatin melakukan konfirmasi terkait data yang telah disusun dalam format buku Data Pokok Kemendagri.

Bagian Perencanaan telah menyampaikan koreksi terhadap beberapa data yang mewakili kinerja BSKDN. Rapat ditutup dengan penandatanganan dokumen Berita Acara.



Rapat FGD Eksistensi Permendagri No.88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di lingkup Kemendagri

Rapat dilaksanakan di Hotel Santika Premiere BSD pada tanggal 15-16 Agustus 2024 dihadiri oleh perwakilan komponen yang ada di lingkup kemendagri.

Dalam pertemuan yang Eksistensi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Rapat ini membahas eksistensi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013, yang mengatur pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur proses dan mekanisme pembuatan produk hukum serta menetapkan kewenangan pihak-pihak terkait. Selama rapat, dipaparkan mengenai penerapan peraturan tersebut, termasuk keberhasilan yang dicapai dan kendala yang dihadapi. Diskusi menyentuh masalah-masalah yang muncul serta saran untuk perbaikan.

Biro Hukum melakukan overview beberapa rancangan PUU dan menemukan masukan yang belum dimasukkan. Pada produk hukum berupa kebijakan, Biro Hukum sering kali hanya mencetak tanpa dilibatkan sejak awal. Plh Kepala Biro Hukum memastikan semua dokumen yang masuk ke Biro Hukum akan diproses cepat dan selesai di hari yang sama jika sesuai mekanisme. Analisa risiko terhadap kebijakan juga diperlukan untuk memilih risiko yang paling minimal.

Kami berharap langkah-langkah ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan serta koordinasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



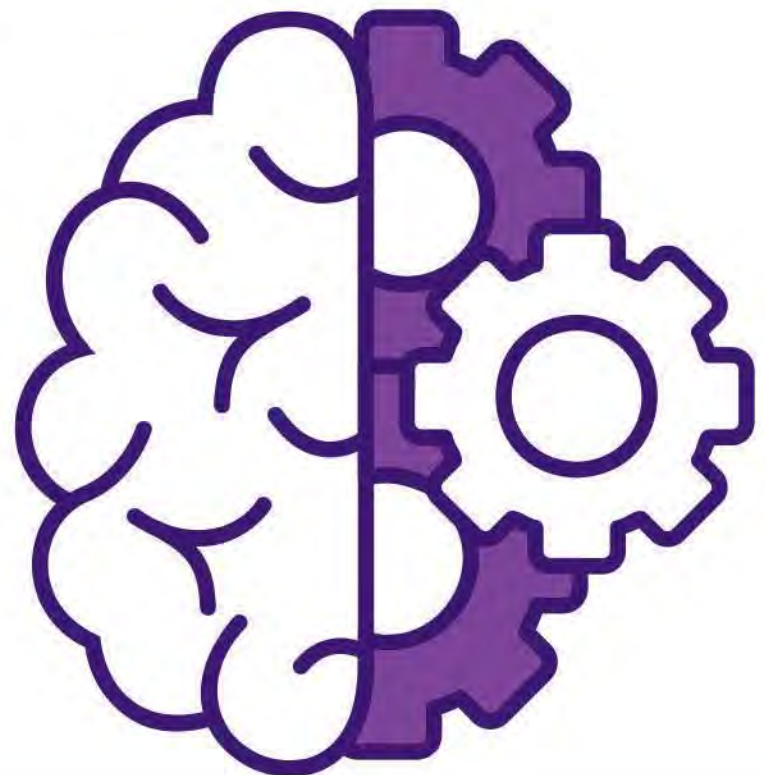
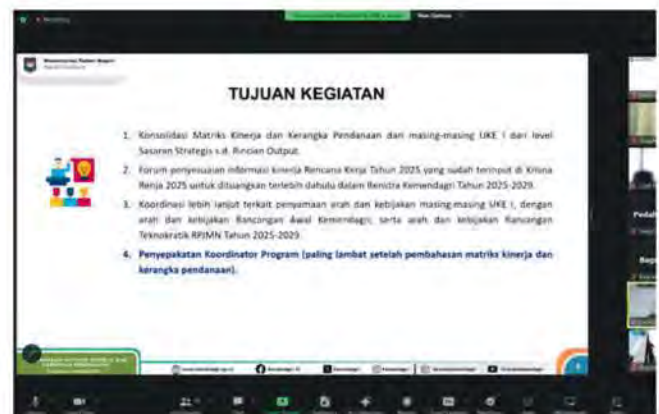
Serba Serbi Agustus

Rapat Pengarahan dan Pembukaan Pembahasan Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ranwal Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

Rapat dilaksanakan pkl. 09.00 s.d 12.00 WIB melalui zoom meeting, dipimpin oleh Kabag Program Biro Perencanaan Setjen Kemendagri, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh UKE I lingkup Kemendagri.

Biro Perencanaan memberikan saran bagi seluruh UKE I Kemendagri untuk dapat Menyusun rancangan Renstra masing-masing UKE I.

Seluruh UKE I diminta untuk mengkonfirmasi ulang rancangan tata Lembaga ke Biro Ortala sebelum dokumen Renstra Kemendagri disahkan. Pembahasan matrik kinerja akan dilakukan secara bergantian masing-masing UKE I lingkup Kemendagri.



Rapat Pembahasan Program Prioritas Nasional TA.2025

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB di RR Vidcon BSKDN dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan, dihadiri oleh perwakilan Pusat Inovasi dan Staf Bagian Perencanaan.

Rapat pembahasan program Prioritas Nasional TA. 2025 bertujuan untuk pemantapan dan konsolidasi program Prioritas Nasional, antara lain:

- Daerah yang difasilitasi dalam penguatan inovasi Pemdagri
- Daerah metropolitan yang difasilitasi dalam penerapan pilot project inovasi tematik

Setiap kegiatan agar diarahkan ke rancangan arah kebijakan Kemendagri Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Tugas dan Fungsi BSKDN.

Program Prioritas Nasional terkait data dukung berupa TOR dan RAB agar dikuatkan dan dimatangkan setiap detailnya. Pembahasan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran BSKDN TA.2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 bersama Biro Perencanaan.

Bagian perencanaan siap mendukung program Prioritas Nasional TA.2025.



Serba Serbi Agustus

Seminar Analisis Uji Coba Penerapan Penilaian Kabupaten/Kota Bersih

Seminar dilaksanakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa BSKDN. Seminar dilaksanakan pukul 19.45-21.30 WIB, bertempat di Hotel A One, Jalan Wahid Hasyim Nomor 80, Jakarta serta hybrid secara virtual dan diikuti oleh peserta dari perwakilan UKE II lingkup BSKDN dan perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kegiatan ini diisi oleh para narasumber antara lain: Miftahul Ulum, ST, M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang); Dr. Fitri Nurfatriani, S.Hut, M.Si (Koordinator Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air pada BRIN); Dr. Ir. Novrizal Tahar, IPU (Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); Dr. Lina Tri Mugi Astuti, S.E., M.M. (Sekretaris Jenderal IESA). Dihadiri juga oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan.

Kegiatan ini berisikan pembahasan terkait analisis kualitas kebersihan kabupaten/kota dengan variabel dan indikator penilaian kabupaten/kota bersih, sesuai dengan rekomendasi kajian strategis yang dilakukan pada tahun 2023.

Seminar membahas dasar pelaksanaan yang meliputi undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan sampah dan kebersihan daerah. Serta juga dilanjutkan dengan diskusi tentang metodologi dan indikator penilaian untuk kota bersih.

Bagian Perencanaan siap mengawal pelaksanaan kegiatan Penilaian Kota Bersih dalam rangka evaluasi kinerja lembaga dan memastikan kepatuhan internal.



Rapat penyusunan SOP melalui Aplikasi SIMSBK

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB bertempat di ruang Vidcon BSKDN dipimpin oleh Bagian SDMO, serta dihadiri perwakilan dari masing-masing pusat dan bagian lingkup BSKDN.

Dilakukan pembahasan terkait usulan SOP dari masing-masing Pusat dan Bagian.

Telah disusun draft SOP untuk penyusunan rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan FDA untuk didiskusikan bersama lebih lanjut.

usulan SOP terkait kegiatan perencanaan.



Serba Serbi Agustus

Rapat Koordinasi Rencana Kerja BSKDN TA.2025

Rapat dilaksanakan pkl. 11.00 s.d 13.00 WIB bertempat di Command Center BSKDN dipimpin oleh Sekretaris BSKDN dihadiri oleh Perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN.

Rapat koordinasi rencana kerja BSKDN TA.2025 bertujuan untuk pematangan dan konsolidasi rencana kerja pusat dan bagian.

Setiap kegiatan agar diarahkan ke rancangan arah kebijakan Kemendagri Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Tugas dan Fungsi BSKDN.

Perkembangan usulan buka blokir automatic adjustmnet TA.2024 sementara ini masih menunggu surat resmi dari Bapak Mendagri yang disetujui oleh Kemenkeu sebesar Rp.1.001.658.000, berkenaan dengan hal tersebut Pusat dan Bagian agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.

BSKDN tidak diikut sertakan dalam pembahasan buka blokir Automatic Adjustment TA.2024 bersama Kemenkeu, yang mengikuti pembahasan tersebut hanya Biro Perencanaan.



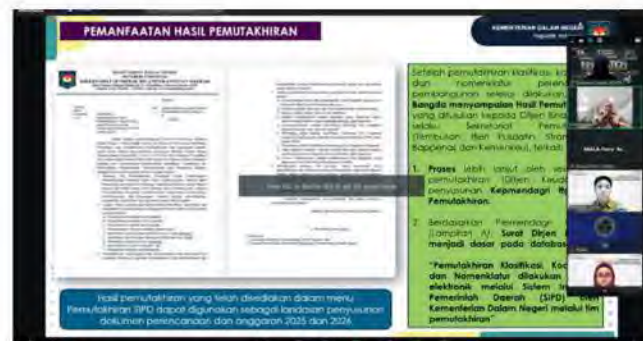
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 melalui SIPD

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 melalui SIPD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pukul 13.30 WIB s.d. Selesai, secara virtual dan diikuti oleh peserta dari perwakilan UKE I lingkup.

Rapat dipimpin oleh Plh. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan di isi oleh Narasumber Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Kegiatan ini berisikan pembahasan terkait Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Hasil Pemutakhiran yang telah di sediakan dalam menu Pemutakhiran SIPD dapat digunakan sebagai landasan penyusunan dokumen Perencanaan dan anggaran 2025 dan 2026. Bagian Perencanaan siap mengawal pelaksanaan kegiatan Penilaian Kota Bersih dalam rangka evaluasi kinerja lembaga dan memastikan kepatuhan internal.



Serba Serbi Agustus

Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan PP Tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Rapat dilaksanakan secara virtual pada pukul 14.00 s.d 16.00 WIB dan dihadiri oleh BRIN selaku pemrakarsa, Kemenristek, Kemenperin, Kemenkes, dan Kemenkumham selaku pimpinan rapat dalam rangka harmonisasi Rancangan PP. Rapat ini merupakan rapat lanjutan yang dimaksudkan untuk menyepakati berbagai aspek dari Rancangan PP tentang Penyelenggaraan IPTEK. Fokus utama adalah pengaturan dan pengawasan sistem pengelolaan IPTEK di Indonesia untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diskusi dimulai dengan pembahasan pengaturan sistem informasi IPTEK, yang meliputi tata kelola penggunaan dan berbagi data. Para peserta rapat sepakat bahwa pengaturan ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan data IPTEK.

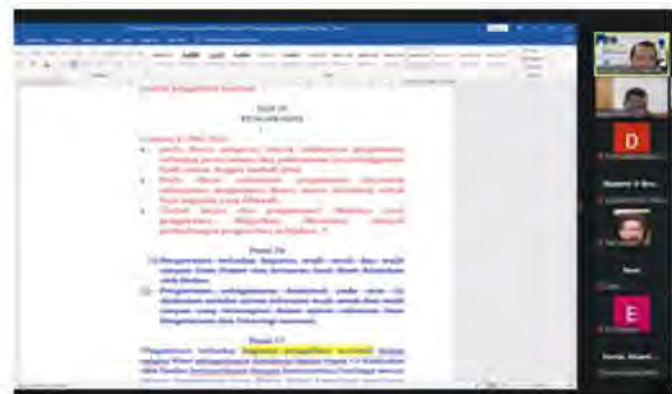
Selanjutnya, dibahas kewajiban untuk menyerahkan dan menyimpan data primer serta hasil riset dari sumber daya manusia dan kelembagaan IPTEK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tersedia untuk kepentingan publik.

Pada Rapat juga dibahas berbagai pasal terkait pengawasan yang perlu dimasukkan dalam Rancangan PP. Pasal 75A mengatur pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan IPTEK sesuai dengan Rencana Induk Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Pengawasan dilakukan dengan frekuensi yang berbeda untuk setiap rencana: sekali dalam 5 tahun untuk Rencana Induk Jangka Panjang, sekali dalam 1 tahun untuk Rencana Induk Jangka Menengah, dan setiap 3 bulan untuk Rencana Induk Tahunan. Juga dibahas rencana pengaturan yang menyatakan bahwa Badan harus melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan penyelenggaraan -

penyelenggaraan IPTEK, termasuk kewajiban simpan data, pengalihan material, riset yang dilakukan oleh lembaga atau individu asing, riset berisiko tinggi, serta alih teknologi. Pengawasan ini dilakukan setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. BRIN juga akan mengatur pengawasan terhadap pengalihan material dari dan ke wilayah Indonesia. Pengaturan ini menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan, dengan metode pengendalian internal, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi.

Rapat ini berhasil menyepakati berbagai aspek penting dari Rancangan PP tentang Penyelenggaraan IPTEK, termasuk pengaturan sistem informasi, kewajiban data, verifikasi metadata, serta mekanisme pengawasan. Diperlukan rapat lanjutan untuk membahas usulan pengaturan tambahan yang dianggap penting untuk memastikan Rancangan PP tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Perencanaan akan terus mengawal dan berdiskusi dengan kementerian/lembaga terkait setiap pasal yang kiranya akan berurusan dengan pelaksanaan Tusi BSKDN untuk memastikan integrasi dan konsistensi dalam peraturan yang akan ditetapkan.



Serba Serbi Agustus

Rapat Fasilitasi Perubahan RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Bangda, Biro Perencanaan, Subdit Wilayah IV PEIPD, Kominfo, dsb;

Pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 mengalami dinamika yang disebabkan antara lain oleh adanya pengaruh kebijakan yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah, serta adanya Penambahan dan/atau pengurangan, penyesuaian program dan kegiatan dan target indikator. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan tahun 2024 melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua Selatan dan Hasil Evaluasi pelaksanaan kinerja sampai dengan Triwulan II serta kebijakan lain yang mempengaruhi adanya perubahan. Selain itu memperhatikan hal-hal, diantaranya :

- hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pembangunan Tahun 2023
- Rencana Kerja Pemerintah pusat (RKP) dan
- Program Strategis Prioritas Nasional, juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang.



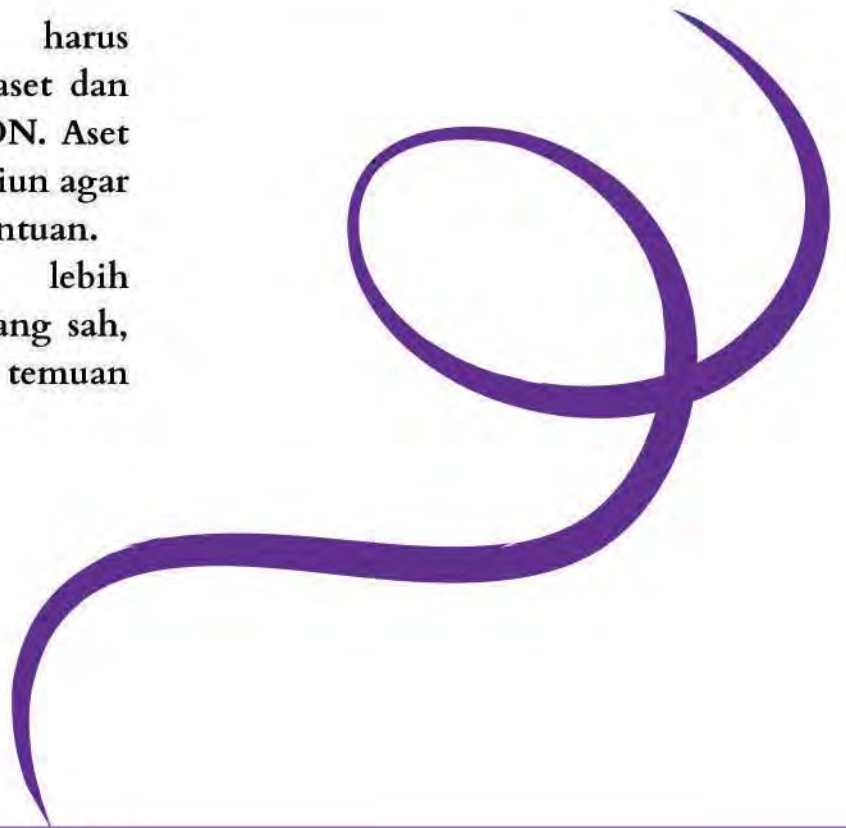


Rapat Tindaklanjut Temuan Itjen Periode Januari - Juni Tahun 2024

Rapat dilaksanakan pkl. 13.30 s.d 16.00 WIB bertempat di Aula BSKDN dipimpin oleh Sekretaris BSKDN dihadiri para perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN.

Rapat tindaklanjut temuan Itjen bertujuan untuk sosialisasi temuan keseluruhan pegawai agar kedepannya tidak terjadi kembali.

Pada pengelolaan aset, harus inventarisasi kembali seluruh aset dan tetap dicatat sebagai aset BSKDN. Aset yang masih dipegang oleh pensiun agar tetap ditarik sesuai dengan ketentuan. Perjalanan dinas agar lebih memperhatikan administrasi yang sah, jangan sampai menjadi temuan kedepannya.



Serba Serbi Agustus

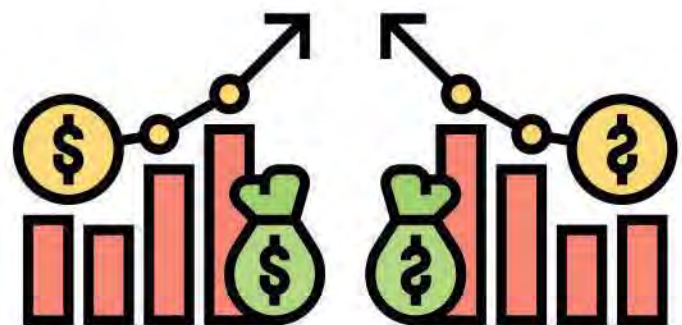
Rapat Persiapan Penyusunan RKA/KL Pagu Alokasi Anggaran

Rapat dilaksanakan pukul 09.00 WIB melalui zoom meeting yang di hadiri oleh seluruh komponen Kemendagri .

Pagu Per 9 Agustus 2024 Kemendagri berjumlah Rp. 5,100 Triliyun. Realisasi Anggaran Kemendagri per 23 Agustus 2024 sebesar 43,26% dan Peringkat ke 17 dari 20 K/L dan Total Pagu Anggaran Kemendagri TA.2025 sebesar Rp 4.784.228.518.000,-

Pemenuhan Alokasi Dasar yaitu kebutuhan anggaran untuk biaya operasional satker yang mendasar, penyediaan dana untuk pelaksanaan pelayanan publik, kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan anggarannya bersumber dari pinjaman dan /atau hibah, kebutuhan anggaran untuk kegiatan atau keluaran berlanjut, penyelesaian pekerjaan tahun sebelumnya & penyelesaian kewajiban pada pihak ketiga, penyediaan dana untuk penyelesaian tunggakan dan penyediaan dana untuk program prioritas nasional

Kebijakan Perencanaan Penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun berkenaan yang tercantum dalam SEB pagu indikatif / SEB pagu anggaran dan alokasi anggaran dan kebijakan di bidang perencanaan anggaran seperti Clearance Belanja TIK , Konsolidasi Satker , Pembatasan Belanja tertentu, Standardisasi KRO dan Daftar Program & Kegiatan.





Rapat Penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Aplikasi Puja Indah

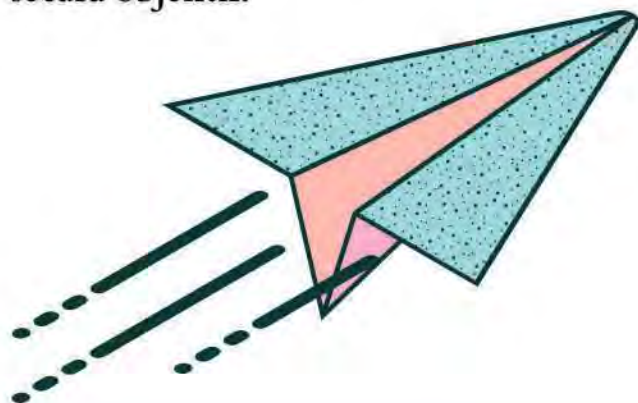
Penandatanganan Pernyataan Komitmen Aplikasi Puja Indah diselenggarakan oleh Pustrajak Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemdagri (Pusat 4) BSKDN di Lumire Hotel & Convention Center, Jl. Senen Raya Nomor 135 Jakarta Pusat, juga disiarkan secara virtual melalui kanal Youtube

tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; juga relevan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

penyelenggaraan kegiatan ini ditujukan guna meningkatkan komitmen Kemendagri melalui BSKDN dan Pemerintah Daerah dalam penerapan aplikasi Puja Indah, yang mencakup 15 layanan, yang terdiri atas 12 Layanan Pemerintahan (Trantibumlinmas, Pariwisata, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan,

Aspirasi, Ketenagakerjaan, Komoditas, Perizinan); 4 Layanan Tematik (e-Bumdes, Validasi Data Kemiskinan, Pendapatan Daerah, e-ternak). Pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk sharing pengetahuan dan pengalaman dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan pemerintahan

Peserta Penandatanganan Pernyataan Komitmen dilakukan oleh 30 Bupati/Wali Kota dari berbagai daerah pilihan di Indonesia. Bagian Perencanaan siap mengawal keberlanjutan pembinaan inovasi daerah yang sistematis dan terukur secara objektif.



Serba Serbi Agustus

Rapat Pembahasan Implementasi Ruang Lingkup Kerja Sama dengan Kompas TV

Rapat dilaksanakan di Ruang Command Center pada pukul 08.30 s.d 11.00 dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing Bagian dan pejabat fungsional Analis Kebijakan Pustrajak Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemdagri (Pusat IV) BSKDN, serta Tim News Directorate Kompas TV yang dipimpin oleh Sdr. Yogi Nugraha

Pada rapat dilaksanakan diskusi terkait implementasi ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama pada 12 Desember 2023, terutama yang berkaitan dengan publikasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan inovasi pemerintahan dalam negeri. Disampaikan oleh Tim Kompas TV, bahwa kuota 10% siaran lokal merupakan amanat Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mewajibkan setiap stasiun televisi nasional menyiarkan konten lokal atau daerah

dengan tidak membatasi pada pengkhususan topik tertentu, termasuk inovasi daerah, sehingga alokasi 10% siaran lokal merupakan himpunan dari beberapa muatan siaran, namun demikian Kompas TV mengalokasikan beberapa segmen dalam 10% tersebut untuk mengupas dan mengangkat konten seputar inovasi yang dilaksanakan pemerintah daerah

Tim Kompas TV memaparkan rencana kegiatan penganugerahan kepada daerah pada Perayaan Hari Ulang Tahun Kompas TV yang akan dilaksanakan pada 11 September 2024 yang dirangkaikan dengan gala diner dan mengundang para Menteri dan pejabat negara. Penganugerahan tersebut dibagi dalam beberapa kategori di antaranya: kategori daerah dengan pengendalian inflasi yang baik, daerah dengan inovasi sektor ekonomi kreatif terbaik, daerah dengan pelayanan publik dan keterbukaan informasi terbaik.

Adapun rencana diundangnya Bapak Mendagri dalam acara tersebut adalah sebagai pemberi penghargaan kepada daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah dengan pengendalian inflasi yang baik. Dari perkembangan diskusi juga akan dipertimbangkan penganugerahan kepada Bapak Mendagri selaku koordinator pengendali inflasi di daerah dengan koordinasi yang intens dan rutin dilaksanakan pada setiap Rakor di hari Senin setiap minggunya.

Hasil diskusi disepakati bahwa Senin, 2 September 2024 direncanakan bahwa Tim Kompas TV siap untuk menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Bapak Menteri.



Serba Serbi Agustus

Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Rapat dipimpin oleh Plh Direktur PEIPD bersama dengan Kepala BAPPEDA Maluku Utara dan Sekretaris Daerah Maluku Utara; dan dihadiri oleh perwakilan dari Bangda, Biro Perencanaan, Subdit Wilayah IV PEIPD, Kominfo Perpusnas, Kemenparekraf dsb;

Ruang lingkup Perubahan RKPD meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, penambahandan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan , menjaga legitimasi kegiatan baru dalam perubahan RKPD Provinsi

Perubahan RKPD Provinsi Maluku Utara di lakukan pada BAB I terkait dengan latar belakang perubahan , pada BAB II Evaluasi sampai dengan tahun berjalan, pada BAB III berkaitan dengan perubahan keuangan daerah, BAB V kerangka pendanaan dan BAB penutup

Terjadi perbedaan yang signifikan antara asumsi RKPD 2024 dan asumsi APBD 2024 dalam proses penganggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan perubahan RKPD

Perubahan RKPD Maluku Utara tidak merubah asumsi makro secara target kinerja utama dan target kinerja daerah yaitu Indeks pembangunan manusia (70,11), Tingkat Kemiskinan (6,19%), Tingkat pengangguran terbuka (3,96%), Laju pertumbuhan ekonomi (15%), Pendapatan per kapita (Rp Juta) (33,10) dan Indeks rasio Gini (0,278)





Rapat Pembahasan RKA-K/L PAA BSKDN TA.2025.

Rapat dilaksanakan di Room Meeting Grand Orchardz pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 08.30 wib s.d 16.30 wib dan dihadiri oleh perwakilan Biro Perencanaan Subbag Anggaran Biro Perencanaan Setjen Kemendagri, perwakilan masing-masing Pusat dan Bagian dan Pejabat Fungsional,

Pelaksanaan rapat dilaksanakan pembahasan terkait RKA-K/L PAA BSKDN TA.2025 dimana Secara umum catatan dari penelitian, yaitu masih terdapat KRO pada RKA-K/L di Sakti yang belum sesuai dengan Renja di Krisna, sehingga terdapat perbedaan antara nomenklatur yang belum tertarik dari Renja di Krisna ke Sakti maupun terdapat perbedaan volume dan target, dan SBM dikarenakan proses input Pagu Indikatif ke Pagu Anggaran serta dalam menuju Pagu Alokasi Anggaran akan disesuaikan dengan usulan dan pembahasan terbaru.

Terkait tahapan penyusunan pedoman strategi kebijakan untuk disesuaikan kembali sesuai dengan pedoman -

rekomendasi strategi kebijakan yang sudah disahkan dalam kepmendagri pedoman BSKDN maka daripada itu bagiann perencanaan bskdn akan mengkoordinasikan dengan bagian program biroren kemendagri dan bappenas untuk penyesuaian Sub Komponen, KRO, RO yang mana harus merubah KRISNA dan Input SAKTI agar tidak mengganggu proses input RKA-K/L PAA Kemendagri TA.2025

Hasil diskusi disepakati dengan bagian anggaran biroren kemendagri bahwa terkait point 3 agar disesuaikan kembali baik KRISNA dan SAKTI terkait penyusunan rekomendasi strategi kebijakan (output BSKDN) agar di pedomani sesuai dengan pedoman rekomendasi strategi kebijakan yang sudah disahkan dalam kepmendagri pedomasn BSKDN pada tanggal 8 Juli 2024 sementara penyusunan RKA-K/L BSKDN TA.2025 sudah berjalan mulai reviu baseline anggaran 2025 dari bulan february hingga sampai tahap pembahasan PA-PAA.

Serba Serbi Agustus


Rapat Pembahasan Lanjutan Rencana Kerja Sama dengan SKALA

Rapat dilaksanakan di Ruang Command Center pukul 13.30 s.d 16.00, dihadiri oleh Kepala Pustrajak Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa (Kepala Pusat III) BSKDN, perwakilan seluruh Pusat lingkup BSKDN, dan Bagian Perencanaan. Dari SKALA hadir mewakili Team Leader, Sdr. Ishak Sdr. Faisal selaku PIC Tim SKALA untuk BSKDN.

Pada rapat dilaksanakan penyampaian usulan program kerja sama dari BSKDN yang diarahkan pada penguatan kapasitas SDM dalam menyusun strategi kebijakan melalui pelaksanaan workshop, shortcourse, ataupun pemagangan pada lembaga think tank baik di dalam maupun luar negeri. Juga disampaikan usulan kurikulum untuk skema empat minggu pelatihan yang berfokus pada Metodologi Analisis Kebijakan, Advokasi Kebijakan, Komunikasi Strategi Kebijakan, dan Monitoring serta Evaluasi Kebijakan

Dari Tim SKALA disampaikan bahwa hasil pembahasan ruang lingkup kerja sama yang sebelumnya telah dilaksanakan sudah disesuaikan dengan arah kebijakan SKALA sebagaimana yang disusun oleh Pemerintah Australia sebagai penyandang dana, namun demikian usulan BSKDN yang beririsan dengan program kerja sama SKALA akan dipertimbangkan, termasuk juga dalam bentuk pelaksanaan workshop atau pelatihan bagi para Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi analisis kebijakan (Analisis Kebijakan, Perencanaan, Analisis Hukum, Statistisi, dsb).

Hal ini juga sesuai dengan fokus SKALA dalam pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Analisis Kebijakan dan Pimpinan Daerah. Hal ini selaras dengan fungsi BSKDN sebagai pembina para Analisis Kebijakan terutama kaitannya dalam penyusunan rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri. Disampaikan bahwa skema pelatihan ini akan disusun oleh SKALA.



Pada diskusi disampaikan tiga poin usulan BSKDN yang diutamakan untuk dikerjasamakan dengan SKALA yakni: Penyusunan Database Analisis Kebijakan se-Indonesia, hal ini untuk mendukung monitoring dan pembinaan para analis kebijakan guna mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas; Pelaksanaan workshop para analis kebijakan dan fungsional terkait lainnya dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas perumusan strategi kebijakan melalui penguatan perhitungan indeks-indeks yang diampu oleh BSKDN; dan yang ketiga adalah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Daerah yang diarahkan supaya pengambil keputusan dapat menyusun kebijakan yang berbasis strategi kebijakan dari hasil analisis dan riset yang objektif dan berbasis data yang akurat.

Sebagai hasil rapat disepakati agar usulan-usulan BSKDN untuk didiskusikan secara internal oleh Tim SKALA dan akan dilaksanakan rapat koordinasi lebih lanjut untuk menyepakati irisan ruang lingkup kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak.



Serba Serbi Agustus

Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024

Rapat diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri. Rapat dipimpin oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, dihadiri oleh perwakilan komponen lingkup Kemendagri, Bappenas dan Prov Maluku.

Latar Belakang Perubahan RKPD Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 yaitu Perubahan Kebijakan Nasional. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan/atau Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi.

Dalam upaya mewujudkan misi pembangunan, ada beberapa target yang telah ditetapkan, antara lain pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,11 persen Selain itu, target lainnya yang kini sedang dikejar yaitu menurunkan tingkat kemiskinan pada kisaran 13,01-13,51 persen, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,64-6,03 persen, dan Indeks modal manusia (human capital index) antara 0,52 persen.

RKPD Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku 20 tahun ke depan. Target-target tersebut, telah menetapkan tema pembangunan RKPD Tahun 2025, yakni Penguatan Fondasi Transformasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Beberapa Prioritas Pembangunan Daerah. RKPD tahun 2025 menjadi bagian dari tahapan penguatan fondasi transformasi atau tahapan jangka menengah pertama.



Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur melalui aplikasi SIMSBK Kemendagri

Rapat dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB di Ruang Vidcon BSKDN, dipimpin oleh Bagian SDMO, dihadiri perwakilan dari UKE II lingkup BSKDN. Pada rapat dilakukan pembahasan terkait penyusunan SOP Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan. Bagian SDMO akan melakukan rapat lanjutan untuk membahas terkait SOP Mikro lingkup BSKDN.



Serba Serbi Agustus

Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024

Rapat diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri. Rapat dipimpin oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, dihadiri oleh perwakilan komponen lingkup Kemendagri, Bappenas dan Prov Maluku.

Latar Belakang Perubahan RKPD Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 yaitu Perubahan Kebijakan Nasional. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan/atau Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi.

Dalam upaya mewujudkan misi pembangunan, ada beberapa target yang telah ditetapkan, antara lain pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,11 persen Selain itu, target lainnya yang kini sedang dikejar yaitu menurunkan tingkat kemiskinan pada kisaran 13,01-13,51 persen, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,64-6,03 persen, dan Indeks modal manusia (human capital index) antara 0,52 persen.

RKPD Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku 20 tahun ke depan. Target-target tersebut, telah menetapkan tema pembangunan RKPD Tahun 2025, yakni Penguatan Fondasi Transformasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Beberapa Prioritas Pembangunan Daerah. RKPD tahun 2025 menjadi bagian dari tahapan penguatan fondasi transformasi atau tahapan jangka menengah pertama.



Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Sebagai hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan hormat dilaporkan sbb: Rapat dilaksanakan dihadiri oleh perwakilan dari Bangda, Bapperida papua tengah, bappenas, biro perencanaan, kemenkes, dsb;

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah Pembangunan tahunan Provinsi Papua Tengah Karena adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan. maksud : (1). Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas. Sedangkan tujuannya adalah: (1). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024;

(2). Menjadi landasan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024; (3). Menjadi acuan penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah; (4). Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan

Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, selain disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026, juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP, RIPPP dan RPJM Nasional.

Serba Serbi Agustus

Rapat Pembahasan Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rancangan Awal Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

Rapat dimulai pada pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Biro Perencanaan Setjen Kemendagri, dan dipimpin oleh Bagian Program Biro Perencanaan.

Dalam rapat dilakukan pembahasan terkait matriks kinerja BSKDN dan penyesuaian terhadap Rancangan Awal Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029.

Biro Perencanaan menyampaikan beberapa hal kepada BSKDN sebagai berikut:

- Dalam mendukung kinerja Kemendagri, BSKDN diminta untuk dapat mengawal penyusunan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) bersama dengan Ditjen Bina Bangda
- Ikut mengawal dalam proses revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bersama dengan Ditjen Otda Kemendagri
- Proses revisi Permendagri IPKD diharapkan dapat selesai pada tahun 2025

- BSKDN diharapkan dapat mengawal usulan IKU Kemendagri baru tentang "Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri" bersama dengan beberapa UKE I Kemendagri
- BSKDN perlu melakukan revisi beberapa nomenklatur indikator kinerja untuk berfokus pada outcome

Bagian Perencanaan akan melakukan pembahasan secara internal melibatkan UKE II lingkup BSKDN.





Rapat Pemberian Satyalancana di Lingkungan BSKDN

Acara penyerahan pin dan sertifikat Satyalancana dilaksanakan di Aula BSKDN pukul 14.00 WIB untuk pegawai yang telah mengabdikan selama 10, 20, dan 30 tahun di lingkungan BSKDN dilaksanakan dengan penuh khidmat. Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala BSKDN yang memberikan penghargaan secara simbolis kepada para pegawai yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi yang luar biasa selama masa kerjanya.

Dalam sambutannya, Kepala BSKDN menekankan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas loyalitas dan kerja keras para pegawai dalam mendukung misi dan visi lembaga. Diharapkan, penghargaan ini menjadi motivasi tambahan bagi para penerima untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik dalam tugas-tugas mereka.

Acara berlangsung dengan lancar dan ditutup dengan ucapan terima kasih dari Kepala BSKDN kepada seluruh peserta dan penerima penghargaan.



Serba Serbi Agustus

Rapat Pembahasan Buku Panduan Program Review dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Rapat dilaksanakan oleh Pustrajak Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (Pusat II) BSKDN bertempat di Ruang Video Conference pkl 15.00 s.d 16.45, dipimpin oleh Plh. Kapus II dan dihadiri oleh Tim YNS yang dikoordinir oleh Sdr. Eka Simanjuntak

Pada rapat dilaksanakan diskusi terkait pembahasan isi draf PKS dengan ruang lingkup seputar peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan termasuk pelaksanaan kegiatan kolaboratif berupa seminar maupun lokakarya. Pada rapat dilaksanakan diskusi dan sharing pendapat seputar ketetapan kewajiban Koso Nippon sebagai penyandang dana utama pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah Jepang. Terkait hal ini pihak Koso Nippon memohon waktu untuk melaksanakan diskusi secara internal karena perlu memastikan penyampaian dana dari Pemerintah Jepang

Pada rapat juga telah disampaikan saran terkait redaksional pada beberapa pasal untuk menyesuaikan dengan kaidah dan norma yang berlaku

Bagian Perencanaan siap mengawal implementasi ruang lingkup kerja sama BSKDN dengan YNS dan Koso Nippon termasuk terkait pelaksanaan Program Review





Rapat Pemberian Satyalancana di Lingkungan BSKDN

Acara penyerahan pin dan sertifikat Satyalancana dilaksanakan di Aula BSKDN pukul 14.00 WIB untuk pegawai yang telah mengabdikan selama 10, 20, dan 30 tahun di lingkungan BSKDN dilaksanakan dengan penuh khidmat. Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala BSKDN yang memberikan penghargaan secara simbolis kepada para pegawai yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi yang luar biasa selama masa kerjanya.

Dalam sambutannya, Kepala BSKDN menekankan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas loyalitas dan kerja keras para pegawai dalam mendukung misi dan visi lembaga. Diharapkan, penghargaan ini menjadi motivasi tambahan bagi para penerima untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik dalam tugas-tugas mereka.

Acara berlangsung dengan lancar dan ditutup dengan ucapan terima kasih dari Kepala BSKDN kepada seluruh peserta dan penerima penghargaan.



Serba Serbi September

Rapat Tindaklanjut Kerja Sama antar Kemendagri dan INHA University

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Cendrawasih, Gedung A, Kantor BPSDM Kemendagri pada pukul 09.00 s.d 12.00 dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing Bagian Kerjasama BPSDM, BSKDN, Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekretariat Jendral, Widyaiswara dan Perwakilan dari INHA University

Pada rapat Diskusi dilakukan mengenai program pelatihan yang akan disediakan oleh Inha University. Program ini mencakup pengembangan sistem IT, digital centre, Penggunaan AI(Artificial Intellegent). BPSDM Kemendagri akan berkolaborasi dalam penyampaian materi dan pelaksanaan pelatihan di Indonesia. Selain itu, pengembangan modul untuk pelatihan juga dibahas. Inha University akan menyusun draft modul untuk pelatihan. sementara BPSDM Kemendagri akan memberikan masukan untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan lokal

INHA University dan BPSDM bekerja sama untuk mendapatkan funding dari Pemerintah Korea untuk mendukung pelaksanaan program training dan pengembangan modul/manual book. Jumlah dana yang dialokasikan dan mekanisme pencairan dana dibahas dalam rapat. Dana ini akan digunakan dengan rincian penggunaan dana, seperti biaya pelatihan, pengembangan materi, dan lain-lain. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana akan dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan BSKDN

Rapat dipimpin oleh Analis Kelembagaan (Andi M. Fauzan) perwakilan Bagian SDMO dan dihadiri oleh perwakilan pusat-pusat dan bagian-bagian.

Rapat dipimpin oleh Analis Kelembagaan (Andi M. Fauzan) perwakilan Bagian SDMO dan dihadiri oleh perwakilan pusat-pusat dan bagian-bagian.

Rapat membahas SOP kegiatan yang ada di masing-masing Pusat Strategi Kebijakan. Hasil pembahasan disepakati bahwa ada 2 SOP untuk semua pusat:

- SOP Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
- SOP Pelaksanaan Analisis Aktual

Ditambah masing-masing 1 SOP dari Pusat I, II dan III (SOP pelaksanaan pengukuran indeks masing-masing pusat) dan 8 SOP dari Pusat IV (SOP kegiatan inovasi daerah), Sehingga SOP yang akan diusulkan dari Pusat-pusat berjumlah 13 SOP.



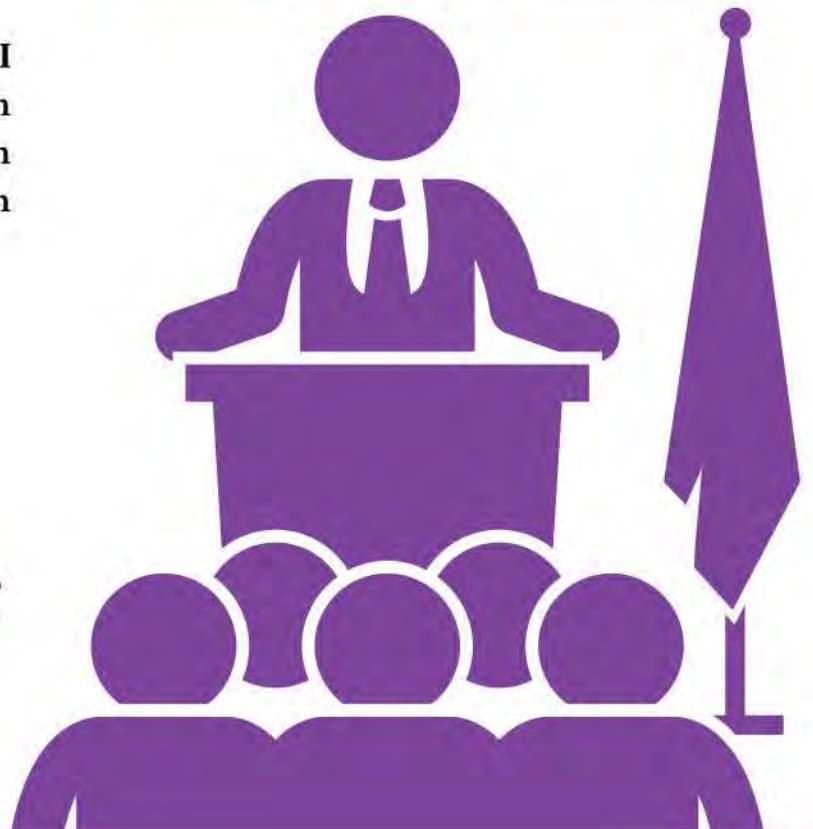
Serba Serbi September

Rapat RDP Kemendagri bersama Komisi II DPR dengan agenda pembahasan RKA KL Pagu Anggaran TA.2025

Rapat RDP dimulai pada pukul 10.30 WIB, dipimpin oleh Komisi II DPR RI, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri, DKPP, BNPP, dan OIKN.

Dilakukan paparan oleh Bapak Sekjen Kemendagri terkait Pagu Anggaran dan Rencana Kegiatan Kemendagri TA.2025.

Anggota Komisi II DPR RI memberikan 2 pertanyaan yang akan direspon BSKDN dan disampaikan kepada Biro Perencanaan Setjen Kemendagri



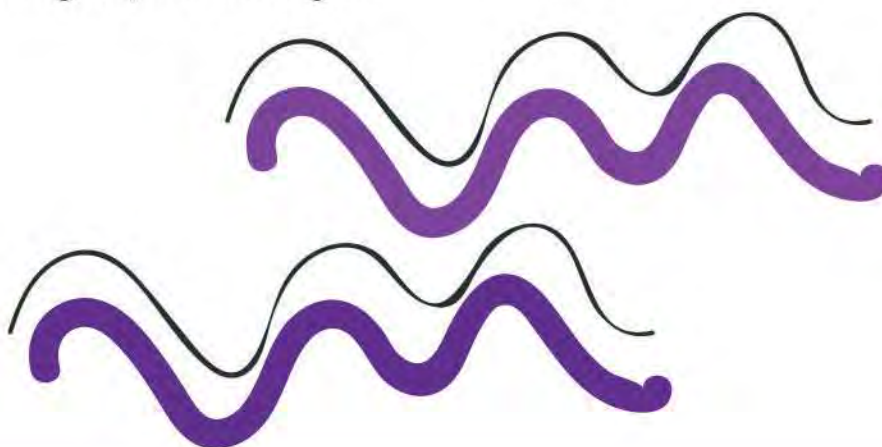


Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Aceh Tahun 2024

Rapat dilaksanakan, dihadiri oleh perwakilan dari bappeda aceh, Biro Hukum, Biro Perencanaan, Kominfo.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPA Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, program prioritas nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan RKPA dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan RKPD meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengacu pada surat Kepala Bappeda Aceh, Tmi Inspektorat Aceh melakukan reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPA Tahun 2024. Reviu dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.



Serba Serbi September

Rapat Reviu RKA Pagu Anggaran 2025

Rapat dilaksanakan pkl 10.00 WIB s.d selesai sesuai dengan surat tugas Itjen no. 700.1.2/1077-ST/IJ dalam rangka Reviu RKA-k/l BSKDN 2024, dalam hal ini di hadiri oleh tim reviuw Itjen apip wilayah 3 dengan tim bagian perencanaan (ppa);

Rapat Reviu dengan itjen terkait pagu alokasi anggaran bskdn 2025 secara umum sudah diakomodir terkait catatan dari biro perencanaan mulai dari review baseline, pagu indikatif, pagu alokasi, dan pagu alokasi anggaran, dalam hal ini tim itjen atau apip wilayah 3 masih fokus dalam penelahaan dan penyesuaian target agar tetap sesuai dengan TOR dan RAB yang diusulkan dalam penyusunan pagu alokasi anggaran bskdn 2025

BSKDN telah memastikan RKA-K/L PA menuju PAA TA.2025 yang disusun telah memperhatikan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, dan apabila terdapat pengalokasian anggaran yang melampaui standar biaya yang berlaku dan Penelitian dilakukan berdasarkan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat administratif, BSKDN menjamin keabsahan dan kebenaran atas seluruh dokumen data dukung yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan

Pada dasarnya bagian perencanaan siap dan tetap mengawal proses penyusunan pagu alokasi anggaran BSKDN tahun 2025 secara administratif dan memperhatikan target agar sesuai dengan tugas dan fungsi BSKDN.





Rapat Penelaahan Usul Revisi Pembukaan Blokir Automatic Adjustment dan Pergeseran Anggaran Lingkup Kemendagri TA 2024

Rapat dilaksanakan pkl.13.30 s.d 16.00 WIB melalui virtual teams.microsoft.com dipimpin oleh Kassubid Kemenkeu dihadiri oleh Kemenkeu, Biro Perencanaan Kemendagri serta perwakilan dari BSKDN (Sekretaris BSKDN, tim bagian perencanaan PPA) dan perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri.

Rapat penelaahan usulan pemanfaatan buka blokir automatic adjusment TA.2024 dan revisi anggaran TA.2024 bertujuan untuk koordinasi pemanfaatan usulan buka blokir automatic adjusmnet TA.2024 dan tidak dapat dialokasikan ke RO lain karena izin prinsip dari Menteri keuangan sifatnya mengikat berdasarkan dengan target 79RO yang sudah di tetapkan dalam mendukung Program Indonesia Maju.

Revisi automatic adjusment hanya untuk revisi buka blokir saja, apabila ada usulan revisi diperbolehkan dengan mempertimbangkan tidak mengganggu proses pelaksanaan revisi buka blokir AA dikarenakan sifatnya bersamaan dengan usulan UKE-I lain tetapi lebih baik untuk diakomodir untuk revisi internal setelah DIPA blokir turun, dan bila ada usulan baru yg urgent untuk diusulkan kembali pada selanjutnya dengan media akomodir yaitu di setjen biro perencanaan kemendagri

BSKDN sudah melengkapi data dukung yang diperlukan dalam pemanfaatan buka blokir automatic adjustment Tahun 2024. Apabila mengusulkan kembali buka blokir automatic adjusment tahap II agar lebih memperhatikan kegiatan usulan baru dalam mendukung program prioritas kemendagri.

Serba Serbi September

Rapat Reviu RKA Pagu Anggaran 2025

Rapat diskusi dengan BPK dimulai pada pukul 09.00 WIB, dipimpin oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan III, dan dihadiri oleh Tim BPK dan perwakilan dari BSKDN Kemendagri.

Pusat Strategi Kebijakan III menyampaikan paparan terkait tuisi BSKDN dalam penyusunan rekomendasi strategi kebijakan dan materi teknis terkait capaian kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Tim BPK menyampaikan beberapa pertanyaan terkait IPKD untuk menggali informasi terkait teknis pelaksanaan IPKD Tim BPK akan berkoordinasi dengan Pusat Strategi Kebijakan III apabila ada pertanyaan lebih lanjut yang belum tersampaikan di rapat diskusi



Kegiatan Internalisasi BerAKHLAK dan Peningkatan Kapasitas ASN Kementerian Dalam Negeri

Kegiatan ini dilaksanakan pukul 09.00 s.d 11.00 WIBdi Gedung F Lt.3 Kemendagri yang dibawakan oleh Coach Rudi dan diikuti seluruh ASN dan non ASN lingkup BSKDN dan Itjen Kemendagri.

Kegiatan Internalisasi Core Values BerAKHLAK dan Peningkatan Kapasitas ASN Kemendagri dan BNPP bertujuan agar memegang core values BerAKHLAK dan dapat dimaknai dengan baik oleh setiap ASN.

Dalam kegiatan tersebut membahas terkait Fixed Mindset vs Growth Mindset. Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya adalah orang-orang dengan fixed mindset beranggapan kalau bakat dan inteligensi bersifat tetap dan tidak bisa berubah, sedangkan growth mindset menganggap bakat dan inteligensi masih bisa berkembang.



Serba Serbi September

Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024

Rapat diskusi dengan Biro Perencanaan dimulai pada pukul 13.00 WIB, dipimpin oleh Perencana Ahli Muda Biroren Kemendagri, dan dihadiri oleh beberapa perwakilan dari UKE I lingkup Kemendagri.

Biro Perencanaan menyampaikan paparan terkait pemenuhan materi pendukung untuk sebagai bahan masukan UKE I terhadap evaluasi Renstra Kemendagri 2020-2024.

Bagian Perencanaan akan menindaklanjuti kebutuhan data tersebut dan menyampaikannya kembali kepada Biro Perencanaan di minggu ke-2 bulan September 2024.



Seminar Analisis Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Pelayanan Publik

Seminar dilaksanakan di Grand Dafam Ancol. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pustrajak Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN. Bapak Kepala BSKDN membuka acara secara resmi dan memberikan sambutan sebagai keynote speaker. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya KIA sebagai alat untuk mempermudah pemberian layanan publik kepada anak-anak di bawah usia 17 tahun.

Narasumber dan Materi Seminar menghadirkan dua narasumber utama: Prof. Triyuni Sumartono dari Universitas Prof. Moestopo, yang membahas peran KIA dalam integrasi data dan pencatatan anak, serta manfaatnya dalam pendataan sekolah dan penyaluran bantuan; serta Dr. Agustina Situmorang dari BRIN, yang menguraikan hasil penelitian terkait pemanfaatan KIA dalam pelayanan publik dan rekomendasi untuk implementasinya.

Diskusi seminar menegaskan bahwa KIA sangat diperlukan untuk memudahkan pemberian layanan publik kepada anak-anak. Diharapkan agar Dukcapil dapat mengeluarkan KIA bersamaan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran setiap anak yang baru lahir. Manfaat utama KIA termasuk untuk memudahkan pengelolaan data anak secara terintegrasi untuk berbagai kepentingan administratif, dan untuk mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi data anak di lembaga pendidikan, serta menyederhanakan proses pendistribusian bantuan sosial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.



Serba Serbi September

Rapat Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pkl 10.00 WIB di RR Komisi II Gedung Nusantara DPR RI yang di hadiri oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kemendagri

Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025 sebesar Rp4.784.228.518.000,- (empat trilyun tujuh ratus delapan puluh empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tahun 2025 sebesar Rp89.271.812.000,- (delapan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut :

- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.038.205.856.000,- (dua trilyun tiga puluh delapan milyar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar Rp471.039.306.000,- (empat ratus tujuh puluh satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- Program Tata Kelola Kependudukan sebesar Rp2.119.117.603.000,- (dua trilyun seratus sembilan belas milyar seratus tujuh belas juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- Program Pembinaan Politik — dan Pemerintahan Umum sebesar Rp155.865.753.000,- (seratus lima puluh lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2025 sebesar Rp267.135.531.000,- (dua ratus enam puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut ;

- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp233.632.179.000,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp33.503.352.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).

Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun 2025 sebesar Rp505.534.826.000,- (lima ratus lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :

- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp368.441.452.000,- (tiga ratus enam puluh delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp137.093.374.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan OIKN sebesar Rp27.814.516.000.000,- (dua puluh tujuh trilyun delapan ratus empat belas milyar lima ratus enam belas juta rupiah), dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) OIKN tahun 2025 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.



Serba Serbi September

Asistensi dan Supervisi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Wilayah IV

Rapat dilaksanakan di Royal Palm Hotel & Conference Center, dihadiri oleh perwakilan dari Bangda, Bapperida NTT, Bappenas, Kementerian Pertanian, biro perencanaan, dsb.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD NTT Tahun 2005 – 2025, visi pembangunan jangka panjang NTT tersebut belum sepenuhnya terwujud, akan tetapi secara materiil, maknanya dipandang koheren dengan Visi Indonesia Emas Tahun 2025 – 2045. Karena itu, di dalam RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045, cita-cita mewujudkan NTT yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap dipertahankan maknanya dengan sejumlah penyesuaian agar konsisten dan merupakan penjabaran Visi Indonesia Emas Tahun 2025 – 2045 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud, dipandang penting untuk menelaraskan kandungan makna dalam rumusan visi Pembangunan jangka panjang NTT dan Nasional, mengakomodasi kebijakan nasional untuk Provinsi NTT, dan sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan arah pembangunan jangka panjangnya. Karena itu RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045 bersifat makro, dan tetap mempedomani substansi pembangunan sektoral sebagaimana ditetapkan di dalam RTRW Provinsi NTT. Selain itu, untuk kepentingan perencanaan jangka menengah, RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045, menjadi dasar bagi Kepala Daerah terpilih untuk menyusun dan menetapkan RPJMD pada periode kepemimpinannya



Disamping itu, di dalam menjalankan amanat Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang - Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka proses penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 dianggap penting di dalam mendukung rencana pembangunan nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045.



Bagian Perencanaan siap mendukung Asistensi dan Supervisi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Wilayah IV demi kesuksesan dan kelancaran mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terpadu di seluruh provinsi.



Serba Serbi September

Asistensi dan Supervisi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Wilayah IV

Rapat dilaksanakan di Royal Palm Hotel & Conference Center, dihadiri oleh perwakilan dari Bangda, Bapperida Papua Barat Daya, Bappeda Papua Barat, Bappenas, Kementerian Pertanian, biro perencanaan, BSSN dsb

Dengan memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan serta permasalahan-permasalahan yang ada, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 bertujuan untuk:

- memberikan pedoman umum bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2024 utamanya menyangkut perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024;
- memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024; memberikan pedoman bagi Penyesuaian perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024
- melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan sebagai pedoman dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- memberikan pedoman bagi Penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
- melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku; dan



- sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua Barat

RKPD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun pertama di dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Tema pembangunan tahun 2024, yaitu “Penataan Suprastruktur Pemerintahan, Normalisasi Birokrasi, dan Peningkatan Harmoni Sosial Guna Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan ”Posisi RKPD Tahun 2024 sangat strategis untuk menjabarkan RPD dan menjaga efektivitas pembangunan di masa transisi. Tema dan prioritas RKPD tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan RKP tahun 2024. RKP tahun 2024 memiliki tema “mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan RKP 2024 berupa pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,-

penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan pemilu 2024.



Serba Serbi September

Rapat Penajaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ranwal Renstra Kemendagri 2025-2029.

Rapat dilaksanakan pkl 10.00 s.d 15.30 WIB di RR Biro Perencanaan Setjen Kemendagri yang dihadiri oleh Plt. Kepala Biro Perencanaan dan seluruh perwakilan Kabagren, staff bagian perencanaan UKE-I Kemendagri;

Adapun maksud dan tujuan rapat adalah Konsolidasi dan finalisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Rancangan Awal Renstra Kemendagri Tahun 2025 -2029

Adapun masukan BSKDN terhadap ranwal renstra kemendagri TA.2025-2029 yakni:

Visi : Kemendagri yang Berorientasi kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, dan Inovatif (BerAKSI) sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas 2045

Adapun Misi Ranwal Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029 dibagi menjadi 4 kluster masing” UKE-I, diman BSKDN masuk ke Tata Kelola Pemerintahan dalam negeri, termasuk pengawasa pemdagri dengan UKE-I lain (AWIL, BANGDA, KEUDA, OTDA, PEMDES, ITJEN, BSKDN)

Adapun ranwal renstra Sasaran Strategis (SS) BSKDN TA. 2025-2029 ada di (T2-SS2) “Meningkatnya kualitas strategi kebijakan dalam kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinas”

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) BSKDN dalam ranwal renstra kemendagri tahun 2025-2029 “Indeks Kualitas Rekomendasi Strategi Kebijakan”



Rapat Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2024

Rapat diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendagri, dihadiri oleh perwakilan komponen lingkup Kemendagri,

Dalam upaya meningkatkan nilai RB Pusdatin menghimbau untuk menyusun SK TIM SPBE per unit Eselon I, Kemendagri akan menargetkan menjadi level 5. BSKDN sedang menyusun draft SK TIM SPBE yang akan diserahkan pada tanggal 13 September 2024

Pelaksanaan tindak lanjut implementasi SE tersebut merupakan bagian dari tugas Kemendagri, secara keseluruhan penerapan SPBE Nasional dengan tujuan integrasi proses bisnis dan pelayanan SPBE di tingkat daerah. Bagaimana proses ini telah disampaikan pentingnya mapping proses bisnis yang tersedia di daerah

Serba Serbi September

Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serta Program Tahun 2024

Rapat dilaksanakan di Aula BSKDN pkl 09.00 WIB yang dipimpin oleh Bapak Kepala BSKDN dan diikuti oleh Bapak Ses BSKDN, Para Kapus dan Sekretariat lingkup BSKDN.

Capaian Kinerja BSKDN s.d September TA. 2024 dengan Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Menteri sebanyak 5 rekomendasi dan Progress Indeks

- IKKD Capaian Triwulan III nya yaitu Pembahasan dengan Bagren dan Biro Hukum untuk Revisi Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang IKKD.
- ITKPD Capaian Triwulan III nya yaitu sudah ditahap Penyusunan Kepmendagri pengukuran ITKPD 2024.
- IPKD Capaian Triwulan III nya yaitu Pelaksanaan Penginputan masih berjalan dan sudah pada tahap Penginputan Regional 9 dari 10 Regional yang melaksanakan Penginputan.

- IID Capaian Triwulan III nya yaitu sudah melaksanakan Rapat Kedua Bimbingan Teknis Validasi Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Rangka Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 dengan Universitas Gadjah Mada, 19 Agustus 2024.

Progress Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran

- Realisasi anggaran BSKDN sebesar Rp. 38.009.977.958 (67,49%) dari total Anggaran Rp. 56.321.248.000
- Realisasi Pusat I sebesar Rp. 1.155.832.115
- Realisasi Pusat II sebesar Rp. 816.289.486
- Realisasi Pusat III sebesar Rp. 953.110.081
- Realisasi Pusat IV sebesar Rp. 1.673.445.752
- Realisasi Sekretariat sebesar Rp. 33.545.330.616



Jumlah pemanfaatan buka blokir anggaran BSKDN sebesar Rp. 1.001.658.000 yang akan segera di realisasikan oleh masing masing pusat dan bagian, dengan rincian kegiatan Prioritas Lainnya Sesuai Tugas dan Fungsi Kemendagri :

- Analisis Komparatif Kepala Daerah (Penjabat dan Definitif) :Rp. 150.000.000
- FDA " Strategi Kebijakan manajemen bencana berbasis partisipasi publik":Rp. 150.000.000
- Kajian Penguatan Sistem Anti Korupsi di Desa: Rp. 150.000.000
- Pengukuran IPKD (Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah):Rp.95.000.000
- Uji coba Aplikasi IKKD (Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah): Rp. 60.960.000

- Kunjungan/Koordinasi DaerahDaerah yang dikunjungi oleh BSKDN hingga saat ini (September 2024) sejumlah 109 Daerah Provinsi/Kab/Kota dan 2 ke Luar Negeri (Korea Selatan dan Jepang) dan
- Daerah yang berkunjung di BSKDN hingga saat (September 2024) ini sejumlah 316 Daerah Provinsi/Kab/Kota dari 38 Provinsi, ada 2 Provinsi yang berkunjung/berkoordinasi ke BSKDN Kemendagri yakni Bangka Belitung dan Yogyakarta, dan yang paling banyak berkunjung/berkoordinasike BSKDN Kemendagri yaitu Sumatera Selatan sebanyak 38 kali



Serba Serbi September

Rapat lanjutan Pembahasan Nota Kesepahaman antara Kemendagri dengan Universitas Airlangga

Rapat diselenggarakan oleh Pusat Fasilitasi Kerjasama (Pusfasker) Setjen Kemendagri secara virtual, dibuka dan dipimpin oleh Kabid Kerja Sama Dalam Negeri, dihadiri oleh tim Universitas Airlangga, perwakilan BPSDM, BSKDN, dan Biro Kepegawaian Setjen

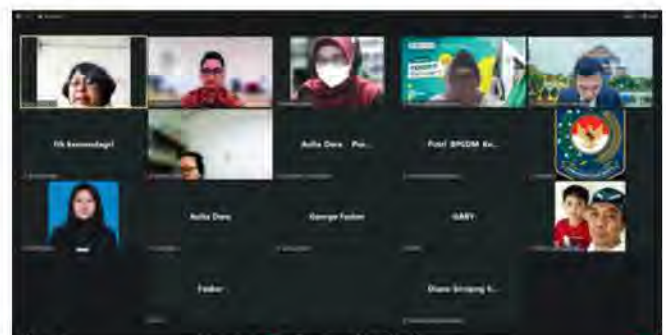
Pembahasan utama rapat berfokus pada kerja sama dalam penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya terkait dengan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kedua pihak sepakat untuk menjalin kolaborasi dalam pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi para ASN.

Beberapa rencana ruang lingkup kerja sama yang dibahas meliputi:

- Rencana pelaksanaan kelas khusus pascasarjana bagi ASN yang akan difasilitasi oleh Universitas Airlangga, dengan pembahasan teknis akan dilakukan bersama Biro Kepegawaian

- Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, workshop, dan program pengembangan lain yang didiskusikan dengan BPSDM;
- Kolaborasi dalam riset dan penulisan naskah akademik serta penyusunan strategi kebijakan yang akan melibatkan BSKDN.

Universitas Airlangga juga mengusulkan pentingnya monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan program kerjasama, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program tersebut;





Rapat Pembahasan Integrasi Aplikasi Sirika Kemendagri dengan Aplikasi e-SAKIP Reviu Kementerian PAN dan RB

Rapat di pimpin oleh Kabag monev Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendagri dan di hadiri seluruh Komponen Lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Integrasi aplikasi sirika Kemendagri diharapkan dapat segera terealisasi dengan aplikasi e-SAKIP reviu Kementerian PAN dan RB sehingga lebih efektif dan efisien dalam penginputan data yang akan di input untuk dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB dan di harapkan nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri kedepannya lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.

Kementerian Dalam Negeri terus berupaya melakukan pengembangan pada aplikasi Sirika Kemendagri dengan menyesuaikan pada menu yang terdapat pada aplikasi e-SAKIP Kementerian PAN dan RB.

Di harapkan implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat terwujud secara optimal dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang transparan demi terwujudnya Indonesia Emas.

BSKDN telah melaporkan dan menginput data kedalam aplikasi e-SAKIP Kementerian PAN dan RB dan telah di riviui oleh tim Itjen Kemendagri

Bagian Perencanaan BSKDN proaktif berkoordinasi dengan Bagian Monev Biro Setjen Kemendagri sebagai upaya dalam mendukung percepatan integrasi antara aplikasi e- SAKIP Kementerian PAN dan RB dengan aplikasi Sirika Kementerian Dalam Negeri.



Serba Serbi September

Rapat Technical Committee Meeting (TCM) Program USAID ERAT

Rapat dilaksanakan di Aula Gedung F, Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dan mengesahkan Rencana Kerja USAID ERAT Tahun Fiskal 2025 (Oktober 2024 - September 2025), sekaligus mengevaluasi implementasi program di tahun 2024

Acara dimulai dengan sambutan dari Direktur USAID Indonesia, Jeremy Meadows, dan Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Dr. Heriyandi Roni. Keduanya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk keberhasilan program ini. Selain itu, disampaikan evaluasi atas pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama implementasi kerja sama di Tahun Fiskal 2024. Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga serta komponen Kementerian Dalam Negeri. Dari BSKDN, Bapak Sekretaris BSKDN, turut hadir langsung

Sesi utama menampilkan paparan Rencana Kerja USAID ERAT Tahun Fiskal 2025 oleh Activity Director, dilanjutkan dengan diskusi yang interaktif dari seluruh peserta. Dalam Renja 2025 ditetapkan BSKDN berperan sebagai implementing agency untuk beberapa inisiatif strategis yang mendukung inovasi daerah. BSKDN akan menjalankan perannya dalam mendukung peningkatan repositori inovasi yang terintegrasi serta memfasilitasi replikasi dan perluasan inovasi di berbagai daerah. Implementasi program ini mencakup pendampingan dalam penguatan innovation hub di tingkat provinsi dan replikasi program inovasi unggulan. Pada akhir pertemuan, Rencana Kerja USAID ERAT TF 2025 resmi disampaikan sebagai pedoman pelaksanaan program di tahun mendatang.

Rapat Pembahasan Teknis IGA di Surabaya bersama BRIDA Prov Jatim

Rapat diskusi dengan BRIDA Prov. Jatim dimulai pada pukul 13.00 WIB, dipimpin oleh Bapak Kepala BSKDN, dan dihadiri Sekretaris BRIDA Prov. Jatim, Pusat Strategi Kebijakan IV, dan Bagian Perencanaan.



Diskusi terkait pembahasan teknis pelaksanaan IGA yang akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 4-5 Desember 2024.

Pusat Strategi Kebijakan IV perlu menyusun konsep pelaksanaan IGA, karena rencana pelaksanaan IGA TA 2024 berbeda dari tahun sebelumnya. Pada minggu ini akan dilaksanakan survei awal lokasi di Surabaya untuk pendalaman konsep IGA.

Serba Serbi September

Rapat Penginputan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Sistem Informasi Arsitektur

Bimtek dimulai pada pukul 09.00 WIB, acara dibuka oleh Bapak Kepala Pusdatin Kemendagri, dan dihadiri seluruh perwakilan UKE I lingkup Kemendagri.

Bimtek terkait penginputan data arsitektur SPBE oleh seluruh UKE I Kemendagri melalui aplikasi yang diakses dari arsitektur.spbe.go.id.

Penginputan arsitektur SPBE disusun berdasarkan dokumen Proses Bisnis lingkup Kemendagri. BSKDN akan melakukan input 7 Proses Bisnis ke dalam arsitektur SPBE.





Rapat Koordinasi SDPDN

Rapat diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendagri, dihadiri oleh peserta daerah dan perwakilan komponen lingkup Kemendagri, dengan narasumber dari Kominfo, BRIN, dan BPS.

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri merupakan upaya menghasilkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki standar. Data tersebut selama ini sudah ada, tetapi harus ditata dan dikelola agar terintegrasi untuk mendukung pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Pengelolaannya dan manajemennya yang satu. Data yang banyak dan terurai, data yang sebetulnya sudah ada kemudian dilihat apakah sudah akurat dan apakah sudah standar. Makanya ini harus kita kerjakan secara lembaga. Setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, Pusdatin akan memfasilitasi dan menghimpun data-data.

Rapat diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendagri, dihadiri oleh peserta daerah dan perwakilan komponen lingkup Kemendagri, dengan narasumber dari Kominfo, BRIN, dan BPS.

Tindak Lanjutnya yaitu antara lain :

- Kementerian/Lembaga/Daerah perlu mempercepat penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan SDI;
- Optimalisasi Forum SDI di K/L/D sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan penyelenggaraan SDI;
- Hasil Forum SDI di K/L/D, khususnya Daftar Data dapat dijadikan dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran terutama terkait dengan dengan Kebutuhan Data Prioritas.
- Integrasi Portal Daerah dapat dilakukan melalui Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) ataupun secara langsung dengan Portal Satu Data Indonesia

Serba Serbi September

Sosialisasi Tata Cara Penilaian dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran KDN TA.2024 dan Penandaan RO yang diwajibkan SBKU pada Aplikasi Monev Kemenkeu

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl 10.00 WIB yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kemendagri dan diikuti oleh seluruh komponen Kemendagri, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.

RO yang diwajibkan menggunakan SBKU sebagai dasar penilaian kinerja perencanaan anggaran TA.2024. Pemetaan RO Unit berdasarkan database awal Kemendagri TA.2024 sebanyak 558 RO. Nilai Kinerja Anggaran Kemendagri per tanggal 12 September 2024 masuk dalam kategori “kurang” (nilai 50 s/d 60) terdiri dari 6,89 nilai kinerja atas perencanaan anggaran (EKA) dan 47,61 nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA).

Penandaan dilakukan pada monev.kemenkeu.go.id menggunakan User KL dengan batas waktu 30 September 2024.

Direktur Jenderal Anggaran telah menetapkan Surat Dirjen Anggaran No. S-154/AG/2024 tanggal 12 Juli 2024 terkait penetapan RO yang diwajibkan menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA.2024 diharapkan seluruh K/L untuk :

- Melaksanakan Anggaran TA.2024 dengan memperhatikan Batas tertinggi pada indeks SBKU sesuai PMK Nomor 113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024
- Mengimplementasi SBKU dan SBKK dalam perencanaan anggaran TA 2025 dengan mempersiapkan RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU dan menyusun SBKK terhadap seluruh RO yang berulang.



Rapat Penginputan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Sistem Informasi Arsitektur

Bimtek dimulai pada pukul 08.30WIB, dan dihadiri seluruh perwakilan UKE I lingkup Kemendagri.

Bimtek terkait penginputan data arsitektur SPBE berdasarkan perubahan Kepmendagri tentang Peta Proses Bisnis Kemendagri. Penginputan arsitektur SPBE disusun berdasarkan dokumen Proses Bisnis lingkup Kemendagri.

BSKDN telah melakukan input 7 Proses Bisnis dasar ke dalam arsitektur SPBE dan 3 proses bisnis perubahan.



Serba Serbi September

Rapat Koordinasi Kerja Sama Pemerintah Daerah / Kemendagri dengan Mitra Luar Negeri

Rapat dilaksanakan di Hotel Orchardz Jayakarta, dihadiri oleh perwakilan dari kementerian sekretariat negara, kemenpanrb, kementerian luar negeri, bappenas, perwakilan tiap pemerintah daerah, fasker setjen, komponen kemendagri dsb

Perencanaan kerja sama daerah harus dilakukan dengan pendekatan THIS (tematik perencanaan kerjasama dg prioritas/program unggulan daerah, holistik pendekatan menyeluruh dan komprehensif, integratif jelas pembagian peranan serta integrasi sumber pendanaan dan spasial lokasi kerjasama yang efisien efektif).

rekomendasi penyelenggaraan kerja sama daerah: 1. Perlunya komitmen dari setiap perangkat daerah untuk mengimplementasikan kegiatan kerja sama; 2. Perangkat daerah proaktif menindaklanjuti perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani; 3. Optimalisasi pemanfaatan data dan kajian pra dan pasca kerja sama

Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun hubungan luar negeri. Permenlu No. 3 Tahun 2019 sebagai panduan yang jelas dan terstruktur. Harapan untuk peningkatan kerja sama luar negeri yang mendukung pembangunan daerah dan nasional. Pentingnya hubungan luar negeri bagi Pemda, sebagaimana diatur dalam Permenlu No. 3 Tahun 2019, terletak pada peluang untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas, serta membuka akses terhadap berbagai manfaat global, seperti investasi, teknologi, dan pengetahuan. Semua ini harus dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, sehingga daerah bisa berkembang tanpa mengesampingkan kepentingan nasional.

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Kemendagri bersama dengan Kemen PAN dan RB

Rapat dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, dipimpin oleh Bapak Plt. Sekjen Kemendagri. Hadir dari BSKDN: Bapak Kepala BSKDN; Bapak Sekretaris BSKDN; Kabag SDMO; dan perwakilan Bagian Perencanaan BSKDN. Hadir pula secara langsung Kepala BPSDM, Dirjen Bina Bangda, dan perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri

Pada rapat dibahas bahwa hasil diskusi dengan KemenPANRB pada 12 September 2024 disepakati bahwa secara prinsip penataan kelembagaan di Kemendagri sehubungan dengan penyusunan Ranperpres tentang Kemendagri, agar tidak mengusulkan penambahan struktur baru, baik Unit Eselon I, II, III, maupun IV. Namun masih dibuka kesempatan untuk perubahan nomenklatur dan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Unit Kerja existing

Pada rapat disampaikan beberapa aspirasi dari perwakilan komponen terkait penambahan struktur baru yang didasari atas kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi agar lebih optimal, terutama kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di antara yang mengusulkan penambahasan Unit Kerja Eselon I adalah Ditjen Bina Adwil yang mengusulkan adanya Ditjen Trantibumlinmas. Ditjen Otonomi Daerah juga mengangkat wacana adanya Ditjen Otonomi Khusus sehubungan dengan adanya Daerah Otonom Baru. Selain itu juga pada internal Ditjen Bina Keuda menyarankan agar ada pemisahan Direktorat BUMD dengan Direktorat BMD yang kini menjadi satu Unit Kerja Eselon II.



Serba Serbi September

Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024

Rapat dilaksanakan pukul 08.30 dan diselenggarakan oleh Bangda Kemendagri, dihadiri oleh peserta daerah dan perwakilan komponen lingkup Kemendagri

Dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024, ada 5 poin yang menjadi perhatian:

- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terbaru;
- Mempertimbangkan waktu penetapan Perubahan RKPD dengan tahapan Perubahan APBD TA. 2024;
- Mempertimbangkan kewajaran kelayakan penganggaran konsistensi perubahan target, dan waktu pelaksanaan subkegiatan;
- Perubahan RKPD tetap terintegrasi dengan SIPD, agar dapat terhubung dengan aspek penganggaran, pengendalian, evaluasi, pengawasan, dan pelaporannya secara nasional.

- Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah mengikuti ketentuan teknis kementerian/lembaga pembina.

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan dalam tahun berjalan, dan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau perubahan RKPD Provinsi Pegunungan Tahun 2024.
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (Silpa) harus digunakan untuk tahun berjalan.
- Penyesuaian terhadap evaluasi Rencana Anggaran dan Program Pembangunan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pegunungan.

Rapat Sosialisasi Rancangan PP tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum secara online (daring)

Rapat dilaksanakan secara daring pada tanggal Senin, 23 September 2024, dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB melalui platform Zoom. Rapat dipimpin oleh fungsional Perancang PUU Ahli Madya mewakili Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN. Hadir secara virtual perwakilan dari Kementerian/Lembaga.

Pembahasan difokuskan pada Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dan Pelaksanaan Hukum. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi dan penguatan kepada seluruh Analis Hukum mengenai rancangan tersebut, yang dirancang untuk memperkuat kepatuhan hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan PUU. Beberapa peserta memberikan pandangan tentang pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan yang sudah ada serta peningkatan kapasitas Analis Hukum dalam mengawasi pelaksanaan hukum secara efektif.

Usulan agar pelaksanaan sosialisasi serupa dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh pejabat fungsional selalu up to date dengan perubahan regulasi. Pejabat Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional menyampaikan bahwa pendekatan berbasis evaluasi akan memperkuat proses review kebijakan, termasuk juga melalui penyusunan Indeks Pembangunan Hukum.



Serba Serbi September

Rapat Bimtek Teknik dan Advokasi Kebijakan

Bimtek dimulai pada pukul 13.30 WIB, dan dihadiri oleh narasumber dari LAN RI serta pegawai fungsional lingkup BSKDN

Bimtek membahas terkait pelaksanaan praktik advokasi kebijakan. BSKDN sesuai tugasnya dapat melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan di lingkup Kemendagri

Bagian Perencanaan mendapatkan masukan terkait pengadaan anggaran kegiatan advokasi kebijakan di BSKDN dan akan menindaklanjutinya.





Rapat Koordinasi Persiapan pelaksanaan giat Seminar dan IGA di Jawa Timur

Rapat dilaksanakan di RR pusat inovasi, dipimpin oleh Kepala Pusat Inovasi dihadiri oleh Kepala bagian perencanaan, staf bagren dan tim inovasi.

Rapat bertujuan untuk koordinasi terkait persiapan pelaksanaan seminar dan IGA di Jawa Timur TA.2024. Pada penyusunan anggaran harusnya lebih cermat untuk perhitungannya karena kegiatan IGA sudah rutin setiap tahunnya dan agar di kemudian hari tidak terjadi kekurangan anggaran

Diharapkan membuat juknis ataupun jurnal untuk disosialisasikan ke pusat dan bagian, pusat inovasi menjadi koordinator. Kegiatan IGA ini milik bersama bukan hanya pusat inovasi Bagian perencanaan berharap pusat inovasi menyerahkan matriks secara keseluruhan anggaran kegiatan IGA dan kebutuhan anggaran untuk tahun 2024



Serba Serbi September

Rapat usulan revisi Perpres 114 tahun 2021 tentang Kemendagri

Rapat dilaksanakan secara virtual dan dipimpin oleh Karo Ortala Setjen Kemendagri. Pada rapat dilaksanakan penataan kelembagaan dan pembahasan Revisi Perpres 114 Tahun 2021 tentang Kemendagri

Pada rapat dilaksanakan diskusi terkait sejumlah isu strategis terkait penataan struktur dan penguatan tugas serta fungsi di Kementerian Dalam Negeri. Salah satu topik utama dalam rapat ini adalah usulan perubahan Unit Kerja Eselon 2 (UKE 2) di beberapa Direktorat Jenderal, yakni Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil), Ditjen Otonomi Daerah (Otda), Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes), dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda). Pada sesi paparan dari Ditjen Bina Adwil, usulan perubahan UKE 2 disampaikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat tugas dan fungsi dalam koordinasi administrasi kewilayahan.

Perubahan ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran Ditjen Bina Adwil dalam penataan wilayah, peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan di daerah, serta memperkuat fungsi pengawasan dan koordinasi terkait kewenangan administratif di tingkat daerah, sedangkan Ditjen Bina Pemdes mengusulkan perubahan UKE 2 dengan fokus pada peningkatan pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa. Dalam paparannya, disampaikan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pembinaan dan evaluasi program-program di tingkat desa, serta mendukung pelaksanaan Dana Desa yang lebih transparan dan akuntabel. Penyesuaian struktur ini juga diharapkan dapat mendorong sinergi antarunit dalam menangani permasalahan pemerintahan desa secara lebih efektif.



Pada rapat dilaksanakan diskusi usulan BSKDN yang awalnya mengusulkan tambahan fungsi pengukuran indeks bidang pemdagri, kemudian diubah menjadi pengkoordinasian indeks-indeks bidang pemdagri. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi tumpang tindih dengan indeks-indeks yang sudah ada di masing-masing komponen Kemendagri. Kekhawatiran yang muncul adalah terdapat persepsi bahwa seluruh indeks kinerja di unit-unit lain perlu ditarik ke BSKDN sehingga menimbulkan ketidakjelasan fungsi dan tujuan. Sebagai solusi, pendekatan ini disederhanakan menjadi peran koordinasi oleh BSKDN. Dengan demikian, BSKDN akan bertindak sebagai fasilitator yang mengoordinasikan berbagai indeks yang sudah ada, tanpa mengambil alih pengukuran yang telah dilakukan oleh masing-masing komponen.

Bagian Perencanaan siap mengawal penyusunan Rancangan Perpres tentang Kemendagri termasuk pendalaman muatan untuk mendukung penguatan kapasitas kelembagaan BSKDN



Serba Serbi September

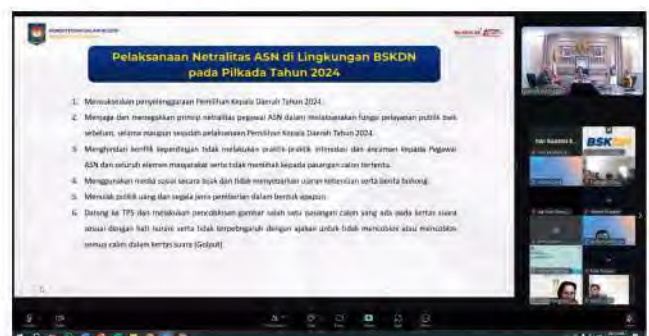
Pengarahan Netralitas ASN di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d. 11.00 WIB melalui virtual zoom meeting dipimpin oleh Kepala BSKDN Kemendagri yang dihadiri oleh seluruh pegawai BSKDN Kemendagri.

Kegiatan Pengarahan Netralitas ASN bertujuan untuk memastikan pegawai negeri sipil tetap bersikap netral dalam konteks politik, terutama menjelang pemilu. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya netralitas, memberikan pemahaman mengenai peraturan yang mengatur perilaku ASN, dan menghindari konflik kepentingan. Dengan demikian, diharapkan ASN dapat menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik, serta berpartisipasi dalam demokrasi tanpa terlibat dalam politik praktis.

Pentingnya netralitas ASN sebagai prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif, yaitu ASN sebagai Pelaksana Kebijakan, Pelayanan Publik dan perekat NKRI dan netralitas ASN mengimplikasikan bahwa ASN harus fokus pada peningkatan kinerja.

Sanksi pelanggaran netralitas ASN seperti hukuman disiplin sedang hingga berat, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.





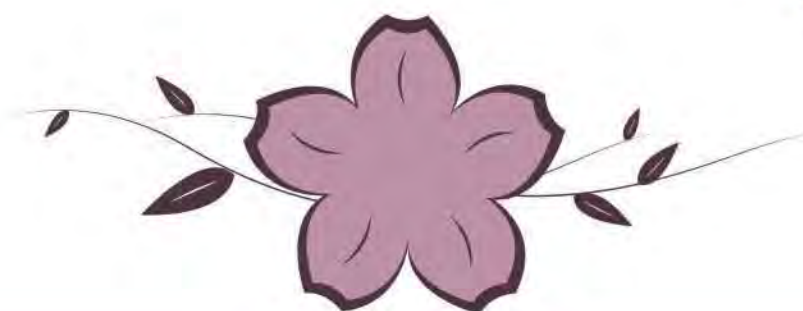
Rapat koordinasi dan konsolidasi pemantapan kegiatan dan anggaran lingkup BSKDN Kemendagri

Rapat dimulai pada pukul 16.30 WIB, acara dibuka oleh Kabag PERENCANAAN BSKDN, dan dihadiri seluruh perwakilan UKE II lingkup BSKDN.



Rapat terkait pembahasan progres pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran per bulan September 2024.

Setiap Pusat Strategi Kebijakan diharapkan untuk dapat melaporkan progres pelaksanaan kegiatan setiap hari Jumat dimulai pada bulan Oktober kepada Bagian Perencanaan. Bagian Perencanaan menyarankan agar pelaksanaan kegiatan di seluruh Pusat Strategi Kebijakan dapat diselesaikan sebelum bulan Desember.



Serba Serbi September

Rapat Kerjasama BSKDN dengan Monash University

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan dan dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa; Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan SDM, TI, dan Inovasi Pemdagri; Statistisi Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Yanlik; dan Perwakilan Bagian SDMO

Pada rapat perwakilan Pusat-Pusat memberikan pandangan terkait kegiatan-kegiatan strategis di masing-masing unit kerja dan menyampaikan kemungkinan kolaborasi yang dapat diwujudkan

Diskusi berjalan interaktif terkait pembahasan strategi kebijakan yang dapat memperkuat peran BSKDN serta penguatan upaya pembinaan inovasi pemerintahan dalam negeri.

ada rapat dibahas pentingnya pengembangan kapasitas ASN melalui program pelatihan berkelanjutan di bidang evaluasi kebijakan dan manajemen pelayanan publik. Evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah juga merupakan bagian dari fokus kajian Monash, terutama kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan publik. Monash memiliki program studi pascasarjana Public Policy yang dapat mendukung penguatan penyusunan analisis kolaboratif dan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan maupun seminar

Dalam rapat disepakati agar selanjutnya menyusun Letter of Intent (LoI) to Collaborate antara BSKDN dan Monash University guna memperkuat kerangka kerja sama di bidang-bidang strategis yang telah dibahas. Selanjutnya, akan dilaksanakan pembahasan teknis terkait penyusunan LoI.



Bagian Perencanaan siap menyusun LoI dimaksud dan berkoordinasi dengan Pusat Fasilitasi Kerjasama untuk rencana perluasan jangkauan kerja sama menuju penandatanganan MoU pada tingkat Menteri



Serba Serbi September

Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Perbatasan Tahun 1446H/2024M

Kegiatan maulid nabi dilaksanakan pukul 09.00-11.15 di Masjid An-Nuur Kemendagri Bersama penceramah Dr. H. Das'ad Latif, S. Sos., S.Ag., M.Si., Ph.D dengan tema Ketauladanan Rasulullah dalam Mewujudkan ASN Ber-Akhlak

Kegiatan Maulid Nabi memiliki tujuan penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertama, perayaan ini dapat meningkatkan spiritualitas ASN, yang berimbas positif pada etika kerja dan moralitas mereka. Selain itu, acara ini sering diisi dengan ceramah yang menekankan nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, toleransi, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan Maulid juga berfungsi sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar ASN, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan meningkatkan rasa kebersamaan.

Peringatan Maulid Nabi sangat penting dalam menciptakan ASN yang berakhlak karena kegiatan ini menjadi momen refleksi untuk mengingat dan meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, ASN diharapkan dapat menerapkannya dalam tugas dan interaksi sehari-hari.





Rapat Rapat Pleno Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d. 11.00 WIB melalui virtual zoom meeting dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Sub Direktorat Partisipasi Masyarakat Informasi dan Pembangunan Daerah (PMIPD) Bangda.

Kegiatan Rapat Pleno Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk mempersiapkan penyusunan dokumen perencanaan daerah khusus untuk RKPD.

Pemutakhiran terhadap Permendagri 90 tahun 2019 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Tujuan Pemutakhiran berdasarkan Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Arahan dan tindak lanjut yaitu masing-masing pengampu urusan diminta untuk mamaksimalkan proses-proses pemutakhiran sesuai dengan timeline yang telah ditentukan (sampai dengan September 2024), hasil pemutakhiran 2024 dapat dimanfaatkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan pemutakhiran yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini efektif diimplementasikan untuk RKPD tahun 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2025.

Serba Serbi September

Rapat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran TA.2024 lingkup Kemendagri

Rapat dilaksanakan pukul 13.00 s.d 15.30 di Ruang Rapat Kepala Biro Perencanaan yang diwakili oleh Perencana Ahli Pertama dan Penata Kelola Pemerintahan.

Rapat ini bertujuan untuk monitoring dan mengevaluasi mengenai adanya anggaran dan kegiatan apakah telah sesuai atau belum dengan standar yang telah ditentukan.

Dalam rapat ini, Terdapat beberapa evaluasi untuk BSKDN:

- Realisasi BSKDN menempati pada no. 6 per tanggal 27 September 2024 dengan realisasi sebesar 69,83%.
- Penilaian kinerja tahun anggaran 2024 berubah menjadi efektivitas capaian RO, Nilai kinerja IKU dan IKP serta Implementasi SBK.
- BSKDN dinilai sudah cukup baik dalam hal evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran,

Peringatan Maulid Nabi sangat penting dalam menciptakan ASN yang berakhlak karena kegiatan ini menjadi momen refleksi untuk mengingat dan meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, ASN diharapkan dapat menerapkannya dalam tugas dan interaksi sehari-hari.



Rapat monitoring dan evaluasi kegiatan program dan anggaran BSKDN

Rapat dilaksanakan pkl. 14.00 s.d 16.30 WIB di Ruang Rapat Vidcon BSKDN dipimpin oleh Sekretaris BSKDN diikuti oleh perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN Kemendagri.

Kecepatan penyerahan anggaran sangat penting untuk memastikan program dapat berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, kita perlu melakukan reviu terhadap setiap program yang ada untuk mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin muncul. Jika ada isu atau masalah yang bisa segera diselesaikan, kita harus berusaha menuntaskannya secepat mungkin agar program dapat berjalan dengan lancar.

Selama proses revisi ini, penting untuk segera melakukan penyesuaian yang diperlukan. Namun, kita juga harus memastikan bahwa revisi tersebut tidak berlebihan dan tetap terfokus pada tujuan utama.

Konsep IGA (Innovative Government Award) harus lebih baik lagi dengan melibatkan lintas pusat. Target realisasi di awal triwulan IV harus lebih ditingkatkan.

Evaluasi target realisasi anggaran secara mingguan sangat penting untuk memantau progres perkembangan baik di tingkat unit pusat maupun unit bagian. Dengan melakukan evaluasi rutin, kita dapat mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul, mengevaluasi kinerja setiap unit, dan memastikan bahwa semua pihak tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, sehingga anggaran dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien.



Galeri





Bagren

Galeri





Baggren

Cobain Yuk! Ayam Cincane Khas Kalimantan Timur



Berikutnya ayam cincane, kuliner khas Kalimantan Timur yang menggunakan ayam kampung sebagai bahan utama. Kunci kelezatan ayam cincane ada pada bumbu rempah-rempah yang digunakan, seperti santan, asam jawa, jeruk nipis, bawang merah, cabai, kemiri, jahe, lengkuas, daun salam, serai, terasi bakar, serta kecap manis.

Sebelum diolah, rempah-rempah dihaluskan terlebih dahulu, lalu ditumis hingga harum. Kemudian bumbu halus dibalurkan ke tubuh ayam, dan diungkep sampai dagingnya empuk. Jika sudah, ayam langsung dibakar atau dipanggang menggunakan arang. Bumbu rempah-rempah yang harum akan meresap dalam setiap suwiran daging ayam, sehingga menghasilkan cita rasa nikmat sejak gigitan pertama.

Be Guling: Makanan Tradisional Khas Bali

Salah satu makanan khas Bali yang populer adalah babi guling. Babi guling sebagai makanan tradisional ini sudah dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia sejak tahun 2011. Pada awalnya babi guling hanya digunakan untuk sajian upacara adat atau keagamaan. Namun kini babi guling dapat ditemukan dengan mudah di berbagai rumah makan, warung, dan hotel-hotel di Bali.

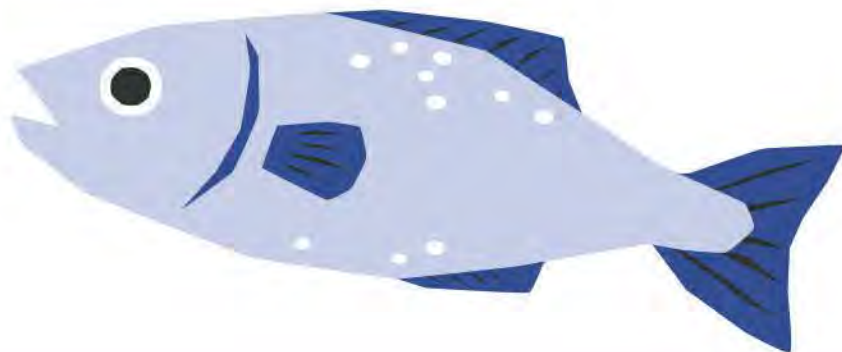
Babi guling atau yang lebih dikenal dengan be guling terbuat dari bahan dasar anak babi yang perutnya diisi dengan base genep (bumbu rangkap) yang terdiri dari : bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, isen, kunir, cabai rawit, gula aren, garam, terasi, daun salam dan sedikit asam.



Icip Makanan Khas dari Maluku Gohu Ikan

Apabila di Jepang ada sashimi, maka di Maluku ada gohu ikan. Gohu ikan adalah ikan cakalang atau tuna mentah yang dipotong dadu dan kemudian dilumuri perasan jeruk nipis serta garam.

Bumbu pelengkapanya adalah campuran bawang merah, cabe rawit, dan daun kemangi. Gohu ikan memadukan cita rasa asam dan manis yang segar. Kuliner khas Maluku ini dapat disantap dengan papeda, singkong, atau pisang. Kamu bisa menemukan Gohu ikan di hampir semua restoran di Maluku.



Makanan Khas Sulawesi Selatan “Coto Makassar”



Salah makanan khas Sulawesi Selatan yang paling terkenal adalah Coto Makassar. Sajian ini terbuat dari isi perut sapi (jeroan) yang direbus dalam waktu lama dengan tambahan racikan rempah khas Indonesia.

Makanan khas Sulawesi Selatan ini biasanya dihidangkan dengan burasa atau lontong yang dibuat dengan santan dan rempah. Pada Desember 2008, Coto Makassar menjadi salah satu menu utama dalam penerbangan domestik Garuda Indonesia dari dan ke Makassar

Bagren Squad



TOMY



DEDEN



GUNAWAN



RIZKI



LINA



CACA



DEA



KAMIL



SUPRIYOKO



GOGO



BAIM



YOS



DWI



DEVI



FUTI



ANSEL



ARI

ありがとう



BS
BADAN STRAT

GATO

う



SKDN
TEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI